


Manajemen

Pembangunan Wilayah : *Strategi dan Inovasi*



Erika Revida | Sukarman Purba | Indah Kusumawati
Hisarma Saragih | Dhea Zatira | Tuti Lisnawati
Hidayat | Hamdan Firmansyah | Tia Ernawati
Robert Tua Siregar | Nunik Yudaningsih

Editor :
Eko Sudarmanto
Einar Christian Soleiman

Manajemen

Pembangunan Wilayah : Strategi dan Inovasi

Penulis

Erika Revida | Sukarman Purba | Indah Kusumawati
Hisarma Saragih | Dhea Zatira | Tuti Lisnawati
Hidayat | Hamdan Firmansyah | Tia Ernawati
Robert Tua Siregar | Nunik Yudaningsih

Editor

Eko Sudarmanto
Einar Christian Soleiman

Hak Cipta Buku Kemenkum dan HAM Nomor : 000256460



Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi

246 + iv.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-97233-1-6

Penulis : Erika Revida, Sukarman Purba, Indah Kusumawati, Hisarma Saragih, Dhea Zatira, Tuti Lisnawati, Hidayat, Hamdan Firmansyah, Tia Ernawati, Robert Tua Siregar, Nunik Yudaningsih

Editor : Eko Sudarmanto, Einar Christian Soleiman

Tata Letak : Insania Team

Desain Sampul : Insania Team

Cetakan 1 : Juni 2021

Copyright © 2021 by Penerbit Insania
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit Insania
Anggota IKAPI
Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati
Jl. Evakuasi, Gg. Langgar, No. 11, Kalikebat Karyamulya, Kesambi,
Cirebon Telp. 085724676697
e-mail: penerbit.insania@gmail.com
Web : <http://insaniapublishing.com>

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan simbol semangat intelektual dalam mengkaji ilmu manajemen yang terbit pada tahun 2021. Kontributor dari buku ini adalah para peneliti dan dosen dari berbagai kampus di Indonesia. Mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Penulisan buku ini dilandasi atas pentingnya *update* penelitian terbaru tentang kajian Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi yang menjadi isu dan problematika saat ini.

Buku ini terdiri dari 11 artikel yang dimasukkan ke dalam 11 bab di dalam buku ini. Upaya penyusunan buku ini dilakukan untuk mendokumentasikan karya-karya yang dihasilkan para penulis sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca secara lebih luas.

Sebagai penutup, tiada gading yang tak retak. Tentunya banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini sehingga kritik dan masukan selalu diperlukan bagi pengembangan studi ilmu manajemen baik secara teori maupun implementasinya. Hal-hal yang besar tentunya berawal dari yang sederhana. Semoga tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi hari ini dan esok.

Cirebon, Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 : Konsep dasar manajemen pembangunan Erika Revida	1
BAB 2 : Perencanaan Pembangunan Sukarman Purba	20
BAB 3 : Pengerahan Sumber Daya Pembangunan Indah Kusumawati	50
BAB 4 : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hisarma Saragih	71
BAB 5 : Penganggaran Pembangunan Dhea Zatira	92
BAB 6 : Implementasi Pembangunan Tuti Lisnawati	109
BAB 7 : Koordinasi Pembangunan Hidayat	125
BAB 8 : Strategi Pembangunan Hamdan Firmansyah	145
BAB 9 Manajemen keuangan dan Investasi Daerah Tia Ernawati	177
BAB 10 : Pengawasan Pembangunan Robert Tua Siregar	195
BAB 11: Inovasi dalam Pembangunan Nunik Yudaningsih	217

Konsep Dasar Manajemen
Pembangunan

Erika Revida

BAB 1



BAB 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh semua manusia yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupannya tanpa terkecuali baik pembangunan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Setiap orang bahkan setiap negara baik negara maju, sedang berkembang apalagi negara terbelakang pasti melakukan pembangunan untuk mencapai tujuannya. Tanpa pembangunan, maka tujuan manusia, kelompok maupun suatu negara tidak akan tercapai dengan efisien dan efektif.

Pembangunan dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja, baik pemerintah pusat, daerah hingga ke pemerintahan desa. Pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun) dan jangka panjang (20 tahun).

Pada dasarnya, pembangunan dapat berwujud fisik maupun nonfisik. Pembangunan yang bersifat fisik adalah pembangunan yang secara kasat mata langsung dapat dilihat dan diraba serta dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap orang. Pembangunan fisik disebut juga dengan

istilah *tangible development*. Sebaliknya, pembangunan nonfisik disebut juga dengan *intangible development*, yang tidak dapat secara langsung dilihat, diraba dan dirasakan manfaatnya oleh setiap orang, akan tetapi melalui proses yang relatif lama akan dapat dirasakan. Pembangunan nonfisik berbeda dengan pembangunan yang bersifat fisik. Adapun contoh pembangunan nonfisik antara lain pembangunan sikap mental, sifat dan perilaku serta karakter manusia yang telah dibawanya sejak kecil sehingga relatif sulit untuk merubahnya.

Pembangunan perlu dikelola atau dimanaj dengan baik agar tercapai tujuannya. Untuk itu diperlukan manajemen pembangunan yang handal serta sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan dimana pembangunan itu dibutuhkan.

B. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah salah satu alat yang ampuh bagi pembangunan untuk mencapai tujuannya. Dengan perkataan lain tanpa manajemen yang baik, maka pembangunan tidak akan dapat mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Menurut Handoko (2001) ada beberapa manfaat manajemen sebagai berikut:

1. Manajemen diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik oleh individu, kelompok maupun organisasi atau perusahaan.

2. Manajemen dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Manajemen ditujukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dan produktivitas.

Sesungguhnya, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to manage*" yang artinya adalah mengatur atau mengelola sesuatu hal atau kegiatan menjadi lebih baik. Setiap kehidupan manusia perlu dikelola atau diatur dengan dengan baik. Oleh karena itu manajemen sangat dibutuhkan oleh seluruh sektor kehidupan manusia baik eksakta maupun non eksakta tanpa terkecuali.

Manajemen adalah ilmu dan seni dan bahkan sebuah profesi untuk mengelola orang lain agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh seorang. Adapun pengertian manajemen berdasarkan pendapat para pakar disajikan sebagai berikut:

1. Terry (2010) menjelaskan pengertian manajemen sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan melakukan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.
2. Hasibuan (2012) menyatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Subagyo (2001) mendefinisikan manajemen sebagai tindakan yang dilakukan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui koordinasi terhadap kegiatan orang lain, fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan manajemen lainnya yaitu perencanaan, *staffing*, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan.
4. Assauri (2004) memberi arti manajemen sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya.
5. Robbins dan Coulter (2007) mengartikan manajemen sebagai proses pengkoordinasian pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan orang lain sehingga pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat dalam rangka mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen adalah proses untuk memperoleh sesuatu hal yang dilakukan melalui kegiatan orang lain dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian terhadap orang lain dan unit kerja dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien dan efektif.

C. Pengertian Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata bangun atau bangkit, yang artinya adalah bangun atau bangkit dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Pembangunan selalu dikaitkan dengan adanya perubahan dari yang belum ada menjadi ada, yang belum baik menjadi lebih baik dan seterusnya. Dengan perkataan lain pembangunan selalu mengalami perubahan dan peningkatan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan beberapa pengertian pembangunan menurut para pakar sebagai berikut:

1. Supardi (1994) menyatakan pembangunan adalah proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, yang meliputi pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial dalam rangka terwujudnya masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.
2. Nugroho dan Dahuri (2004) menyatakan pembangunan sebagai suatu kegiatan atau proses yang terintegrasi melalui koordinasi untuk menciptakan alternatif-alternatif kegiatan dan hasil yang lebih maksimal kepada warga negara dan masyarakat untuk mencapai tujuannya yang paling manusiawi.
3. Siagian (2003) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang lebih baik serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

4. Listyaningsih (2014) memberi arti pembangunan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan perubahan dan pertumbuhan yang lebih baik dan terencana serta sadar yang dilakukan oleh sekelompok orang menuju ke arah yang lebih baik.
5. Umar (2004) menjelaskan pengertian pembangunan sebagai perubahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan pada norma-norma dan peraturan yang berlaku serta memanfaatkan sumber daya yang ada.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana serta berkesinambungan yang dilakukan oleh masyarakat, bangsa dan negara untuk merubah suatu keadaan ke suatu keadaan yang lebih baik lagi dengan mengerahkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, Siagian (2003), menyatakan bahwa pembangunan mengandung beberapa ide pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan tanpa akhir.
2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar berdasarkan logika tertentu.

3. Pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik.
4. Pembangunan yang dilakukan memiliki makna modernitas.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Di sisi lain, Tjokroamidjojo (1995) menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan adalah proses yang mengandung makna perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia dengan terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan mempunyai sifat dan konsep yang transendental, *meta-disciplinary phenomenon* dan berbentuk bentuk ideologi yaitu *the ideologi of developmentalism*.
5. Pembangunan adalah konsep yang syarat nilai (*value loaded*) yaitu proses pencapaian nilai-nilai yang dilakukan oleh suatu bangsa dan negara.
6. Pembangunan yang dilakukan memiliki makna *culture specific, situation specific, and time specific*.

Selanjutnya, Todaro (2006) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*);
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik dan sejahtera. Dengan pembangunan diharapkan ada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bukan sebaliknya. Pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan baik pada level makro (nasional), maupun mikro (kelompok masyarakat). Pembangunan haruslah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Pembangunan perlu dikelola dan diatur dengan baik sehingga diperlukan manajemen pembangunan. Dengan manajemen pembangunan, maka pembangunan yang dihasilkan akan lebih terarah, terkoordinasi dengan baik dan hasil pembangunan akan tercapai dengan maksimal.

D. Manajemen Pembangunan

Pada dasarnya manajemen bersifat dinamis. Hal ini tampak dari perkembangan manajemen, mulai dari manajemen yang paling klasik, neo klasik, dan manajemen yang paling modern. Perubahan paradigma manajemen antara lain disebabkan perubahan kebutuhan pasar dan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian halnya dengan manajemen pembangunan.

Manajemen pembangunan adalah terobosan baru dari istilah administrasi pembangunan. Dahulu penggunaan istilah manajemen hanya didominasi dan digunakan oleh sektor swasta (*privat*). Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan paradigma, maka penggunaan kata manajemen sudah diadopsi oleh sektor publik (pemerintah), sehingga ada perubahan nama dari administrasi pembangunan menjadi manajemen pembangunan.

Esman (1991) menyatakan bahwa konsep manajemen pembangunan (*management of development*) adalah sebuah perspektif dan istilah lain dari konsep administrasi pembangunan (*administration of development*). Selain itu Kartasasmita (1997) menyatakan bahwa studi tentang manajemen telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, namun teori dasar manajemen tidak berubah termasuk manajemen pembangunan yaitu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan.

Manajemen pembangunan adalah proses untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan, implementasi, monitoring dan evaluasi maupun pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Sebagaimana halnya dengan fungsi-fungsi manajemen, maka manajemen pembangunan pun mempunyai fungsi-fungsi manajemen tertentu yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan (implementasi) pembangunan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengawasan pembangunan.

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah tahap awal dan sangat fundamental bagi manajemen pembangunan dan merupakan proses yang berkesinambungan serta merupakan suatu keputusan yang dilakukan dengan memilih program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dari berbagai program dan kegiatan pembangunan yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dadang (2002) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan meliputi proses pengambilan keputusan secara sistematis dan berkesinambungan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah dalam arti sempit adalah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah, sedangkan perencanaan pembangunan daerah

dalam arti luas adalah seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Ada beberapa ahli yang memberi pengertian tentang perencanaan pembangunan. Riyadi dan Bratakusumah (2005) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif kegiatan atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan dijadikan acuan dan bahan untuk pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas pembangunan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, Soekartawi (1990) memberi arti perencanaan pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Dengan demikian yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan adalah proses pemilihan program dan kegiatan pembangunan yang secara sadar dilakukan dengan mengerahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Implementasi Pembangunan

Implementasi pembangunan merupakan perwujudan dari perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan. Implementasi merupakan penentu tercapainya tujuan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan meliputi seluruh kehidupan manusia baik sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, peran partisipasi masyarakat sangat menentukan. Pemerintah tidak bisa sendiri untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu masyarakat harus mendukung dan mau melaksanakan pembangunan sekecil apapun itu. Masyarakat secara sendiri-sendiri maupun bergotong royong dituntut untuk melaksanakan pembangunan di desanya. Kaho (2003) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai pelaksana pembangunan adalah salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk mencapai tujuannya. Masyarakat adalah subjek dan objek pembangunan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memastikan apakah perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan berjalan dengan baik serta

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan program. Suryana (2012) memberi pengertian monitoring sebagai pengendalian yang dilakukan dengan tujuan agar hasil (*output*) perencanaan dihasilkan dari proses implementasi yang sesuai rencana. Sementara itu, Hewitt (1992) mendefinisikan monitoring sebagai aktivitas internal yang dirancang untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) dari perkembangan implementasi pembangunan yang pada umumnya berbentuk masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Selanjutnya, Muktiali (2009) merumuskan metode monitoring dan evaluasi dengan indikator SMART, yakni:

- a. *Specific* yaitu tujuan yang hendak di monitoring dan dievaluasi harus secara spesifik menunjukkan hal-hal yang diinginkan.
- b. *Measurable*; tujuan yang hendak diukur melalui monitoring dan evaluasi harus dapat dilihat dari indikator yang terukur.
- c. *Attainable*; tujuan yang hendak dimonitoring dan dievaluasi harus benar-benar dapat dicapai dengan ketersediaan sumberdaya dan potensi yang dimiliki.
- d. *Relevant*; tujuan yang hendak dimonitoring dan dievaluasi harus sesuai dengan pengelolaan dan kebutuhan informasi yang dimiliki.

- e. *Timely*; tujuan yang hendak dimonitoring dan dievaluasi harus tepat waktu sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan kebutuhan.

4. Pengawasan Pembangunan

Pengawasan pembangunan merupakan unsur yang pokok bagi manajemen pembangunan. Tanpa pengawasan pembangunan, maka manajemen pembangunan tidak akan mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan. Pengawasan dapat bersifat internal (dari dalam) dan eksternal (dari luar) organisasi. Johnson, Kast, dan Rosenzweig (1973) membagi pengawasan ke dalam dua jenis yaitu a) pengawasan organisasional, dan b) pengawasan operasional. Selanjutnya, Johnson, Kast, dan Rosenzweig (1973) menambahkan bahwa ada 4 (empat) unsur pokok pengawasan yaitu: a) penentuan standar kinerja, b) perumusan instrumen pengawasan yang dapat dipergunakan dalam mengukur suatu kinerja suatu kegiatan, c) perbandingan hasil aktual dengan kinerja yang diharapkan, d) pengambilan langkah-langkah pembenahan atau koreksi.

Di sisi lain, Suryana (2012) menyatakan bahwa pengawasan pembangunan akan berdampak terhadap kinerja aparatur, yakni:

1. Dapat meningkatkan tanggung jawab aparatur yang lebih besar dalam melaksanakan program.

2. Lebih mendorong aparaturnya pelaksana untuk melaksanakan program sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan.
3. Menghindari terjadinya penyelewengan dan kegagalan dalam melaksanakan program.
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan menghindari kerugian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, S. (2004). *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Press.
- Dadang, S. (2002). *Proses Pengambilan Keputusan Perencanaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Esman, M. J. (1991). *Management Dimensions of Development: Perspective and Strategies*. Connecticut: Kumarian Press.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, M.S.P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hewitt, M. (1992). *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*. Maryland: Harvester Wheatsheaf.
- Johnson, Kast, dan Rosenzweig. (1973). *The Theory and Mangement of Systems*. New York: Mc Graw Hill-Book Co.
- Kaho J.R. (2003). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Kartasasmita G. (1997). *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Umar, Arsyad. (2004). *Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Erlangga.

- Muktiali, M. (2009). *Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Manfaat Program Pembangunan di Kota Semarang*. Jurnal Riptek, 3(2), pp.11-20.
- Nugroho, I. & Dahuri, R (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Riyadi & Bratakusumah, D.S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, S & Coulter, M. (2007). *Manajemen*. Edisi Kedelapan. Jakarta: PT Indeks.
- Siagian, S.P. (2003). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekartawi. (1990). *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subagyo, P. (2001). *Manajemen Operasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Supardi, I. (1994). *Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suryana, A. (2012). *Strategi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem. Penjaminan Mutu Internal Sekolah*. Bandung: U. Putera.
- Terry, G.R. (2010). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. (2006). *Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga Edisi Kesembilan*. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tjokromidjojo, B. (1995). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Mas Agung.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. ERIKA REVIDA, MS adalah guru besar Ilmu Administrasi Publik FISIP, Universitas Sumatera Utara. Lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Pendidikan Doktor (S3) bidang Ilmu Administrasi Publik diperoleh dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 2005. Magister (S2) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada FISIP USU pada tahun 1986. Sejak 1 Januari 1987 menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan hingga kini. Pada tanggal 1 April 2007 ditetapkan menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan. Banyak menulis buku dan artikel pada jurnal nasional dan internasional dalam bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, manajemen perubahan, *e-government*, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pelayanan pariwisata, dan lain-lain. Email : erikarevida@yahoo.com.

Perencanaan Pembangunan

Sukarman Purba

BAB 2



BAB 2

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan fungsi pertama dalam manajemen. Perencanaan merupakan langkah awal untuk merencanakan suatu program atau kegiatan untuk masa depan. Artinya, perencanaan merupakan pedoman atau pemandu (*guide*) terhadap aktivitas atau program yang harus dipedomani untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, perencanaan akan menentukan hal-hal yang ingin dicapai, yaitu tujuan di masa depan, menentukan berbagai tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembangunan merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyak faktor yang terlibat dan memengaruhi pembangunan, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak akan dapat terlaksana dengan baik serta berjalan secara spontan, tanpa melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk melakukan dan merencanakan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan (Listyaningsih, 2014).

Keberhasilan dan kesuksesan dalam pelaksanaan program pembangunan sangat ditentukan oleh persiapan dengan perencanaan yang matang. Artinya, bahwa perencanaan yang baik harus dipersiapkan dan terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam perencanaan akan terdapat berbagai aktivitas, menentukan arah pencapaian, mengukur kapasitas mengkaji ketidakpastian, serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapainya.

Untuk itu, setiap daerah atau wilayah harus dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan dengan baik, yang akan dilaksanakan untuk masa depan dengan berbagai situasi agar proses dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, teratur dan dapat dipertimbangkan program pembangunan yang menjadi prioritas dan program yang harus dibelakangkan untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Perencanaan pembangunan daerah atau wilayah sangat diperlukan untuk menjamin laju perkembangan pembangunan di wilayah atau daerah dan merata sehingga diharapkan tercapai pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

B. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Perencanaan dalam bahasa Inggris disebut *planning* merupakan langkah awal dalam proses manajemen. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan melalui berbagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apapun yang direncanakan merupakan tindakan-tindakan untuk masa depan. Artinya, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan (Abe, 2005). Nawawi (2003) mengatakan perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Siagian (2008) menyatakan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang segala sesuatu yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut tersebut dapat dinyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi dan sistematis dalam pengambilan keputusan tentang

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Artinya, perencanaan merupakan hasil proses berpikir yang mendalam dari berbagai alternatif, menggunakan data yang akurat sehingga dianggap lebih memiliki efektivitas dan efisiensi.

Hasibuan (2004) menjelaskan begitu pentingnya suatu perencanaan dilakukan, karena:

1. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-kebijakan prosedur dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dan efisien;
2. Perencanaan menjadikan tindakan ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan;
3. Perencanaan merupakan suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang;
4. Perencanaan memberikan suatu gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan;
5. Perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian;
6. Perencanaan menyebabkan semua kegiatan-kegiatan harus dilakukan secara teratur dan bertujuan.

Menurut Siagian (2005) bahwa ciri-ciri dari perencanaan yang baik, adalah:

1. Perencanaan harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
2. Perencanaan harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi;
3. Perencanaan harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan;
4. Perencanaan harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti;
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan;
6. Perencanaan harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Perencanaan harus luas;
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan;
9. Perencanaan harus bersifat praktis.

Sedangkan Moekijat (2000) menyatakan tujuan dari perencanaan (*objective of planning*) secara objektif, antara lain :

1. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, seleksi atas berbagai alternatif tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan;
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang;

3. Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan;
4. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan;
5. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja;
6. Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna Organisasi atau Institusi.

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Artinya, pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Siagian (2005), pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah atau wilayah. Widodo (2006) menyatakan pembangunan mulai dari proses perencanaan dalam pelaksanaannya harus mempunyai tiga nilai inti pembangunan dan tujuan, yaitu: (1) Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*sustenance*); (2) Manusia

terhormat dalam bentuk harga diri; dan (3) Kebebasan (*freedom of servitude*). Sedangkan, tiga tujuan pembangunan, yaitu: (1) Meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi barang kebutuhan pokok; (2) Peningkatan standar hidup; dan (3) Perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu.

Pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah atau wilayah merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Artinya, perencanaan pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Untuk itu, dalam perencanaan pembangunan pada setiap daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan

daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif.

Segala program pembangunan harus melalui suatu perencanaan yang baik berdasarkan hasil pemikiran dan berbagai pertimbangan yang rasional serta berdasarkan data yang akurat dan mendukung, untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber (Uno, 2006). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa perencanaan harus dinamis karena dilaksanakan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian akibat perubahan situasi dan kondisi. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Pengertian perencanaan pembangunan menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk

melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktivitas (Riyadi, 2005).

2. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyaningsih, 2014).
3. Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Bratakusumah & Riyadi, 2005).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dinyatakan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan kebijakan melalui berbagai alternatif/pilihan berdasarkan pada data, fakta dan informasi, sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas, dalam mencapai tujuan yang lebih baik secara efektif dan efisien. Selain itu, perencanaan pembangunan harus senantiasa dapat memperhitungkan kesinambungannya hasil pembangunan yang dilakukan. Bila dikaitkan hubungannya dengan daerah sebagai wilayah pembangunan, maka perencanaan pembangunan daerah

adalah suatu proses kegiatan/aktivitas yang dilakukan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik bagi suatu komunitas dalam suatu wilayah tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, dan berorientasi secara menyeluruh, lengkap dan berprioritas.

Bryant & White (1989) menyatakan bahwa implikasi dari perencanaan pembangunan suatu wilayah sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk memengaruhi masa depan, meliputi:

1. Memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan;
2. Mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya;
3. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu sehingga diharapkan masyarakat akan menerima manfaat pembangunan.

Nitisastro (2010) memperincikan apa saja yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan suatu wilayah atau daerah merupakan suatu usaha dan tanggung jawab dari pemerintah daerah tersebut yang bertujuan untuk membangun daerahnya ke arah yang lebih baik, maju dan sejahtera dengan tetap memperhatikan segala potensi dan sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam pembangunan sehingga akan menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi keuangan daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, sumber daya manusia dan sebagainya.

C. Tujuan perencanaan pembangunan

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan, ketersediaan dana, dan penyelenggaraan pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif sehingga

diharapkan dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Ivancevich dan Matteson (2002) menjelaskan perencanaan (*planning*) jika digunakan dengan lebih baik bertujuan membantu manajemen dalam mengadaptasi setiap perubahan yang terjadi, kedudukannya semakin sangat penting pada masa depan untuk menghasilkan produk dan pelayanan yang diharapkan.

Robbins dan Coulter (2010) menyatakan pentingnya dilakukan perencanaan dalam setiap program pembangunan bertujuan, yaitu:

1. Untuk memberikan arah dan tujuan bagi perusahaan atau pemerintah;
2. Dapat ditentukan suatu pedoman sebagai standar/ ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan di masa mendatang;
3. Dengan perencanaan dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan sehingga akan mempermudah pengawasan;
4. Membantu memperkirakan peluang di masa mendatang;
5. Dengan perencanaan akan timbul efisiensi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, maka pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok. Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut, sebagai berikut:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan pembangunan karena perencanaan yang dilakukan diharapkan dapat menjadi pedoman dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga memberikan kerangka pemersatu dan membantu untuk memperkirakan peluang-peluang di masa yang akan datang, dan untuk pencapaian tujuan pembangunan.

D. Unsur-unsur dalam Perencanaan Pembangunan

Untuk merencanakan suatu pembangunan pada suatu daerah harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan daerah, agar pembangunan yang akan dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Artinya, segala sesuatu yang direncanakan harus benar-benar diperhatikan unsur-unsur yang mendukung perencanaan pembangunan, seperti sumber daya dan potensi sebelum merumuskan perencanaan pembangunan. Tjokroamidjojo (2006), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar dari perencanaan pembangunan yang sering disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, harus ditetapkan terencana;
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel- variabel pembangunan dan implikasinya;
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan tersebut terutama pembiayaan;
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah;
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain;
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk merencanakan suatu pembangunan haruslah didukung dan berdasar pada data dan informasi yang akurat dan faktual, valid dan akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan sumber alam, sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

E. Jenis-jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan. Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing

Menurut Rahman (1989) bahwa jenis-jenis perencanaan pembangunan dapat ditinjau dari segi sifatnya, luas lingkungannya, dan dari segi pembuat rencananya.

1. Ditinjau dari segi sifatnya, yaitu ditinjau dari segi sifatnya terdapat perencanaan yang dibuat berdasarkan fakta nyata, perencanaan yang dibuat berdasar hasil penalaran, *regio planning*, *flexible planning*, dan *continue planning*.
 - a. Perencanaan yang dibuat berdasarkan fakta nyata, yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau hasil kegiatan observasi di lapangan;

- b. Perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil penalaran, yaitu perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil renungan pemikiran yang biasa disebut *rasional planning* atau *logical planning*;
 - c. *Regio Planning*, yaitu perencanaan yang berlaku sekali saja dan tidak ada tindak lanjutnya;
 - d. *Flexible Planning*, yaitu perencanaan yang bersifat luas dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan situasi dan kondisi setempat;
 - e. *Continue Planning*, yaitu perencanaan yang berkelanjutan, sehingga nampak suatu progress.
2. Ditinjau dari luas lingkupnya, yaitu ditinjau dari segi luas lingkupnya terdapat *international planning*, *national planning*, *regional planning*, *city planning*, dan *village planning*.
- a. *International planning*, yaitu suatu perencanaan yang mencakup kepentingan negara-negara dunia. Perencanaan semacam ini biasanya dibuat oleh badan-badan internasional;
 - b. *National planning*, yaitu perencanaan yang dibuat oleh suatu negara yang mencakup kepentingan dari negara yang bersangkutan;
 - c. *Regional planning*, yaitu perencanaan yang dibuat oleh pemerintahan wilayah dan daerah;
 - d. *City planning*, yaitu suatu perencanaan tingkat kota;
 - e. *Village planning*, yaitu perencanaan tingkat pedesaan.

3. Ditinjau dari segi pembuat rencananya, yaitu ditinjau dari segi pembuat rencananya terdapat *individual planning*, *staff planning*, *organizing planning committee*, *department planning*, dan *supervisory planning*.
 - a. *Individual planning*, yaitu suatu perencanaan yang dibuat secara perorangan.
 - b. *Staff planning*, yaitu suatu perencanaan yang dibuat untuk mengatur suatu staf.
 - c. *Organizing planning committee*, yaitu suatu perencanaan yang dibuat oleh suatu panitia dari suatu organisasi.
 - d. *Department planning*, yaitu suatu perencanaan yang dibuat oleh suatu departemen;
 - e. *Supervisory planning*, yaitu perencanaan berkaitan dengan semua faktor dalam situasi bisnis dan mengaturnya sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan jenis-jenis perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, yaitu Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan jangka pendek. Penjelasan masing-masing jenis perencanaan pembangunan tersebut, sebagai berikut

1. Perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan jangka panjang dengan jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, jangka waktu 25 tahun, dan

dewasa ini, mencakup waktu 20 tahun, baik nasional maupun daerah.

2. Perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan jangka menengah dengan jangka waktu 4-5 tahun. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah bersifat nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional, yang memuat sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif agar menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
3. Perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali disebut sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Dalam rencana tahunan ini memuat indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan sehingga dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD).

Lebih lanjut, Fattah (1996) menjelaskan bahwa jenis-jenis perencanaan pembangunan dibedakan berdasarkan besarnya, tingkatannya, dan jangka waktunya, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut besarnya, yaitu menurut besarnya terdapat perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro.
 - a. Perencanaan makro, yaitu perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional;
 - b. Perencanaan meso, yaitu penjabaran kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro ke dalam program-program berskala kecil;
 - c. Perencanaan mikro, yaitu perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso.

2. Menurut tingkatannya, yaitu menurut tingkatannya terdapat perencanaan strategik, perencanaan koordinatif, dan perencanaan operasional.
 - a. Perencanaan strategik, yaitu merupakan perencanaan jangka panjang yang didalamnya terdapat uraian tentang kebijakan jangka panjang serta juga waktu pelaksanaan;
 - b. Perencanaan koordinatif, yaitu perencanaan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien yang mencakup semua aspek

- operasi suatu sistem yang harus ditaati berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat perencanaan strategik;
- c. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan di lapangan dari suatu rencana strategi. Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana suatu program atau proyek khusus dilaksanakan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang harus ditetapkan secara jelas.
3. Menurut jangka waktunya, yaitu dibedakan atas perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang.
- a. Perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun dan merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. Perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu pelaksanaan 5-10 tahun dan merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang, tetapi sudah lebih bersifat operasional;

- c. Perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan yang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun.

F. Tahapan-tahapan dalam Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dimulai dari persiapan melalui pengumpulan data sampai dengan implementasi rencana pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni:

1. Penyusunan rencana, yaitu pada tahap ini terdiri dari 4 (empat) langkah, sebagai berikut:
 - a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur;
 - b. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;
 - c. Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan rencana, yaitu produk hukum harus jelas sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, seperti Undang-Undang/Peraturan Daerah, Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan sebagainya.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana, yaitu untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana, yaitu bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Blakely (1989) menyatakan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan mulai dari proses sampai diperoleh suatu rencana pembangunan yang sesuai dan berkualitas memerlukan enam tahapan di dalam perencanaan daerah, yaitu:

- a. Pengumpulan dan analisa data;
- b. Penyelesaian strategi pembangunan daerah;
- c. Menyeleksi proyek-proyek pembangunan daerah;
- d. Pengumpulan *action plan*;
- e. Mengidentifikasi rincian proyek;
- f. Persiapan rencana pembangunan keseluruhan dan implementasi.

Tjokroamidjojo (1996) menyatakan tahapan-tahapan dalam proses perencanaan pembangunan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, yaitu meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum memulai suatu rencana (*review before take off*) maupun tinjauan terhadap pelaksanaan rencana sebelumnya (*review of performance*), perkiraan keadaan masa yang akan datang (*forecasting*), penetapan tujuan rencana (*plan objectives*), dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana;
- b. Penyusunan program rencana, yaitu dilakukan melalui perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, rincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga yang akan melakukan program-program pembangunan dengan

- penyusunan menggunakan *flowchart*, *operation-plan* atau *network-plan*;
- c. Pelaksanaan rencana, yaitu implementasi yang terdiri atas eksplorasi, konstruksi dan operasi serta diikuti implikasi pelaksanaannya, yang secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian;
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana, yaitu bertujuan untuk mengusahakan agar pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, dan mengetahui apabila terdapat penyimpangan sehingga diketahui penyebabnya dan dapat dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan. Untuk itu, dilakukan monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana rencana;
 - e. Pengevaluasian, yaitu untuk membantu kegiatan dari pengawasan secara terus menerus. Disamping itu, evaluasi juga dapat dilakukan sebelum rencana dimulai dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga hasil evaluasi dapat melakukan perbaikan untuk perencanaan selanjutnya.

G. Hambatan dalam Perencanaan Pembangunan

Banyak faktor yang memengaruhi dalam melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, seperti situasi perekonomian yang bisa mengalami perubahan, kondisi kebutuhan masyarakat yang beragam sehingga

harus dikaji sebelum merumuskan perencanaan pembangunan. Artinya, Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005) hambatan yang sering terjadi dalam proses perencanaan pembangunan daerah atau wilayah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Keadaan politis yang merupakan kendala oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mengganggu pada substansi perencanaan pembangunan;
2. Kondisi sosial ekonomi, yang biasanya mencerminkan kemampuan finansial daerah yang memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik;
3. Budaya atau kultur yang dianut oleh masyarakat. Bila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan sangat memengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya.

Sedangkan, Todaro (2000) menyatakan kegagalan dalam proses perencanaan pembangunan daerah atau wilayah diakibatkan oleh beberapa masalah, yaitu :

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya;

2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal;
3. Gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya;
4. Kelemahan kelembagaan;
5. Kurangnya kemauan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Blakely, E. J. (1989). *Planning Local Economic Development: Theory and Practise*. California: SAGE Publication, Inc.
- Bratakusumah, D. S., & Riyadi, D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bryant, C., & White, L. G. (1989). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Fattah, N. (1996). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, M. S. P. (2004). *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ivancevich, J. M., dan Matteson, M..T (2002). *Organizational Behaviour and Management*. Singapore: McGraw-Hill.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moekijat. (2000). *Kamus Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nitisastro, W. (2010). *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Rahman, N. (1989). *Instruksional Material Perencanaan Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Depdikbud.
- Riyadi dan Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2010). *Manajemen*. Alih Bahasa: Bob Sabran dan Devri Barnadiputera. Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, P. S. (2005). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Siagian, P. S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Tjokroamidjojo, B. (1996). *Perencanaan Pembangunan*. Edisi ke-19. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjokroamidjojo, B. (2006). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: DPR RI.
- Uno, H. B. (2006). *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

PROFIL PENULIS



Dr. Sukarman Purba, S.T., M.Pd, dilahirkan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Mei 1962. Latar belakang Pendidikan yang diikuti, lulus dari pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Teknik Elektro IKIP Medan Tahun 1986, S1 Teknik Elektro UISU Medan Tahun 2000, pendidikan S2 Jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan dari IKIP Jakarta Tahun 1992, dan pendidikan S3 Jurusan Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta Tahun 2008. Kesehariannya mengajar pada Universitas Negeri Medan. Aktif menulis Media Sosial, Menulis Buku Referensi yang ditulis secara kolaborasi di berbagai penerbit. Selain itu, aktif menulis pada jurnal nasional maupun internasional dan melakukan penelitian dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial dan pariwisata. Dalam bidang organisasi profesi, sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) Pusat dan Daerah Sumatera Utara, Pengurus Organisasi kemasyarakatan HMSI Sumatera Utara, PMS Kota Medan dan IKA S3 Manajemen Pendidikan UNJ Wilayah Sumatera Utara. Email: arman_prb@yahoo.com.

Pengeralahan Sumber Daya
Pembangunan

Indah Kusumawati

BAB 3



BAB 3

PENGERAHAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Dalam dinamika pembangunan ekonomi suatu negara maka yang perlu diperhatikan adalah pembangunan ekonomi di suatu daerah-daerah di negara tersebut, karena jika daerah-daerah sudah dapat berkembang dengan baik maka dapat dikatakan bahwa ekonomi negara tersebut dapat berkembang dengan lebih baik.

Dalam pembangunan ekonomi daerah salah satu aspek yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam hal ini sangat ditentukan oleh kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tersebut dengan kata lain persediaan (dalam aspek kuantitatif) dan mutu sumberdaya (dalam aspek kualitatif) dan dimensi penggunaannya harus dirumuskan dalam suatu kerangka kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang bermutu, adil, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan .

Hal ini merupakan filosofi utama dari makna otonomi daerah sebagaimana digariskan secara tegas dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 tahun 1999, secara teknis hasil-hasil yang

dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah tentu akan sangat tergantung dengan sejauh mana sumberdaya yang tersedia mampu dioptimalisasikan penggunaannya, era otonomi daerah mengisyaratkan perlu adanya pengkajian yang mendalam bersifat komprehensif tentang beragam potensi sumberdaya yang tersedia akan digunakan sebagai modal dasar utama untuk menggerakkan dan mendorong proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Sumber Daya Ekonomi Daerah

Sumberdaya ekonomi daerah atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah pada dasarnya dapat diartikan sebagai sesuatu sumberdaya yang dimiliki oleh daerah yang dapat memberikan manfaat/*benefit* serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi wilayah.

Secara umum terdapat 4 pengelompokkan sumberdaya tersebut yaitu :

1. Sumberdaya alam/*Natural resources/endowment factors* disebut juga *Natural Capital*;
2. Sumberdaya manusia/*Human Resources /human capital*;
3. Untuk sumberdaya buatan *Physical Resources* atau *Physical Capital*;
4. Sumberdaya Sosial/*Sosial Resources* atau *Sosial Capital*.

a. Sumberdaya Alam

Untuk sumberdaya alam/*Natural Resources/endowment factors* pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) Sumberdaya alam yang tidak pernah habis/*renewable perpetual resources* jenis sumberdaya alam yang masuk kategori ini selalu tersedia sepanjang waktu dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, contohnya, sinar matahari, angin, gelombang laut (termasuk sumberdaya energi) dan pemanfaatan jenis sumberdaya alam seperti ini pada dasarnya dapat dieksploitasi sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia sepanjang masa. Sumberdaya alam ini pada umumnya bersifat permanen namun demikian jenis sumberdaya ini tidak dapat diproduksi oleh manusia. Ketergantungan terhadap sumberdaya secara structural harus bisa dialihkan pada sumberdaya alam lain, misalnya, penggunaan sinar matahari, panas bumi, atau gelombang laut termasuk angin, akan mengurangi ketergantungan manusia terhadap sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui.
- 2) Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui/*Non renewable or exhaustible resources*, jenis sumberdaya ini pada dasarnya meliputi sumberdaya alam yang mensuplai energy seperti : minyak, gas alam, uranium,

batubara, serta mineral yang non energi seperti misalnya: tembaga, nikel, aluminium, dan lain-lain, sumberdaya alam jenis ini adalah sumberdaya alam dalam jumlah yang tetap berupa defosit mineral di berbagai tempat dimuka bumi, sumberdaya alam jenis ini bisa habis baik karena sifatnya yang tidak bisa diganti oleh proses alam maupun karena proses penggantian alamiahnya berjalan lebih lamban dari jumlah pemanfaatannya.

- 3) Sumberdaya Alam yang potensial untuk diperbarui / *potentially renewable resources* , kategori sumberdaya alam ini tergolong sumberdaya alam dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat namun demikian lambat laun akan dapat diganti melalui proses alamiah misalnya : pohon-pohon dihutan, rumput di padang rumput, deposit air tanah, udara segar dan lain-lain, hal ini diungkapkan oleh Yakin,1997 dan Soeparmoko, 1997. Sumberdaya alam ini keberadaannya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka untuk mendorong mempercepat dan menunjang proses pembangunan wilayah daerah. Namun demikian penting untuk diperhatikan aspek ketersediaan termasuk daya dukungnya terhadap mobilitas pembangunan daerah,

karena apabila sumberdaya alam dengan 3 kategori ini dimanfaatkan dengan tidak arif bijaksana maka akan stagnasi dan mengakibatkan kemunduran dinamika pembangunan ekonomi wilayah sehingga memperlambat proses pembangunan ekonomi daerah.

b. Sumberdaya Manusia

Pada saat ini peranan sumberdaya manusia dalam konteks kegiatan pembangunan ekonomi daerah/wilayah semakin signifikan. Faktor sumberdaya manusia ini telah menghadirkan suatu proses pemikiran baru dalam teori-teori pembangunan ekonomi yang menempatkan sumberdaya manusia sebagai poros utama pembangunan ekonomi baik dalam skala global, nasional maupun daerah, strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan sumberdaya manusia/*Human Resources Development* dianggap sangat relevan dan cocok dengan kondisi dan karakter pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang sejak era 80 an , strategi pembangunan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar perencanaan pembangunan ekonomi berkebangsaan Pakistan yang bernama Mahbub UI Haq yang pada saat itu menjadi konsultan Utama *United Nation Development Programme* (UNDP). Mahbub UI Haq berpendapat bahwa pengembangan sumberdaya manusia harus dijadikan landasan utama dalam

kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan hal ini dianggap penting mengingat ketertinggalan negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri maju dalam tingkat kesejahteraan ekonomi seperti kualitas dan standar hidup hanya akan dapat diperkecil manakala terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam pengembangan kualitas dan standar hidup hanya akan dapat diperkecil manakala terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam proses pembangunan ekonomi daerah dalam konteks untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah pada dasarnya harus dilihat dari aspek peningkatan kualitasnya. Dengan kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat akan dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi sekaligus sebagai modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

c. Sumberdaya Buatan

Sumberdaya dalam era otonomi daerah saat ini terdapat kecenderungan umum dimana dalam pembiayaan pembangunannya, daerah berusaha meningkatkan pendapatan yang sebagian besar berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam yang berlebihan berpotensi

merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlanjutan pembangunan daerah pada masa yang akan datang, dalam konteks pendapatan daerah pada dasarnya terdapat satu jenis sumberdaya yang sebenarnya memiliki peranan yang juga sangat penting namun sering terabaikan dalam pengelolaannya yaitu sumberdaya buatan yang merupakan hasil dari pengembangan sumberdaya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, atau kemampuan daya dukung sumberdaya alam tersebut yang secara umum merupakan sarana dan prasarana daerah yang dapat menunjang pembangunan daerah, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya buatan secara efisien akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang terancam oleh eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, dengan terjaganya keseimbangan ekosistem maka pendapatan daerah sebagai sumber utama biaya pembangunan wilayah juga akan terpenuhi.

d. Sumberdaya Sosial

Sumberdaya sosial selain sumberdaya manusia yang umumnya mengacu pada manusia sebagai individu maka terdapat modal manusia lain yaitu : manusia sebagai masyarakat atau disebut juga sumberdaya manusia atau sumberdaya sosial atau sosial capital. Sumberdaya sosial ini adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam

kehidupan bermasyarakat (Kertasasmita, 1887) mengacu pada sumberdaya sosial ini, manusia kuga dipandang sebagai sosok yang dilingkupi oleh nilai-nilai norma, kepercayaan dan hubungan antar sesamanya .Pembangunan daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam, peningkatan sarana dan prasarana sumberdaya buatan, pengembangan pendidikan dan ketrampilan penduduk serta membaiknya kondisi anggaran, seringkali menjadi tak berarti karena hilangnya norma-norma dan kepercayaan sosial, hasil pembangunan kerap kali diimbangi oleh meningkatnya kecurigaan mauoun perbedaan pendapat yang mengarah pada sengketa bahkan di beberapa daerah berubah perang saudara.

Berdasarkan kajian terhadap negara-negara berkembang kajian yang gagal dalam pembangunannya menunjukkan bahwa kegagalan tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya perpecahan karena suku atau agama, kurangnya perhatian kepada manusia serta lembaga-lembaga sosial yang harus menjalankan pembangunan itu, sebaliknya negara berkembang yang berhasil dalam pembangunan ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di bidang sosial, tidak sia-sia dari segi ekonomi.

C. Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.

Kecepatan dan optimalisasi pembangunan wilayah daerah tentu akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi, keterbatasan dalam sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial yang berkualitas dapat menimbulkan kemunduran yang sangat berarti dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah.

Konsekuensi lain yang ditimbulkan sebagai akibat terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi yang dimiliki daerah adalah ketidakluasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan ekonomi wilayah, kondisi ini tampaknya tak terhindarkan terutama bila dikaitkan dengan pelaksana otonomi daerah dewasa ini, dalam teoritis Anwar dan Hadi (1996) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab munculnya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah : adanya perbedaan dalam karakteristik limpahan sumberdaya alam/*resources endowment* dan sumberdaya manusia/*human resources* disamping beberapa factor lain yang juga sangat krusial seperti perbedaan demografi, perbedaan potensi lokasi perbedaan aspek potensi pasar.

Dengan pola analisis sebagaimana diilustrasikan diatas dapat digaris bawahi bahwa pengelolaan ketersediaan dan kebijakan yang tepat relevan serta komprehensif amat dibutuhkan dalam kaitannya dengan

percepatan proses pembangunan ekonomi dimaksud, namun sangat disayangkan dinamika pelaksanaan pembangunan ekonomi dewasa ini, memiliki atau menampakkan suatu kecenderungan dimana daerah yang kaya akan sumberdaya ekonomi lebih cepat menikmati kemajuan pembangunan bila dibandingkan dengan wilayah lain yang miskin.

Kenyataan paradoksal tersebut tentunya ada penyebabnya, antara lain karena lemahnya pengelolaan manajemen sumberdaya alam serta penguasaan oleh segelintir orang yang rakus, seiring dengan semangat desentralisasi, sebagian besar kewenangan di daerah, termasuk kewenangan di daerah otoritas seperti kawasan kehutanan, kawasan pertambangan, kawasan pelabuhan dan lain-lain yang selama ini tidak tersentuh oleh kewenangan daerah kabupaten/kota seperti dalam pasal 129 UU No.22 tahun 1999, bagaimana menggunakan sumberdaya alam untuk kepentingan rakyat banyak akan sangat tergantung pada kemauan politik/*political will* dan tindakan politik/*political action* dari pemerintah daerah menurut Wasistiono, 2003.

Pembangunan daerah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya ekonomi yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu daerah, dalam konteks ini daerah harus memberhatikan sumberdaya ekonomi yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan suatu daerah dan harus

memperhatikan keterpaduan penggunaan sumberdaya ekonomi, melalui penyeimbangan dan penyerasian berbagai sumberdaya ekonomi baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya sosial agar terjadi kesinambungan pembangunan daerah.

D. Administrasi Pembangunan

Menurut Rino A.Nugraha, Administrasi Pembangunan memiliki 2 sisi antara lain :

1. Pembangunan Administrasi (Penyempurnaan Administrasi);
2. Administrasi Pembangunan (Administrasi Bagi Pembangunan).

Wujud Administrasi (Waldo) merupakan salah satu manajemen dinamis yang menunjukkan gerakan/proses dalam prganisasi statis mengikuti pola tertentu dalam pembangunan administrasi.

Fungsi-Fungsi Administrasi Pembangunan :

1. Perencanaan;
2. Pengerahan Sumber Daya;
3. Pengerahan Partisipasi Masyarakat;
4. Penganggaran;
5. Pelaksanaan Pembangunan;
6. Koordinasi;
7. Pemantauan dan evaluasi;
8. Pengawasan;
9. Peran Informasi;

1. Perencanaan

Merupakan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, merupakan tugas pokok dalam administrasi bagi pembangunan, adanya ketimpangan antara sumber daya dengan kebutuhan pembangunan perlu perencanaan agar tercapai efektivitas dan efisiensi.

Maraknya pembangunan berbasis pasar dengan munculnya pandangan *neo-liberalisme* di berbagai belahan dunia mengancam perencanaan, tetapi Friedman (1987) membantah hal tersebut dengan menunjukkan adanya perencanaan di Amerika Serikat, dimana unsur Pokok Perencanaan Penyusunan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan :

- a. Tujuan akhir yang dikehendaki;
- b. Sasaran dan orioritas untuk mewujudkannya;
- c. Jangka waktu untuk mencapai sasaran tersebut;
- d. Masalah - masalah yang dihadapi;
- e. Modal/Sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya;
- f. Kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaannya;
- g. Sumber Daya Manusia, organisasi dan badan pelaksanaannya;
- h. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya;
- i. Perencanaan bersifat kontinyu, untuk itu diperlukan informasi yang tepat dan akurat;

Kegagalan Perencanaan :

- a. Penyusunan perencanaan tidak tepat, informasi kurang lengkap atau tidak realistis;
- b. Pelaksanaan tidak sesuai perencanaan, aparatnya tidak siap/tidak kompeten seringkali pelaksanaan terpisah dari perencanaan;
- c. Perencanaan mengikuti paradig tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan di negara tertentu kesalahan dalam falsafah atau konsep dalam perencanaan tersebut;
- d. Perencanaan yang terlalu terpusat tidak adanya partisipasi.

Supaya tidak gagal maka perencanaan harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada perencanaan;
- b. Mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas;
- c. Perencanaan bersifat operasional,;
- d. Adanya system pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- e. Perlu adanya proses penyesuaian rencana sesuai dengan pelaksanaan.

2. Pengerahan Sumber Daya

Pengerahan sumber daya setelah perencanaan disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah pengerahan sumberdaya untuk pembangunan, sumberdaya tersebut bisa berupa :

- a. Dana;
- b. Sumberdaya Manusia;
- c. Sumberdaya Alam;
- d. Sumberdaya Teknologi.

- a. Dana

Dana pembangunan sebagaimana diutarakan sebelumnya perlu ada dana untuk pembangunan, dana tersebut dikumpulkan dalam bentuk tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, investasi, dalam negeri, dan luar negeri, untuk itu pemerintah harus merangsang investasi melalui berbagai instrument dan kemudahan.

- b. Sumberdaya Manusia

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa sumberdaya manusia sangat berperan dalam pembangunan ekonomi untuk itu perlu sumberdaya manusia yang berkualitas, jujur, berintegritas, dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang anti korupsi, karena korupsi membuat kondisi ekonomi menjadi tidak kondusif, sebagus apapun sistem tapi jika korupsi masih banyak dan belum di tindak tegas maka akan sulit mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan dapat mensejahterkan masyarakat dan rakyat negara tersebut.

c. Sumberdaya Alam

Seperti telah disebutkan sebelumnya pentingnya sumberdaya alam dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah maka perlu dikelola secara arif dan bijaksana agar sumberdaya alam tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, tapi jika hanya dieksploitasi untuk segelintir orang saja maka akan sangat sulit kemakmuran dan kesejahteraan dapat tercapai, seperti kebanyakan sekarang ini banyaknya investor yang masuk di negara kita guna mengeksploitasi alam kita, ternyata mereka yang mendapatkan keuntungan dan masyarakat yang menderita kerugian karena limbah pertambangan dan alam yang rusak akibat eksploitasi alam yang besar-besaran hal ini perlu dimunculkan Undang-undang yang mengatur masalah eksploitasi alam agar tidak merugikan masyarakat setempat.

d. Sumberdaya Teknologi

Seperti telah disebutkan diatas bahwa untuk pembangunan ekonomi suatu negara maka perlu adanya science teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah karena jika tiap daerah menggunakan teknologi tepat guna maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat lebih mudah tercapai, maka kemakmuran tiap daerah memicu pertumbuhan ekonomi negara sehingga dapat dikatakan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi suatu negara, jika pembangunan ekonomi wilayah atau daerah disertai dengan pembangunan manusia yang berkualitas takut pada Allah SWT, jujur, berintegritas tinggi, menguasai *science* dan teknologi, manusia-manusia inilah yang diharapkan semakin banyak bermunculan di negeri ini, agar pembangunan ekonomi kita benar-benar dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, semoga koruptor dapat ditumpas, korupsi dapat dibasmi, keadilan dan hukum dapat ditegakkan sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang berkualitas, dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufiz. 1994. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Anonimus. 2004. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Landnet)*. Jakarta: MA-RI.
- Anonimus. 2007. *Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury*. Republic of South Africa.
- Anonimus. 2007. *The Definitive Guide to Project Management*.
- Arifin Abdulrachman. 1979. *Kerangka Pokok-pokok Manajemen Umum*. Jakarta: Media Sarana.
- Ateng Syafrudin. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Bandung.
- Birdsall, Nancy, 1993. *Sosial Development is Economic Development. Policy Research Development*
- B.C. Smith. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: George Allen & Unwin.
- Bagir Manan. 2006. *Hubungan Ketatanegaraan MA dan MK dengan Komisi Yudisial (suatu pertanyaan)*. Artikel dalam Majalah Varia Peradilan, Edisi Maret 2006, MA-RI, Jakarta, 2006, hlm. 9-11.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. . 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Cetakan ke-12. Jakarta: Masagung.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.

- Burhanudin A. Tayibnapis. 1995. *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Carl V. Patton and David S. Sawicki. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- Christopher J. Webster. 1997. *Analytical Public Choice Planning Theory*. Submitted to TPR September 23rd 1997.
- Coralie Bryant and Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Dann Sugandha. 1991. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Coralie Bryant and Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Dr. Sahya Anggara, M.Si. Ii Sumantri, M.Ag. *Administrasi Pembangunan*, Pustaka Setia Bandung. 2016
- Kartasasmita,G, 1997. *Membangun Sumberdaya Sosial Profesional*. Makalah pada Kongres VII HIPPIIS, Medan 21 Maret 1997.
- Soeparmoko. 1997. *Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan (Suatu pendekatan Teoritis)*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Tarsito. Awaloedin Djamin. 1974. *Masalah Organisasi dalam Administrasi Pembangunan*. Prisma No. 4, Agustus 1974.
- Nokes, Sebastian. 2nd Ed.n. London (*Financial Times/Prentice Hall*).
- World Bank Hadi, Setia dan Anwar Effendi, 1996, *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma.No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV.1996
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita selekta manajemen pemerintah daerah*. Perbit Fokus Media. Bandung.

Yakin Addinul. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Penerbit Akademika Pressindo. Cetakan Pertama. Jakarta

PROFIL PENULIS



Indah Kusumawati, S.E., M.M., adalah Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Tangerang. Lahir di Banyuwangi, 2 Agustus 1974. Riwayat Pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Widya Gama Malang Jawa Timur, S2 jurusan Management di STIE Kusuma Negara , Jakarta timur. Sekarang Penulis dalam program pendidikan di S3 Manila Philipiness.

Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan

Hisarma Saragih

BAB 4



BAB 4

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. Masyarakat, Ciri dan Kebudayaan

1. Konsep Masyarakat

Berbicara tentang masyarakat berarti membicarakan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial berarti manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tanpa pertolongan atau bantuan makhluk sosial lainnya. Karena itulah dalam memandang kehidupan masyarakat melahirkan pula pendapat atau konsep tentang masyarakat itu sendiri. Menurut Wikipedia bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah kelompok masyarakat. Dalam kehidupan sosial bahwa masyarakat itu selalu berinteraksi satu sama lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga apabila diamati dapat dikategorikan sebagai berikut : (a) harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang,;

(b) ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol;; (c) ada dimensi waktu secara historis yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung;; (d) ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan.

Kuncaraningrat (2014) mendefinisikan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup mahluk-mahluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Sumarjan (2012) mengertikan bahwa masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan sosial yang hidup dalam suatu tempat dan saling berinteraksi antar satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan berupa adat, norma, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

2. Ciri Masyarakat

Masyarakat yang terdapat dalam permukaan bumi ini selalu memiliki ciri-ciri yang khusus. Sukanto (2003) berpendapat bahwa masyarakat mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu : hidup berkelompok, sebab sebagai mahluk sosial tidak mampu hidup sendiri, sehingga ketidak mampuan itu mendorongnya untuk hidup berkelompok. Ketika manusia itu membentuk

kelompok, mereka selalu berusaha mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia akan berupaya menyatukan pikiran dan pengalaman bersama agar terbentuk suatu rumusan yang dapat menjadi pedoman tingkah laku mereka yang disebut dengan kebudayaan. Selanjutnya budaya itu dipelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Misalnya dalam suatu masyarakat terdapat budaya gotongroyong, yaitu adanya saling membantu diantara kelompok masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan, dan sebaliknya ada kewajiban dari kelompoknya juga untuk memberikan tenaganya atau materi untuk meringankan beban orang yang menderita.

Adanya budaya gotong-royong dalam kelompok masyarakat menunjukkan potensi mereka secara bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan. Dalam gotong royong, maka semua anggotanya berpartisipasi. Partisipasi masyarakat adalah keikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi.

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk melihat pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan dapat diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian partisipasi. Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya

memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Selain itu partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, perencanaan dan pengawasan. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Isbandi (2007) bahwa partisipasi dapat dibagi atas enam konsepsi, yaitu : (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, ; (2) Partisipasi adalah "Pemekaan" pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.; (3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri,; (4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu,; (5). Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial,; (6). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Partisipasi masyarakat merupakan solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu kumpulan yang membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga alur kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

Ada beberapa macam partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dihargai, dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Partisipasi masyarakat manakala dilihat dari sudut tingkatannya dapat dibedakan dalam tiga hal yaitu: (1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain; (3) Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas.

Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi

berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian bahwa partisipasi meliputi : Partisipasi dalam proses perencanaan / pembuatan keputusan.; Partisipasi dalam pelaksanaan; Partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan Partisipasi dalam evaluasi.

4. Konsepsi Pembangunan

Pembangunan secara konsepsional dapat dipandang sebagai upaya yang terus menerus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian dalam kajian akademis banyak diantara para ahli pembangunan mengemukakan pendapatnya yang dipandang dari berbagai sudut pandang kehidupan.

Konsepsi pembangunan sesungguhnya dipandang secara dinamis, dan bukan sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan berupa pertumbuhan dan perubahan dalam struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Joesoef (2018) berpendapat bahwa pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dimulai dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi *an sich* merujuk suatu proses selama suatu masyarakat mampu memproduksi barang dan jasa berjumlah kian besar. Selanjutnya dijelaskannya pula bahwa pernyataan kuantitatif ini adalah sebuah fiksi murni statistik yang tidak memberi tahu kita tentang pembagian kekayaan yang dihasilkan masyarakat, jadi hal ini jelas mengenai arti, atau cara, jalan, alat, dan bukan cita-cita pembangunan.

Sementara itu dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan

dorongan serta adanya energi. Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya.

Todaro (2006), mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu: (1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, ; (2) Meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan; (3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai "kehidupan yang serba lebih baik" semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut: (a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan, ; (b) Peningkatan standar hidup yang tidak

hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tetapi juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan, ; (c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan dukungan terhadap program pembangunan dalam bernegara. Demikian juga pihak swasta yang merupakan bagian dari masyarakat memiliki andil yang sangat besar dan potensial dalam pembangunan daerah. Secara teoritis bahwa semakin meningkat partisipasi masyarakat dan swasta, dalam pembangunan daerah maka semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah. Inti dari

pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, seta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup dengan hanya upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu : (1) akses terhadap sumber daya, (2) teknologi, (3) pasar dan (4) sumber pembiayaan. Keempat akses tersebut disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya juga diperlukan peran aktif dari kelompok- kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.

Partisipasi masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Konsep partisipasi masyarakat tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Upaya pemberdayaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan dengan tiga hal yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi

dan kesadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan, ; (2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan pada masyarakat,; (3) Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan.

Bentuk pemberdayaan dengan hanya memberikan bantuan langsung uang tunai (BLT) atau bantuan proyek kepada masyarakat diperkirakan tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di dalam pembangunan. Dalam beberapa kasus bahwa di dalam konsep pembangunan masyarakat,

memang diperlukan BLT, akan tetapi yang lebih penting adalah pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri.

Ciri khas dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki individu maupun kelompok dari masyarakat itu sendiri. Menarik untuk diamati fenomena partisipasi masyarakat di kabupaten Simalungun pada tahun 2021. Setelah bupati terpilih Radiapoh Hasiholan Sinaga, SE dan wakilnya Joni Waldi dilantik pada tahun 2021, maka gebrakan yang mereka lakukan dalam upaya pembangunan kabupaten Simalungun adalah dengan menggali partisipasi masyarakat itu sendiri. Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat di kabupaten Simalungun adalah minimnya sarana infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa dalam satu kecamatan, dan antar kecamatan dalam kabupaten. Selain itu juga masalah infrastruktur jalan di kabupaten Simalungun yang sesungguhnya adalah jalan Propinsi Sumatera Utara, yaitu jalan yang menghubungkan Pematang Siantar - Pematang Raya - Seribu Dolok kecamatan Silimakuta yang tidak terurus dan sarana jalan tersebut sangat memprihatinkan bagi pengguna jalan yang nota bene adalah warga kabupaten Simalungun itu sendiri. Dalam upaya untuk menanggulangi jalan tersebut pemerintah kabupaten Simalungun dapat menggerakkan partisipasi masyarakat di kabupaten

Simalungun dan juga dari luar kabupaten Simalungun untuk memberikan sumbangan berupa uang, bahan material untuk melakukan perbaikan sarana infrastruktur tersebut. Metode yang dilakukan adalah pendekatan budaya Simalungun yang merupakan kearifan lokal yaitu "*marharoan bolon*".

Secara singkat bahwa *marharoan bolon* diartikan adalah gotongroyong. Gotongroyong bagi masyarakat Simalungun telah ada sejak zaman pra kolonial, dengan pola kerjasama memikul yang berat untuk kepentingan orang banyak. Sebab dahulu kala bahwa di setiap desa di Simalungun budaya gotong royong "*marharoan bolon*" sangat kental. Pada masa ini memang tenaga kerja masih sangat terbatas, sehingga dalam upaya pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga sangat sulit, sehingga mengatasinya dilakukan gotongroyong.

Dalam pelaksanaannya sampai bulan Juni 2021 dalam tempo beberapa bulan telah terkumpul sejumlah uang, dan sejumlah material yang berasal dari masyarakat Simalungun yang beraca di kabupaten Simalungun, kota Pematang Siantar yang peruntukannya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten Simalungun.

Bukan itu saja, bahkan tenaga sukarela secara langsung warga masyarakat yang berasal dari para pendeta dan penganjur Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) ikut langsung terjun memperbaiki

jalan raya Pematang Siantar- Pematang Raya. Mereka membuat posko gotong royong di depan GKPS Panei Tengah, dimana jalan infrastruktur yang terparah kerusakannya. Belajar dari kondisi ini dapat diambil pelajaran bahwa membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dicari dari kearifan local daerah untuk dijadikan sebagai ideologi pembangunan.

Aspek penting dalam suatu program partisipasi masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat itu sendiri, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Belajar dari apa yang terjadi di kabupaten Simalungun dengan partisipasi masyarakat model "*marharoan bolon*" dapat menginspirasi daerah lain untuk ditiru.

Dalam mengawali perencanaan pembangunan adalah sangat diperlukan adanya suatu kontribusi berupa pemikiran ide-ide, pendapat kritik maupun saran secara sukarela dari masyarakat untuk suatu pembangunan, sehingga disetiap pengambilan keputusan adanya suatu sosialisasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya juga masyarakat harus melibatkan diri dalam pembangunan khusus dalam hal ini pembangunan infrastruktur jalan baik dalam bentuk finansial maupun tenaga, karena peran dari masyarakat sangat penting dalam setiap pembangunan sehingga dengan adanya peran dari masyarakat akan menjawab tujuan dari pada pembangunan. ketika perencanaan serta pelaksanaan sedang berjalan tentunya pengawasan atau kontrol berupa saran dan kritik dari masyarakatpun sangat penting guna mengawasi jalannya suatu program kegiatan pembangunan infrastruktur jalan agar supaya menghasilkan pembangunan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press.
- Joesosef, Daud, (2018), *Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya, Buah-Buah Refleksi Daoed Joesoef untuk membumikan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koencaraningrat, (2002), *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rohmad, Zaini, (2016), *Sosiologi Pembangunan*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Sukanto, Surjono, (2003), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press.
- Sumarjan, Selo dan Suleman Sumardi, (2012), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta : LPFE UI.
- Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith, (2006), *Pembangunan Ekonomi Edisi kesembilan*, Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Wikipedia,...<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

PROFIL PENULIS



Dr. Hisarma Saragih, M. Hum., dosen Prodi Pendidikan Sejarah, dan Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun Pematang Siantar. Lahir di Merek Situnggaling 9 Januari 1964. Tamat dari SD Negeri 2 Pamatang Raya (1975), ; SMP Negeri 1 Pamatang Raya (1979); SMA Negeri Seribudolok (1982). Memperoleh Sarjana (Drs) Jurusan Sejarah FS USU Medan (1988). Magister Humaniora (M.Hum) Jurusan Sejarah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000). Doktor Studi Pembangunan dari FISIPOL USU Medan dengan predikat *Cumlaude* thn 2018. Dosen pada Universitas Simalungun (USI), dan tugas tambahan yang pernah dipangkunya: Pembantu Dekan III FKIP USI (1996-1998); Sekretaris LPPM USI 2001-2002; Dekan FKIP USI 2002-2005; Pembantu Rektor II USI 2005-2009; Pembantu Rektor I USI 2009-2012; Rektor Universitas Simalungun 2012-2014; Direktur Badan Penjaminan Mutu USI 2015-2019. Aktif sebagai nara sumber tingkat lokal, regional dan nasional. Beberapa Karya yang diterbitkan : Buku *Zending di Tanah Batak, Studi tentang Konversi dikalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942* Ombak: Yogyakarta, 2019.; Buku: *Patunggunng Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun*,(Ed.) ISBN: 978-623-6761-75-5. Penerbit Yayasan

Kita Menulis: Medan 2020.; *Filsafat Pendidikan* ISBN: 978-623-342-011-2 Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2021. Jurnal: *Aktualisasi Kearifan Lokal Raja Sang Nauluh Damanik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan* Vol. VI, No. 1, Tahun 2019. ; *Dinamika Identitas Etnis Simalungun Dan Pembangunan di Kota Pematang Siantar*, dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. V, No. 2, Tahun 2018. ; *Sejarah Simalungun* (buku..ditulis dkk, terbit 2012 USU Press.) ; *Habonaron do Bona : Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21*, Chapter. terbit 2017 Simetri Institute Medan. *Actualization of Local Wisdom in Simalungun Ethnic Daily Life : Advances in Sosial Science, Education and Humanities Research*, volume 136, Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>). *The struggle of Batak Simalungun for their identity in Church organization in Simalungun*, Medan, Indonesia, Journal of Human Behavior in the Sosial Environment, <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1590888>.; *Socio-cultural change influences the changes of Simalungun religion*, (2020) Asian Ethnicity, DOI:10.1080/14631369.2020.1792269.<https://doi.org/10.1080/14631369.2020.1792269>)

Penganggaran Pembangunan

Dhea Zaira

BAB 5



BAB 5

ANGGARAN PEMBANGUNAN

A. Pengertian Anggaran

Berikut ini adalah pengertian anggaran menurut para ahli, diantaranya seperti:

1. Freeman dalam Jalaluddin and Dafi, 2009 bahwa anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kepada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*).
2. Mulyadi dalam (de Carvalho Soares and Wiagustini, 2018) pengertian anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam suatu moneter standard dan satuan ukuran lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.
3. Eduard et all diterjemahkan oleh Sustray Ambarriani dalam (de Carvalho Soares and Wiagustini, 2018) mengemukakan "Anggaran adalah rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi, anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode anggaran. Anggaran meliputi aspek keuangan maupun non keuangan dari operasi yang

direncanakan. Anggaran pada suatu periode anggaran dan merupakan proyeksi dari hasil operasi”.

4. Munandar dalam (de Carvalho Soares and Wiagustini, 2018) menyatakan pengertian anggaran yaitu: suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.
5. Simamora dalam (de Carvalho Soares and Wiagustini, 2018) pengertian anggaran adalah mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tujuan organisasi selama periode dianggarkan.
6. Mardiasmo dalam (Sumenge, 2013) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Mardiasmo juga menyatakan bahwa anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
7. Rudianto dalam (Waworuntu, 2013) Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah rencana yang dilakukan dalam satu periode oleh organisasi secara sistematis baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki agar tujuan organisasi dapat tercapai.

B. Fungsi Anggaran dalam Perusahaan atau Organisasi

Adi dan Mardiasmo dalam (Triana, Yuliusman and Putra, 2012) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Penilaian kinerja seseorang ditentukan berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran dimana bawahan dirangsang dengan adanya suatu reward jika perencanaan anggaran tercapai, dan sanksi apabila perencanaan anggaran tidak tercapai. Adanya penekanan anggaran (budget emphasis) seperti itu akan mendorong bawahan untuk menciptakan slack dengan tujuan meningkatkan prospek kompensasi dan menghindari sanksi. Budget emphasis merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik.

Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidangbidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja supaya anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran (Suwadi dalam (Meirina, 2018).

C. Jenis-Jenis Anggaran

Pada dasarnya anggaran pada organisasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran (Pangalila, Elim and Walandouw, 2017), yaitu :

1. Anggaran operasional

a. Anggaran pendapatan

Anggaran pendapatan adalah rencana yang dibuat organisasi untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen, atau kelompok wiraniaga.

b. Anggaran biaya

Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan organisasi untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan.

c. Anggaran laba

Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh organisasi di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya.

2. Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan mencakup jenis anggaran, yaitu :

a. Anggaran Investasi

Rencana organisasi untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk organisasi di masa mendatang dalam jangka panjang.

b. Anggaran Kas

Rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas organisasi di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.

c. Proyeksi Neraca

Kondisi keuangan yang diinginkan organisasi di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Proyeksi neraca mencakup jumlah harta ingin dimiliki organisasi kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan organisasi di masa akan datang.

D. Manfaat Anggaran

Anggaran mempunyai banyak manfaat bagi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, berikut manfaat dari sebuah anggaran (Waworuntu, 2013).

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.

3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggungjawab pada pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

E. Karakteristik Anggaran

Anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Robert & Vijay dalam (Basri, 2013) anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
4. Merupakan komitmen manajemen; menejer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuantujuan anggaran.
5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu.
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.

F. Tujuan Anggaran

Menurut Robert & Vijay dalam (Basri, 2013) penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan utama yaitu sebagai berikut :

1. Menyesuaikan rencana strategis.
2. Membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
3. Menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka.
4. Memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

G. Langkah-Langkah Melakukan Penganggaran

Proses penyusunan anggaran yang berhasil dapat menjadikan setiap manajer dalam organisasi perusahaan memiliki persepsi yang jelas mengenai peran mereka masing-masing dalam mencapai sasaran anggaran.

Dalam melakukan manajemen anggaran, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan agar proyeksi anggaran bisa mendekati benar. Renyowijoyo dalam Pangalila dkk (2017) menyatakan bahwa tahap penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Penetapan sasaran oleh manajer atas.
2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah.

3. Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah
4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah.

Ada 4 (empat) pendekatan penyusunan anggaran menurut Nordiawan dan Hertianti dalam (Pangalila, Elim and Walandouw, 2017) yaitu :

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa setiap jenis biaya akan dinaikan jumlahnya pada tingkat kenaikan yang relative sama tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya, cara membuat anggaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah mengidentifikasi seluruh jenis belanja yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Jadi, ciri-ciri pendekatan tradisional adalah disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan organisasi sehingga bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja suatu organisasi, dan umumnya bersifat incremental yaitu penentuan setiap jenis dan jumlah biaya yang ada pada anggaran dari suatu periode anggaran tertentu didasarkan pada presentase kenaikan tertentu dari tiap jenis dan jumlah biaya yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

2. Pendekatan Kinerja

Pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam pendekatan anggaran tradisional, khususnya kelemahan

yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dengan demikian pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerja di banding sekedar penghematan biaya semata. Karakteristik utama dari pendekatan ini adalah mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas, setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan, dan pada tingkat yang lebih maju pendekatan ini didikan dengan diterapkannya unit costing untuk setiap aktivitas.

3. Pendekatan Sistem Perencanaan

Program, dan Anggaran Terpadu (*Planing, Programming, and Budgeting System-PPBS*) PBBS merupakan upaya sistematis yang memperlihatkan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Karakteristik PBBS adalah pendekatan ini dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas dari visi, misi, dan tujuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan. PBBS merupakan satu kesatuan dengan tahap perencanaan, indikator kinerja disusun dan dikembangkan secara integrasi dengan sasaran strategis yang ada di dokumen perencanaan, dan pendekatan ini memperhitungkan kebutuhan biaya dalam jangka menengah sebagai upaya konsistensi dengan sasaran strategis.

4. Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (*Zero Based Budgeting-ZBB*)

Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program yang telah diadakan ditahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikan kepada tujuan organisasi.

H. Manajemen Anggaran Pembangunan

(Fatonah and Wulansari, 2017) Rencana anggaran biaya proyek adalah perhitungan total biaya untuk kebutuhan upah dan bahan, serta biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Rencana anggaran biaya secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\text{RAB} = \Sigma(\text{Volume}) \times \text{Harga Satuan Pekerjaan.}$$

Harga Satuan Pekerjaan Adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga satuan bahan dan upah yang digunakan adalah harga satuan dilokasi pekerjaan untuk waktu tertentu. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\text{HSP} = \text{H.S. Bahan} + \text{H.S. Upah}$$

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Analisis harga satuan pekerjaan berfungsi dalam perhitungan rencana anggaran biaya proyek yang didalamnya terdapat angka

koefisien yang menunjukkan jumlah kebutuhan material atau bahan dan upah tenaga kerja masing-masing pekerjaan.

Analisis harga satuan yang terdapat dalam metode SNI antara lain:

1. Analisis Harga Satuan Bahan Adalah koefisien dalam analisis SNI yang menyatakan kebutuhan material serta besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek. Analisis harga satuan bahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\Sigma \text{Bahan} = \text{Harga Satuan Bahan} \times \text{Koefisien Analisis Bahan}$$

2. Analisis Harga Satuan Upah Adalah koefisien dalam analisis SNI yang menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Analisis harga satuan upah dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\Sigma \text{Upah} = \text{Harga Satuan Upah} \times \text{Koefisien Analisis Upah}$$

3. Volume Pekerjaan. Perhitungan volume setiap pekerjaan sangat diperlukan dalam perencanaan anggaran biaya untuk memperkirakan dan menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun suatu bangunan atau proyek secara keseluruhan mulai dari tahap persiapan hingga terselesaikannya proyek tersebut.

Sebelum membuat anggaran, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu:

1. Untuk mendukung pembuatan RAB, gunakan aplikasi MS. Excel.
2. Identifikasi item pekerjaan dan satuan pekerjaan.
3. Hitung volume pekerjaan item pekerjaansesuai dengan desain gambar bangunan.

Berikut ini adalah contoh rencana anggaran pembangunan proyek pembangunan gedung atau rumah.

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

NO	ITEM MATERIAL	VOLUME	SATUAN HARGA
1	Batu Bata	Buah	Rp 700,00
2	Batu Kali/Batu Belah	M ³	Rp 351,000.00
	Batu Marmo	M ²	Rp 209,000.00
3	Batu Pecah	M ³	Rp 373,300.00
4	Baja Ringan	M ²	Rp 340,000.00
4	Besi Beton Polos	Kg	Rp 18,000.00
5	Bubungan Seng	M ²	Rp 35,000.00
6	Cat Dasar	Kg	Rp 53,000.00
7	Cat Minyak (Warna)	Kg	Rp 32,400.00
8	Cat Tembok (Warna)	Kg	Rp 21,400.00
9	Dempul	Kg	Rp 14,600.00
10	Floor Drain	Buah	Rp 68,000.00
	Kaca 5 mm	M ²	Rp 110,000.00
11	Kawat Beton	Kg	Rp 13,000.00
12	Kayu Klas II (Kamper/Kruing/dil)	M ³	Rp 3,700,000.00
13	Kayu Rangka Plafond	M ³	Rp 3,750,000.00
14	Kayu Rangka/Bouwplank	M ³	Rp 3,500,000.00
15	Keramik Sisi Kulit Jeruk 20 x 20 cm	M ²	Rp 47,500.00
16	Keramik Ukuran 30 x 30 cm	M ²	Rp 32,100.00
17	Keramik Ukuran 40 x 40 cm	M ²	Rp 60,000.00
18	Keramik Ukuran 20 x 25 cm	M ²	Rp 47,500.00
19	Kertas Amplas	Lembar	Rp 1,800.00
20	Kloset Duduk Keramik (Setara KIA)	Buah	Rp 1,283,600.00
21	Kosen Kayu Klas I (Seumantok/Ulin/dil)	M ³	Rp 3,996,000.00
22	Kran Leiding	Buah	Rp 20,000.00
NO	ITEM MATERIAL	VOLUME	SATUAN HARGA
45	Schakelar Tunggal	Buan	Rp 18,500.00
46	Schakelar Ganda	Buah	Rp 20,000.00
47	Seng Genteng Metal	M ²	Rp 60,000.00
48	Semen	Zak	Rp 51,000.00
49	Semen Putih	Zak	Rp 130,000.00
50	Septictank dan Resapan 2 M ³	Buah	Rp 6,000,000.00
51	Stop Kontak	Titik	Rp 114,700.00
52	Stut Werk	M ³	Rp 1,937,200.00
53	Tanah Tambun	M ³	Rp 73,200.00
54	Titik Lampu + Instalasi	Titik	Rp 102,600.00
NO	ITEM PEKERJA	VOLUME	SATUAN HARGA
1	Pelajar	Orang/hari	Rp 80,000.00
2	Kepala Tukang	Orang/hari	Rp 150,000.00
3	Mandor	Orang/hari	Rp 85,000.00
4	Tukang	Orang/hari	Rp 100,000.00

INDONESIA, 2017
PT. KITASIPIL

KITASIPIL
DIREKTUR

Sumber: <https://www.kitasipil.com/2017/07/cara-membuat-perhitungan-rencana.html>

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, R. (2013) 'Penyusunan laporan realisasi anggaran', *Jurnal EMBA*, 1(13 ISSN 2303-1174), pp. 202-212.
- de Carvalho Soares, M. and Wiagustini, L. P. (2018) 'Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Pada Direção Nacional De Aproveitamento, Logística E Materiais Di Ministério Do Comércio, Indústria E Ambiente Timor Leste', *Buletin Studi Ekonomi*, 23, pp. 200-219.
- Fatonah, K. and Wulansari, D. N. (2017) 'Estimasi Anggaran Biaya Struktur Proyek Pembangunan Hotel Quad Makassar Menggunakan Metode SNI', *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 2(2), pp. 116-129.
- Jalaluddin and Dafi, B. (2009) '(Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh) Jalaluddin Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Dafi Bahri Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI 2 . TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HI', *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 2(1), pp. 44-53.
- Meirina, E. (2018) 'Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris Dan Budget Emphasis Terhadap Slack Anggaran', *Jurnal Pundi*, 2(3), pp. 261-272. doi: 10.31575/jp.v2i3.106.
- Pangalila, C., Elim, I. and Walandouw, S. K. (2017) 'Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Keuangan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa', *Going*

- Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), pp. 661–670. doi: 10.32400/gc.12.2.18006.2017.
- Sumenge, A. S. (2013) 'Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Triana, M., Yuliusman and Putra, W. E. (2012) 'Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis, Dan Locus Of Control Terhadap Slack Anggaran (Survei Pada Hotel Berbintang di Kota Jambi)', *e-Jurnal BINAR AKUNTANSI*, 1(1), pp. 51–55.
- Waworuntu, T. (2013) 'Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Blu Rsup Prof.Dr. R.D. Kandou Manado', *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), pp. 904–913. doi: 10.35794/emba.v1i3.1899.
- <https://www.kitasipil.com/2017/07/cara-membuat-perhitungan-rencana.html>

PROFIL PENULIS



Dhea Zatira, Lahir di Tangerang, Banten, pada tanggal 17 Februari 1991. Adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Tonny Suryadinata dan Ibu Rosnawati. Meraih gelar S1 pada sebuah Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2013. Melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar S2 pada Universitas Pamulang, tahun 2015. Tahun 2013 hingga 2016 bekerja di salah satu bank Swasta hingga akhirnya tahun 2016 fokus menjadi Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mmuhammadiyah Tangerang hingga saat ini. Sejak tahun 2017 hingga saat ini aktif melakukan penelitian di bidang manajemen keuangan.

Implementasi Pembangunan

Tuti Lisnawati

BAB 6



BAB 6

IMPLENTASI PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Pembangunan nampaknya telah menjadi kata bersayap yang tidak asing di dengar dimana saja dan kapan saja, Negara-negara yang telah mengalami kemerdekaan setelah perang dunia II (termasuk Indonesia) mengalami tuntutan dari rakyatnya agar tingkat hidup Negara dan bangsanya menjadi lebih baik.

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya sadar, siuman, dan bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk, dan dalam kata kerja “bangun” itu berarti membuat, mendirikan, atau membina. Sehingga bisa di katakan pembangunan meliputi bentuk kehidupan dan prilaku. lebih dari itu pembangunan kata pembangunan telah menjadi bahasa dunia. keinginan bangsa-bangsa mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, Melahirkan berbagai konsep antara lain : pertumbuhan , rekontruksi, modernisasi dan lain-lain. (Prof. Agus Suryono, SU:2010).

B. Pengertian Implemetasi

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk

mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam Oxford advance learner dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak Susilo (dalam Iriil Fahmi 2013:9).

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

Menurut Inu Kencana Syafii (2008:56) implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Sebelum mengimpletasikan suatu kegiatan biasanya di susun dulu rencana dari apa yang akan di capai supaya jelas arahnya dari apa yang di harapkan, begitu pula dalam implelentasi pembangunan harus ada rencana pembangunanya terlebih dahulu agar tujuan dan target yang di inginkan dari daerah tersebut tercapai dengan maksimal.

Menurut Duun (200:109) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implentasi daru suatu kebijana atau rangkaian pilihan yang kurang atau lebih hubungan (keputusan untuk bertindak) yang di buat oleh beberapa pejabat pemerintah yang di formukasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahtraan sosial, ekonomi administrasi dan lain - lain. Lebih lanjut di jelaskan Solichin Abdul Wahab (2001:108), bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi ditinjau dari:

1. Keluaran kebijakan (keputusan)

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

2. Kepatuhan kelompok sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparap pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Dampak nyata kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan prilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta

peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebabakibat) yang tinggi.

4. Persepsi terhadap dampak.

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok- kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

C. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah kata kunci terpenting dalam pemerintahan suatu Negara, bahkan dapat di katakan istilah tersebut telah menyatu dengan keberadaan suatu Negara. Pada umumnya pembangunan dapat di artikan sebagai upaya-upaya memajukan kehidupan Negara dan warganya melalui penciptaan sarana dan prasarana baru atau megembangkan yang sudah ada untuk mencapai tujuan baru. (Prof Oekon Abdulloh, Ph.D:2016)

Tujuan umum dari program pembangunan adalah meningkatkan kualits kehidupan sosial komunitas lokal atau kelompok sasaran. Oekan Abdoellah dan Dede Mulyanto “isu-isu pembangunan : 2019), mengatakan bahwa :

Amartyan Sen, pemenang Nobel Ekonomi asala India itu, telah dua kali masuk ranah pemikiran arus utama mengenai pembangunan. Diskrusus dan praktik

ekonomi pembangunan tradisional berpusat pada pendapatan sebagai ukuran utama kesejahteraan. Dengan asumsi bahwa pendapatan Negara kesabagai kunci keberhasilan pembangunan, negar-negara berkembang berlomba-lomba meningkatkan pendapatan nasional, karena itulah tujuan pembangunan sebagaimana di rumuskan agen-agen pembangunan global seperti INF dan Bank dunia.

Pada akhir dasawarsa 1980 an pusat pelatihan mulai bergeser. Fakta menunjukan kemiskinan bukanlah soal kurangnya pendapatan, tetapi mencakup juga masalah rentang luas penurunan kesehatan, pendidikan dan standar hidup tidak serta merta tertangkap oleh konsep pendapatan semat. Dengan kata lain persoalannya adalah sifat dan kualitas keberlanjutan pendapatan itu bagi orang. Dengan fakta lain, Sen kemudian mengajukan pendekatan yang memasukan "kapabilitas" untuk mengganti "pendapatan" sebagai ukuran pendapatan (Sen :1999) dengan memasukan konsep baru tersebut Sen memperlua pengertian pembangunan, dari sekedar urusan sempit agen-agen pemerintah yang menangani beberapa persoalan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan warga-warganya secara kuantitatif, menjadi persoalan yang lebih luas mencakup faktor kualitatif urusan kemanusiaan yang selama ini di suarakan kubu heterogosi dalam ilmu dan kebijakan ekonomi.

Pada tahun 2000an tak lama dari penerbitan pemikirannya tentang kapabilitas sebagai ukuran

pembangunan, Sem kembali menggeser pemikirannya akan pengertian pembangunan kearah yang lebih jauh dengan memasukan faktor “kebebasan” di dalamnya. (Sen :2000). Kebebasan bukan hanya di jadikan sarana, tetapi dijadikan tujuan dalam pembangunan. Pandangan-pandangan Sem sekarang secara luas di terima oleh agen-agen pembanguan internasioanl bahwa pembangunan mestilah di nilai oleh dampaknya terhadap orang-orang sebagai manusia. Tak hanya oleh perubahan dalam pendapatan mereka sebagai angka-angka dalam neraca pemasukan-pemasukan rata-rata nasional. Sebelum melangkah ke berbagai gagasan dan pendekatan dari apa yang sekarang di kenal sebagai “ pembangunan berkelanjutan” ada baiknya kita periksa terlebih dahulu apa itu pembangunan secara lebih komperhensif.

1. Pembangunan sebagai Politik

Proses pembangunan ini sangat keras bisa dia artikan politik itu kejam, siapa yang jadi penguasa itulah yang mengatur dan melaksanakan kebijakan yang di inginkanya. Meti konsep partisipasi sudah menjadi bagian dari pembangunan saat ini, tetapi faktanya tetap saja pembanguna adalah proses yang di tentukan oleh pengmabil kebijakan dalam kontek Negara. Artinya pembangunan adalah proses ekonomi politik karena menjadi tempat diskusi dan praktiknya memunculkan persoalan siapa yang punya kuasa untuk melakun apa terhadap siapa dalam konteks apa.

2. Pembangunan dalam Lingkungan

Pembangunan ini juga mencakup hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, koversi ini mengambil tempat sepanjang sejarah masyarakat di bumi, meskipun proses ini secara umum meningkat dengan kecepatan dan kerumitan yang makin besar seiring waktu berjalan.

3. Pembangunan ekonomi dan ketimpangan sosial

Dalam sudut pandang pembangunan berarti peningkatan dalam ukuran rentang cakupan kebutuhan ekonomi, dalam arti lebih banyak produk yang dapat di produksi baik secara actual maupun potensial. Pada umumnya suatu apabila suatu ekonomi menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, Negara akan meningkatkan standar hidup warganya. (Oekan Abdoellah dan Dede mulyanto :2019)

D. Persyaratan Dasar, Nilai dan Tujuan Inti Pembangunan

1. Syarat Dasar Pembangunan Ekonomi

Menurut lewis Jhingen (2013), Pendorong utama pertumbuhan ekonomi adalah upaya berhemat (ekonomis), peningkatan pengetahuan, dan penerapannya di bidang produksi dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain perkepala. Tiga pendorong ini mesti konsepnya dapat di bedakan namun biasanya tampak berbarengan, akan tetapi perkembangan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik, dan latar sejarah maka kondidi ekonomi aja tidak cukup.

Kondisi politik, psikologi, sosial budaya, merupakan syarat yang sama pentingnya dalam kondisi ekonomi. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan sebagainya yang merupakan faktor ekonomi. tetapi pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi selama lembaga sosial, kondisis politik, dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

2. Nilai dan Tujuan Pembangunan Ekonomi

Goulet dalam todaro dan smith (2006) mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan konseptual dalam pemahaman pembangunan yang paling hakiki. Yaitu (1) kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua (2) Harga diri yaitu adanya dorongan diri sendiri untuk maju. Ketiga (3) yaitu kebebasan yaitu kemampuan berdiri tegak sehingga tidak bisa di perbudak oleh pengerjaan aspek-aspek material dalam kehidupan.

6. Peran Negara Dalam pembangunan

Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan masa depan. Mengandung beberapa implikasi teoritis antara lain *petama* kemampuan, tanpa kemampuan seseorang atau bangsa tidak dapat mempengaruhi masa depannya. Kemampun ini meliputi kemampuan fisik, mental dan seperitual,

kedua kebersamaan atau keadilan sosial dalam hal ini pembangunan berarti juga pemerataan sebagai penyeimbang dari suatu pertumbuhan agar tidak sia-sia. *Ketiga* kekuasaan kelemahan atau ketidak berdayaan merupakan kondisi manusiawi yang menentukan. *Keempat* ketahanan atau kemandirian. Implementasi ini mengandung arti yang luas karena faktor-faktor pembangunan terbatas adanya, sementara tuntutan kebutuhan semakin meningkat, maka sumber-sumber yang ada haruslah di kelola sedemikian rupa sehingga pada suatu masyarakat bersangkutan mampu berkembang secara mandiri dan sanggup meraih sukses berikutnya (Prof.DR. agus Suryono, SH : 2010)

7. Tolak Ukur Pembangunan

Sebelum tahun 1949 an para pakar ekonomi sangatlah pada mekanisme pasar terutama pada aliran neoklasik, dimana mereka menganggap dapat mengalokasikan sumberdaya dan mengklasifikasikannya dengan baik, dan kita ketahui bahwa pandangan ini sangat kapitalis. Sehingga pada waktu Jerman kalah dan di perlukan rekonedasi untuk memperbaiki perekonomian Jerman lalu lahirlah konsep yang di kenal dengan *marsyal plan* terlihat bahwa apabila dalam suatu Negara di suntikan bantuan dana melebihi 5% maka neraga tersebut dapat tumbuh sendiri, sehingga timbul paradigma yang penting Investasi. Inilah dasar-dasar untu mengembangkan suatu Negara yang baru tumbuh seperti halnya Indonesia hasil kaji ulang tersebut

menghasilkan beberapa kriteria untuk pertumbuhan yang pada awalnya hanya *gross nasinal prodac* walaupun pada akhirnya kriteria baru tersebut masih banyak kekurangan. hasil kaji ualng tersebut menghasilkan beberapa kriteria yang dapat di terima secara umum. (Prof. Dr.Ir Ali Abdul Mahi, M.S. :2017)

E. Implementasi Pembangunan

Implentasi pembnaguna merupakan upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik, di antaranya peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendidikan dan pembangunan. Secara umum tujuan pembangunan adalah menciptakan negara yang maju, mandiri sejahtera lahir batin. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakt tidak dapat di hindari dengan pendekatan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat mengindahkan kemampuan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. (Prof. Ali kabul mahisi, Dr, Sri indra Trigunarno, S.K.M, M.kes : 2017)

Untuk mengimplentasikan pembangunan tentunya tidak terlepas dari matangnya suatu perencanaan dari pembangunan tersebut, oleh karena itu perencanaan merupakan tolak ukur dari keberhasilan suau pembangunan. Sebelum mengilpelentasikan kita bahan dulu bagai mana perencanaan yang di buat apakah sudah

yakin dan matang untuk di jalankan, hal ini memerlukan beberapa kali ulang sebelum benar-benar di laksanakan proyek tersebut, dalam suatu perencanaan ada konsep dasar yang harus di lakukan,

Dalam teori perencanaan ada 3 hal utama yang perlu di pahami yaitu (a). Definisi perencanaan. (b). Subtrantif perencanaan, (c) motif perencanaan. Kalau ke tiga hal tersebut sudah mateng maka marulah perencanaan itu bisa di jalankan. Proses penyusunan perencanaan dapat di dekati dengan analilis, yang komponen-komponennya sebagai berikut :

Diagnosis masalah yaitu tergantung pada gambaran keadaan yang di inginkan yang berfungsi sebagai sasaran yang akan di tuju. Pendefinisian masalah di tujukan untuk mencari pemecahan masalah yang bersangkutan.

1. Perumusan Tujuan

Perumusan tujuan berkaitan langsung dengan pendefinisiam masalah, apabila pendefinisian dapat di buat dengan jelas, pendefinisian tujun pun akan jelas arahnya.

2. Proyeksi dan perkiraan

Orientasi masa depan sangat di tentukan dalam definisi perencanaan. Prediksi merupakan aspek yang sangat penting dalam mengevaluasi dan menentukan alternatif-alternatif yang akan di lakukan.

3. Pengembangan Alternatif

Tahap ini mempunyai pengaruh yang mendalam, pada kualitas pemutusan akhir, sebab keputusan

tersebut berasal dari serangkaian pilihan yang ada dalam perencanaan tersebut.

4. Analisa Kelayakan

Analisa ini mengajukan pertanyaan tentang setiap pilihan yang telah di kembangkan, hal-hal ini pun harus di pertimbangkan dalam suatu rencana yang realistis.

5. Evaluasi

Tahap evaluasi dimulai bila perencanaan telah mempunyai beberapa alternatif yang diperkirakan akan di laksanakan. (Prof. Ali kabul mahisi, Dr,Sri indra Trigunarno, S.K.M, M.kes : 2017)

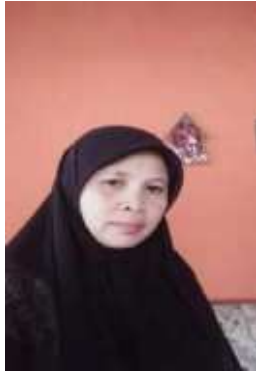
Salah satu contoh dari implementasi pembangunan di sini adalah Pembangunan Desa Pesisir, desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah desa pedalaman. Secara geografis desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan, desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai, mangrove, ektuaria, padang lamun, ekosistem terumbu karang. Ada beberapa upaya rencana pembngunsn desa pesisir pada tahun 2030 yaitu pemetaan desa pesisir dan strategi tranformasi, pemetaan desa pesisir dapat di lakukan dengan tahapan-tahapan (a) penyusunan idek (b) pembuatan tipologi, dan (c) analilisis tipologi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memulai mengindentifikasi atribut-atribut multi dimensi ; ekonomi, politik, ekologi, sosial budaya sebagai indicator. Dengan atribut ini kemudian dapat di buat inek pembangunan

desa pesisir yang selanjutnya menjadi dasar tipologi pembangunan desa pesisir. (Dr. Rukin, S.Pd, M.Si :2019). Strategi lain yang di gunakan untuk pembangunan desa pesisir ini adalah strategi miso yang artinya strategi yang di susun oleh daerah (propinsi kabuoaten/kota) meliputi kebijakan-kebijakan operational dapat mengadopsi serta mendanai pembangunan desa pesisir mandiri berupa peraturan daerah dan pelaturan turunannya. Strategi lain dalam pembagunan desa pesisir adalah strategi mikro yaitu strategi operasional pembangunan desa pesisir yang di rumuskan oleh masyarakat sendiri yang bisa di fasilitasi oleh unsur masyarakat lainnya (LSM, Perguruan tinggi). (Dr. Rukin, S.Pd, M.Si :2019).

DATAR PUSTAKA

- Dimensi prima teori pembangunan (prof. Dr. Agus suryono, SH :2010)
- Ekonomi pembangunan islam (nurul huda DKK : 2017)
- Implentasi model evaluasi formatif program pembangunan (sulastri sarjo, Linda damayanti : 2016)
- Pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Prpf. Oekan Abdoellah, Ph.D : 2010)
- Pembangunan perekomomian masuarakat desa (Dr. Rukin S,Pd, M,Si : 2019)
- Perencanaan Pembangunan Daerah (Prpf.Dr. Ali Kabul mahisi, Dr, sri indra trigunarno, S.Km. M.kes : 2017)

PROFIL PENULIS



Tuti Lisnawati, merupakan staf pengajar program setudi Manajemen Informatika di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia Sukabumi. Ia mengampu matakuliah Dasar Manajemen, Manajemen Bisnis & industri serta Metodologi Penelitian di setiap semester sesuai dengan Kurikulum di setiap prodi.

Koordinasi Pembangunan

Hidayat

BAB 7



BAB 7

KOORDINASI PEMBANGUNAN

A. Pengertian Koordinasi

Kegiatan pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita nasional yaitu keadilan dan kemakmuran. Perwujudan tujuan tersebut dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam bentuk pelaksanaan dan pengembangan sesuai dengan fenomena dan dinamika masyarakat. Keberhasilan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang ingin dicapai melalui penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah koordinasi instansi pelaksana pembangunan. Koordinasi merupakan salah satu cara untuk menyatukan upaya seluruh pimpinan atau unit kerja untuk memajukan proses pembangunan, khususnya di era otonomi daerah, sesuai dengan tuntunan masyarakat.

Sasaran pembangunan nasional akan tercapai seefisien mungkin, berkat koordinasi dari lembaga dan pelaku pembangunan. Apabila masyarakat merespon positif, maka pembangunan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, seperti yang dikemukakan Gran (dalam Yuwono, 2001), peningkatan kesejahteraan manusia adalah fokus utama pembangunan, dan pembangunan masyarakat menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Guna tercapainya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dari satu kegiatan pembangunan, koordinasi antara pemangku instansi dan para pemangku kepentingan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan perlu dibentuk tim yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pengalaman menunjukkan hasil-hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, kurang efisien, dan kurang efektif, karena beberapa kegiatan pembangunan masih belum maksimal dilakukan secara terkoordinasi.

Mooney (dalam Jayanti, 2013), mengemukakan *coordination is defined as the accomplishment of ordered group efforts, whereas unity action is defined as the pursuit of a common goal*. Lebih lanjut Mc Farland (dalam Ismardi, 1991) menjelaskan bahwa *coordination is the process through which an executive oversees the work of his subordinates and ensures unity of action in the pursuit of a shared goal*.

Berdasarkan pengertian tersebut ciri-ciri pokok koordinasi :

1. Tanggung jawab dari koordinasi ada pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi merupakan tugas pimpinan;
2. Koordinasi merupakan upaya kerjasama yang efektif;
3. Proses pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan;
4. Pengaturan usaha teratur, di mana sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama;
5. Kesatuan tindakan memiliki arti bahwa pimpinan harus mengatur tindakan setiap individu agar tercapai keserasian dan keharmonisan;
6. Tujuan bersama merupakan tujuan koordinasi, sehingga diperlukan kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan koordinasi diambil dari berbagai literatur, dan koordinasi memiliki tiga tujuan. Pertama, dengan menyesuaikan berbagai aktivitas terkait di dalam organisasi, menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi semaksimal mungkin; Kedua, mencapai kesepakatan yang mengikat antara semua pihak terkait untuk mencegah konflik dan dalam berbagai aktivitas yang saling bergantung, sehingga menciptakan efisiensi setinggi mungkin; Ketiga, menciptakan dan memelihara suasana saling peduli dan tanggap di setiap unit kerja

yang saling bergantung dan independen yang bererbeda, agar tidak merusak kinerja unit kerja.

Berdasarkan pengertian koordinasi, dapat ditarik kesimpulan: koordinasi adalah suatu upaya menyatupadukan kegiatan satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, sehingga satuan-satuan kerja tersebut bekerja saling mendukung dan terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mencapai efektivitas tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi biasanya memiliki beberapa bentuk koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan agar berhasil mencapai tujuan dengan baik. Syafiie (2011) berpendapat bahwa bentuk koordinasi di bagi menjadi tiga bagian besar yaitu koordinasi horizontal, koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional.

B. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan perubahan yang berkelanjutan secara terencana dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saat ini pembangunan masih menjadi dominasi peran pemerintah belum banyak masyarakat berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai contoh, peran pemerintah dalam struktur perekonomian dapat dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan

meliputi pada semua aspek kehidupan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Pembangunan di negara terbelakang atau negara berkembang, masyarakat kelas menengah bawah yang tidak ada pada lingkaran dengan pusat kekuasaan seringkali mengalami ketidakstabilan atau termarginalkan. Akibatnya, banyak orang dengan keterampilan dan keahlian yang memadai pindah ke negara maju. Orang miskin yang hidup sehat harus memikirkan potensi mereka untuk bisa bertahan dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Dengan kata lain, bagi mereka, masalah hidup tidak lain adalah sumber kehidupan. Beberapa dari mereka termasuk penduduk desa yang telah bermigrasi ke kota-kota (perkotaan) untuk mencoba peruntungan menemukan kehidupan di kota-kota besar. Mereka menemukan bahwa peluang bisnis yang lebih besar terbuka di kota-kota besar. Tetapi mereka datang tanpa modal dan keterampilan yang mumpuni sehingga kesempatan yang ada tidak bisa diraih. Akibatnya, mereka menceburkan diri mejadi tunawisma. Itu semua berasal dari fokus pembangunan kota-kota besar. Di sisi lain, pendidikan juga membantu mempersiapkan siswa menjadi calon karyawan, daripada mengembangkan kemampuannya untuk hidup mandiri. Akibatnya, mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetapi berpendidikan tidak berbeda dengan mereka yang tidak mengenyam pendidikan.

Saat ini, istilah pembangunan adalah satu kata yang memiliki banyak arti. Kata pembangunan dapat dipahami secara bersamaan dengan verba, nomina, dan ajektiva. Pembangunan dapat dianggap sebagai kata kerja bila dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Sebagai suatu sistem, seluruh proses kegiatan pembangunan dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Tidak semua aktivitas suatu proses dapat dipisahkan. Apa yang direncanakan adalah apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan adalah apa yang dievaluasi. Selain itu, hasil evaluasi diumpangkan kembali ke rencana baru. Sekalipun proses kegiatan terjadi beberapa kali, itu harus dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, kondisi baru harus diperbaiki melalui identifikasi dan memperbaiki berbagai kelemahan yang diamati pada setiap tahapan proses operasional.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan perubahan yang berkelanjutan atau terus menerus menuju suatu keadaan yang lebih baik, berdasarkan standar tertentu. Para ahli memberikan banyak definisi berbeda. Istilah pembangunan dapat dipahami secara berbeda dari orang ke orang, wilayah ke wilayah dan negara ke negara. Pembangunan umumnya merupakan proses perubahan (Riyadi & Bratakusumah, 2005). Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan selalu bergerak dari kondisi kehidupan yang buruk menuju kondisi kehidupan yang lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Pembangunan secara umum diartikan sebagai upaya memperbaiki, mensejahterakan, membahagiakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan biasanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun dalam praktiknya, peningkatan kualitas hidup di daerah belum cukup karena menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan akibat alokasi sumberdaya yang tidak merata dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan. Pembangunan di bidang sosial juga perlu dilaksanakan secara simultan dengan bidang ekonomi.

Siagian (2005), mendefinisikan pembangunan : sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Sedangkan menurut Effendi (2002) pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Pembangunan terutama ditujukan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikembangkan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang secara langsung dapat menyentuh keinginan masyarakat. Keberadaan regulator pembangunan diperlukan agar pemerintah berhasil mengembangkan program pembangunan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembangunan.

Pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik sebagai akibat dari upaya yang direncanakan, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang bisa baik atau tidak baik dan tidak memerlukan upaya khusus. Kehadiran upaya terencana merupakan elemen penting dari pembangunan. Inti dari pembangunan adalah hakikat membangun bukan merusak. Jadi, perubahan ke arah keadaan yang lebih baik dengan upaya yang direncanakan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan membuka kapasitas yang ada.

Budiman (2000), menyatakan : kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Setiap individu (masyarakat) atau negara akan selalu mengupayakan pembangunan untuk kelangsungan

hidup masa kini dan masa depan. Pembangunan merupakan suatu upaya berkelanjutan yang terencana namun terprogram dari suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih tinggi, atau merupakan suatu cara yang dinamis dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Kegiatan diarahkan dalam konteks menumbuhkembangkan berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada saat yang sama, kemajuan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan ini, meskipun bukan satu-satunya bagian. Sebab, pembangunan bukan sekadar fenomena ekonomi saja, melainkan mencakup berbagai permasalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembangunan harus diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah: kemiskinan, gangguan mental, konflik antar kelompok, krisis pangan, gizi buruk, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Jika pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, maka dapat dikatakan berhasil, namun jika ukuran ini ditinjau dan dikaji dari perspektif penanggulangan kemiskinan, pemerataan dan pengurangan pengangguran, maka pembangunan itu mengalami kegagalan. Menurut Gant (dalam Suryono, 2001), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi

warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Todaro (2000), mendefinisikan pembangunan merupakan proses multifaset, termasuk perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan negara, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan. Sementara itu, Mardikanto (2013) mengemukakan bahwa pembangunan adalah segala upaya terus menerus yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa yang belum membaik, atau memperbaiki kehidupan yang sudah lebih baik.

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha yang terkoordinasi untuk menciptakan pilihan yang lebih legal bagi setiap warga negara untuk memenuhi dan mewujudkan keinginannya yang paling manusiawi (Nugroho & Dahuri, 2004). Ide pokok pertama dari definisi pembangunan adalah koordinasi, yang berarti diperlukan kegiatan perencanaan. Ide pokok kedua adalah menciptakan alternatif yang lebih sah. Artinya, pembangunan harus berorientasi pada keragaman dalam segala aspek kehidupan. Ada juga mekanisme yang mensyaratkan pembentukan lembaga dan undang-undang yang kredibel yang dapat memainkan peran yang efisien, transparan dan adil. Ide pokok ketiga adalah mewujudkan cita-cita yang paling manusiawi, artinya pembangunan harus berorientasi pada pemecahan

masalah dan penanaman nilai-nilai moral dan etika masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi pembangunan dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang lebih baik yang dicapai secara berkelanjutan hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan.

C. Koordinasi Pembangunan Dalam Pelaksanaannya

Di era desentralisasi, koordinasi adalah jawaban dari otonomi. Dengan kemajuan perkembangan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks, pengendalian terpusat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pembangunan tidak lagi layak. Namun, pelaksanaan pembangunan didistribusikan di organisasi yang berbeda, membutuhkan koordinasi daripada sentralisasi. Koordinasi sangat penting dalam pembangunan, karena sebagian besar rencana pembangunan bersifat antar kementerian dan pelaksanaannya melibatkan banyak instansi pemerintah. Jika pelaksanaan pembangunan tidak dapat dikoordinasikan dengan baik, akibatnya akan terjadi kebingungan dan tumpang tindih dalam proses pelaksanaannya.

Koordinasi bukanlah tugas yang mudah. Manajemen pembangunan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pekerjaan pembangunan bergerak ke arah yang benar dan mengarah pada realisasi tujuan. Oleh karena itu, koordinasi merupakan upaya untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif dalam hal pemanfaatan sumber daya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal. Koordinasi pembangunan adalah mengkoordinir dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan, yang terlihat dari hasil-hasil pembangunan yang masih belum bahkan tidak sesuai dengan perencanaan. Koordinasi dalam pembangunan di Indonesia sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilakukan sejak penyusunan perencanaan telah berupaya dilakukan melalui mekanisme secara *bottom up* dimulai dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa (Musrenbangdes) sampai Musrenbang di tingkat Pusat/Nasional.

Permasalahan utama pada saat pelaksanaan pembangunan berdasarkan beberapa pengamatan adalah masih tingginya ego sektoral antar instansi/dinas terkait yang terlibat dalam pembangunan, selain itu masih

lemahnya data dikarenakan adanya perubahan pada saat perjalanan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Sebagai contoh data tentang penerima bantuan sosial, data yang ada di pusat/kementerian dengan yang ada di daerah kurang sinkron yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan di daerah. Data yang ada di pusat adalah data awal sedangkan data yang di daerah sudah menyesuaikan dengan dinamika kependudukan. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mampu mencapai efektivitas, koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pembangunan perlu ditingkatkan diantaranya dengan meningkatkan komunikasi antar dinas terkait baik sesama dinas di daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun antara OPD dengan instansi di pusat, demikian juga dengan perubahan data harus segera dikomunikasikan oleh OPD kepada instansi pusat.

Untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan koordinasi pembangunan, perlu dilakukan pendekatan melalui 3 (tiga) bentuk koordinasi yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi fungsional, dengan indikator yaitu sinkronisasi dan harmonisasi, dimana antara sinkronisasi dan harmonisasi saling berkaitan (Dione & Faradina, 2020). Sebagai ilustrasi pelaksanaan koordinasi pembangunan di daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Koordinasi Vertikal

Koordinasi vertikal adalah adalah harmonisasi dan sinkronisasi kerjasama dari suatu badan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, seperti antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dari segi koordinasi vertikal, pelaksanaan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) berkaitan dengan pengintegrasian dan penyelarasan kerjasama secara harmonisasi dan sinkronisasi antara Ditjen Bina Bangda, Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota. SIPD sebagai alat untuk mengkoordinasikan data dan informasi pembangunan yang ada di daerah. Data dan informasi pembangunan daerah terkait dengan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah pusat memberikan bimtek (bimbingan teknis) kepada pemerintah daerah melalui Bappeda di masing-masing daerah. Hal ini diharapkan memudahkan koordinasi pembangunan secara vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

2. Koordinasi Horizontal

Koordinasi horizontal adalah harmonisasi dan sinkronisasi kerjasama antar instansi yang sederajat, sebagai contoh antara Bappeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pemerintah

lainnya. Pelaksanaan koordinasi horizontal SIPD meliputi koordinasi kegiatan kolaboratif yang membutuhkan data dan informasi.

3. Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional adalah harmonisasi dan sinkronisasi kerjasama antar organisasi dengan fungsi pekerjaan yang sama, sebagai contoh antara pejabat fungsional umum pengelola SIPD Dirjen Bina Bangda dengan pejabat fungsional umum pengelola SIPD di daerah. Dalam penerapannya, secara teknis diperlukan koordinasi antara operator SIPD pusat dengan operator SIPD di daerah. Dalam pelaksanaannya, koordinasi menggunakan jejaring sosial (*WhatsApp*) untuk berkomunikasi secara intensif antar penyelenggara SIPD di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh operator SIPD setempat. Oleh karena itu, setiap masalah atau kendala yang muncul dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan di Daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD pada Bappeda Kota Bengkulu). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1).
- Effendi, B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Ismardi, I. (1991). *Teknik Koordinasi*. Padang: Diklat Propinsi Sumatera Barat.
- Jayanti, P. D. (2013). Komunikasi dan Koordinasi yang Sinergi Antara Pemerintah Desa dan BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Jurnal Governance*, 1(1).
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Riyadi, R., & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryono, A. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. Semarang: UNDIP.

PROFIL PENULIS



Dr. Drs. H. Hidayat, M.Si. lahir di Garut, 06 Oktober 1962. Sarjana Muda Akademi Administrasi Negara “Angkasa” tahun 1984. Sarjana Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Angkasa” tahun 1986. Magister Ilmu Sosial/Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1999. Doktor Ilmu Sosial/Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2006. Ayah dari 3 orang putra ini, selain sebagai akademisi adalah juga seorang konsultan kebijakan publik dan lingkungan hidup. Diantaranya ia aktif sebagai: Staf Ahli LAPI ITB dan Menjadi Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Nurtanio Bandung. Pernah menjadi Dosen FISIP Universitas Katolik Parahyangan; Dosen Program Pascasarjana STIA LAN RI; dan Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan. Karya yang telah diterbitkan, antara lain: *Dinamika Perkembangan Administrasi Publik* (2015), *Melejitkan Kinerja Pelayanan* (2016). Publish di Jurnal Internasional, antara lain: *The Readiness of Students for Entrepreneurship in the Era of ASEAN Economic Society* (2018), *Morning Assembly in Forming State Civil Apparatus’ Character to Realize Bureaucratic* (2019),

Performance Evaluation of Regional People's Representative Council (DPRD) (2020), Discourse of single Presidential Candidate (2020), Commitment of Agricultural Extension to Organic Rice Crops in Agriculture Services Bandung Regency (Case Study in Ciparay District) (2020), Bureaucracy Transformation to Address Globalisation Challenges (2021), The Quadruple Helix Strategy for Tourism Development (Case Study at Mekar Rahayu Village Margaasih District Bandung Regency) (2021). Publish di Jurnal Nasional Terakreditasi, antara lain: Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung (2021), dan masih banyak lagi karya lainnya.

Strategi Pembangunan

Hamdan Firmansyah

BAB 8



BAB 8

STRATEGI PEMBANGUNAN

A. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Kata pembangunan meliputi proses, perbuatan, cara membangun. Sedangkan pembangunan menurut istilah adalah merupakan suatu kenyataan fisik atau non fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2006). Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan (Theresia; Andini; Nugraha; Mardikanto, 2015). Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Adapaun inti mengenai pembangunan menurut Denis Goulet minimal ada tiga

komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agar benar-benar bisa memahami arti pembangunan. Tiga tata nilai yang dimaksud itu yakni, pertama yang berkaitan dengan nafkah hidup. Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, harga diri menjadi orang. Dalam hal ini dinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisa menghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap diri sendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Ketiga, sasaran pembangunan. Singkatnya pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Sanusi, 2004). Pembangunan secara umum identik dengan proses perubahan (Latif; Irwan; Rusdi; Mustanir; Sutrisno, 2019) yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia. Secara umum seringkali pembangunan dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam peningkatan kualitas hidup. Kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan

kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri (Susanto, 2008).

2. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan nasional salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Pembangunan diartikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu (Usman, 2004). Untuk mencapai tujuan pembangunan, diperlukan sistem administrasi yang mampu menata organisasi dan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, sistem pengawasan keuangan dan kualitas personalia yang efektif dan efisien. Sistem administrasi yang demikian diharapkan dapat menjamin segala rencana, kebijakan dan keputusan-keputusan tentang kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan tanpa adanya penyimpangan (Winarni, 1995).

3. Macam-Macam Pembangunan

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro, 2010) pembangunan fisik berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012). Pembangunan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat, kesehatan, Pendidikan dan keterampilan masyarakat. Pembangunan bukan saja pada pertumbuhann ekonomi semata namun yang lebih penting adalah perbaikan kualitas kehidupan diri, sosial dan lingkungan meningkat lebih baik. Pembangunan secara fisik seperti membangun gedung, jalan, jembatan, pelabuhan atau pembangunan lainnya relatif mudah dan konkrit. Artinya pembangunan secara fisik mudah dilihat dan dirasakan mamfaatnya. Berbeda dengan pembangunan non fisik misalnya pembangunan rehabilitasi mental, pendidikan dan keterampilan tidak mudah dirasakan namun hasil relatif jangka panjang, dan memungkinkan suatu hasil yang bermamfaat bagi umat manusia (Susilawati, 2014)

4. Ukuran Pencapaian Pembangunan

Ukuran pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu (Salim, 2002):

- a. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat disetiap tahun.
- b. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembagian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.
- c. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*physical quality of life indeks*) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerata harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerata jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf.
- d. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi

tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumberdaya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.

- e. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu konfigurasi kekuatan sosial disuatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.

5. Model Pembangunan

Proses pembangunan tidak lebih daripada menghilangkan sejumlah hambatan dan mendatangkan komponen-komponen yang belum tersedia seperti modal, teknologi dan manajemen. Sampai sekarang model-model pembangunan terus berubah, awalnya pembangunan lebih didominasi oleh nilai-nilai ekonomi kemudian model pembangunan mulai lebih konkrit yakni pertumbuhan, yang selanjutnya sinonim dengan industrialisasi dan produktivitas. Model pembangunan pertama, yakni pembangunan bersifat *center down*, pusat yang

dominan sebagai agen pembangunan sementara rakyat adalah pihak yang tidak mempunyai inisiatif dan tidak terlibat dalam mengadakan perbaikan, dan hanya menerima ide dari pusat (Klu, 1984). Model pembangunan ini, memberi peranan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Model pembangunan kedua, yakni model pembangunan yang dikenal dengan *basic need*, model pembangunan ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok seperti kesempatan kerja dan berusaha, pemberantasan kelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan perumahan (Islam dan Henault, 1989). Dalam praktek dikemukakan bahwa tidak selalu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan income perkapita tinggi dan sebaliknya. Fokus utama dari obyek pembangunan adalah penduduk miskin di dalam suatu negara. Model pembangunan ketiga, yakni pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Fokus dan nilai pembangunan yang telah dialihkan dari industri (*growth oriented*) yang menggunakan indikator ekonomi makro ke pelayanan (*basic needs-oriented*) yang menggunakan indikator sosial, kemudian dialihkan lagi ke manusianya (*people centered*) dengan menggunakan hubungan manusia dengan sumber daya yang ada. Pembangunan yang berpusat pada manusia tidak identik dengan pembangunan ekonomi plus modernisasi. Lebih dari keduanya, pembangunan dengan model ini adalah

upaya meningkatkan kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Proses pembangunan ini mencakup keadaan (*being*) dan perbuatan (*doing*). Dengan demikian program-program pembangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mencapai dan meningkatkan kapasitas penduduk untuk mengantisipasi dan menjawab perubahan-perubahan tersebut (Effendi, 1990).

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Ditinjau dari segi etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang diambil dari kata *strator* yang berarti militer dan juga berarti memimpin. Pada awalnya, strategi diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang (Purnomo, Zulkiflimansyah, 1999). Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing untuk mencapai sesuai target (Rachmat, 2014). Menurut George Steiner dan John Minner adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai (Steiner, Minner, 2002). Sedangkan menurut

Stephani K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono dalam buku Husein Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001). Secara khusus strategi adalah “penempatan” misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Steiner, 1979). Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan sesuai dengan peluang-peluang serta ancaman-ancaman dalam kurun waktu tertentu yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, dapat juga disimpulkan sebagai rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi.

2. Bentuk-Bentuk Strategi

Salusu, dalam bukunya menambahkan bahwa Kotten membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu (Salusu, 2006): a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik. b. *Program Strategy* (Strategi Program) Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu. c. *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya. d. *Institusional strategy* (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik. Keempat tipe strategi di atas dapat dipergunakan sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kotten menyebutkan salah satu tipe strategi yaitu tipe strategi pendukung sumber daya yang mencakup salah satunya tenaga sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus diperhatikan dan ditingkatkan guna meningkatkan kualitas kinerja (David, 1998).

3. Unsur-Unsur Strategi

Suatu “strategi” mempunyai 5 unsur, yaitu:

- a. Gelanggang aktivitas atau arena merupakan area di mana organisasi beroperasi. Unsur Arena tersebut seharusnya tidaklah bersifat luas cakupannya atau terlalu umum, akan tetapi perlu lebih spesifik, seperti kategori produk yang ditekuni, segmen pasar, area geografis dan teknologi utama yang dikembangkan.
- b. Sarana kendaraan atau *vehicles* yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana ini, perlu dipertimbangkan besarnya risiko kegagalan dari penggunaan sarana. Risiko tersebut dapat berupa terlambatnya masa pembangunan atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan risiko gagal secara total.
- c. Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul, yaitu bagaimana organisasi akan mendapat kepercayaan publik secara luas. Dalam dunia persaingan, kemenangan adalah hasil dari pembedaan, yang diperoleh dari fitur atau atribut dari suatu produk.
- d. Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*, merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan stratejik. Walaupun substansi dari suatu strategi mencakup arena, sarana/*vehicles*,

- dan pembeda, tetapi keputusan yang menjadi unsur yang keempat, yaitu penetapan tahapan rencana atau *staging*, belum dicakup. Keputusan pentahapan atau *staging* didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (*resource*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
- e. Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan. strategi yang berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

4. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu (Assauri, 2013):

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (*visi*) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu

- dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
 - c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
 - d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen, identitas dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
 - e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
 - f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

5. Implementasi Strategi

Implementasi strategi (*strategy implementation*), yaitu proses manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur (Rachmat, 2014).

- a. Program, yaitu pernyataan aktivitas atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.
- b. Anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara terperinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.
- c. Prosedur atau standard operating procedures (SOP), yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan menggambarkan secara terperinci cara suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan bagian dari program-program.
- d. Evaluasi dan kontrol, yaitu membandingkan antara kinerja dengan hasil yang diharapkan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu aktivitas.

6. Pembentukan Strategi

Beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga bisa sukses, yakni (Salusu, 2006):

- a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus perkembangan dalam masyarakat,

dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.

- b. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang. Semua strategi hendaknya diserasikan satu dengan yang lain.
- c. Strategi yang efektif hendaknya menfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin harus membuat sesuatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan.
- f. Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi

mengandung risiko, tetapi haruslah berhati-hati sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke dalam lubang yang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi harusnya dapat selalu dikontrol.

- g. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi di atas kegagalan. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait.

C. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan sangat mutlak diperlukan serta diterapkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah yang bersangkutan. Untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mendorong bahkan meningkatkan kapasitas pembangunan suatu daerah dengan berdasarkan pada kondisi serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, adapun strategi-strategi pembangunan yang bisa diterapkan, diantaranya ((Siwu, 2017):

1. Strategi Pembangunan Seimbang

Strategi pembangunan seimbang bisa diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara berbarengan (*simultaneous*) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini dapat juga diartikan sebagai keseimbangan pembangunan di

berbagai sektor. Misalnya antara sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Singkatnya, strategi pembangunan seimbang ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis di berbagai sektor sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan baku, sumberdaya energi, pertanian, pengairan, transportasi dan lain-lain serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumen, khususnya produk pertanian dan industri manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan sangat besar.

2. Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat

proses pembangunan di negara sedang berkembang, karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumber daya. Dengan melaksanakan program pembangunan tak seimbang maka usaha pembangunan pada suatu periode waktu tertentu dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong penanaman modal yang terpengaruh (*induced investment*) di berbagai sektor pada periode waktu berikutnya. Oleh karena itu, sumber daya-sumber daya yang sangat langka itu dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan. Kendatipun, pembangunan tak seimbang ini akan menciptakan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan-ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Keadaan tersebut akan menjadi perangsang untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

3. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yaitu (Arsyad, 1999): (1) strategi pembangunan fisik/lokalitas (*Locality or Physical Development Strategy*), (2) strategi pengembangan dunia usaha (*Business Development Strategy*), (3) Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community-based*

Development Strategy) dan (4) Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia (*Human Resource Development Strategy*).

a. Strategi Pengembangan Fisik/ Lokalitas

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik/lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah/ kota, memperbaiki basis pesona (*amenity base*) atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (*civic center*) dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah. Alat untuk mencapai tujuan pembangunan fisik/lokalitas daerah ini mencakup antara lain: (1) Pembuatan bank tanah (*landbanking*). Hal ini bertujuan agar mempunyai data tentang tanah yang penggunaannya kurang optimal, belum dikembangkan, atau salah penggunaan, dan sebagainya. Pembuatan katalog mengenai luas dan lokasi tanah yang terus diperbaharui akan sangat bermanfaat untuk proses pengambilan kebijakan daerah. (2) Pengendalian perencanaan dan pembangunan. Jika hal ini dilakukan dengan benar akan memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah

daerah. (3) Penataan kota (*townscaping*). Kemajuan di pusat-pusat perdagangan dapat dicapai melalui perbaikan-perbaikan sarana jalan raya (misalnya penanaman pohon-pohon yang rindang dan indah) dan perbaikan-perbaikan sarana pusat pertokoan (misalnya perbaikan tampilan maka pertokoan atau penetapan standar fisik bagi suatu bangunan pertokoan). (4) Pengaturan tata ruang (*zoning*) dengan baik akan merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Peruntukan lahan harus jelas dan tepat, misalnya penetapan kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan hijau. (5) Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha. Selain itu, kegiatan di sektor ini juga akan menciptakan kesempatan kerja. (6) Penyediaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, taman-taman, sarana parkir, dan sebagainya menjadi daya Tarik utama juga bagi calon investor dan dunia usaha (Siwu, 2017).

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk

menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa alat untuk mengembangkan dunia usaha ini yakni: (1) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan. (2) Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan, terutama mengetahui masalah perijinan, rencana pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah, ketersediaan lahan, ijin mendirikan bangunan, dan sebagainya. (3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Selain peranannya yang penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan kewirausahaan. (4) Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis. (5) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Peningkatan persaingan di dunia yang berbasis ilmu pengetahuan sekarang ini menuntut pelaku bisnis dan pemerintah untuk secara terus menerus melakukan kajian tentang

pengembangan produk baru dengan diimbangi pengembangan teknologi baru.

c. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang ini sering juga dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini berkembang marak di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang ada tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi keuntungan dari usahanya. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan mereka sehingga memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri dari berbagai ketertinggalan dan untuk menjadi suatu masyarakat yang maju dan mandiri (Haris, 2014). Penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui (Suharto, 2005): (1) Pemungkinan (*Enabling*); Menciptakan suasana atau iklim yang

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dengan kondisi dan iklim yang baik (2) Penguatan (*Empowering*); Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat (3) Perlindungan (*Protecting*); Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari teradinya persaingan yang tidak seimbang (4) Penyokongan (*Supporting*); Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas dalam kehidupannya (5) Pemeliharaan (*Fostering*); Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha (Miad, Arifin, Subadi, 2019). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya. Secara maksimal untuk bertahan untuk mengembangkan diri secara mandiri (Widjaja, 2003). Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya upaya memberikan kesempatan usaha yang sama tetapi harus diikuti pula dengan

perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat dan mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui produktivitas.

d. Strategi Pengembangan Sumber daya Manusia

SDM atau *human resources* adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional (*the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals*) (Ndraha, 2002). Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan. Oleh karena peningkatan kualitas dan ketrampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: (1) Pelatihan dengan sistem *customized training*. Sistem pelatihan seperti ini adalah sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan. (2) Pembuatan bank keahlian (*skillbanks*). Informasi yang ada pada bank keahlian berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang di suatu daerah. Informasi ini bermanfaat bagi pengembangan kemampuan dan ketrampilan. (3) Penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga lembaga pendidikan dan ketrampilan di daerah. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan

dan ketrampilan di suatu daerah secara tidak langsung bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah tersebut. Misalnya: lembaga kursus bahasa, lembaga kursus komputer, lembaga kursus perbengkelan, dan sebagainya. (4) pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacat. Hal ini penting bagi si penyandang cacat itu sendiri untuk meningkatkan rasa harga diri dan percaya dirinya. strategi pengembangan sumber daya manusia harus diperhatikan dan ditingkatkan guna meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pembangunan.

Pembangunan tidak selamanya harus dilakukan dari atas dan bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan pada sektor ekonomi semata, pembangunan juga dapat dilakukan dari bawah dengan memberdayakan masyarakat, penguatan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpikir dan menentukan tekadnya dalam membangun masyarakat dan dirinya (Gainau, 2017).

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan teruji kapasitasnya sebagai pengguna dan perencana pembangunan. Pembangunan yang tidak memposisikan masyarakat sebagai subyek hanya akan melahirkan produk-produk pembangunan baru yang

tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga akan kurang berarti bagi masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa adanya peran dan pengendalian serta evaluasi yang optimal dari pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat membutuhkan metode dan strategi yang baik agar hasil pembangunan akan lebih efektif dan efisien. Penyusunan dan penggunaan metode serta strategi pembangunan akan menentukan peran dari masing masing stakeholder apakah peran masyarakat maupun peran pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan hasil pembangunan, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis (Bahua, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln (1999) *Pengantar Perekonomian dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Assauri, Sofjan (2013) *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Pers
- David, Fred R (1998) *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Effendi, Sofian (1990) *Sistem Administrasi untuk Pembangunan Kualitas Manusia*. Prospektif, No. 1 Vo1. 2. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan
- Gainau, Aldrin Watson (2017) *Critical Review dan Analisis Teori Pembangunan: Suatu Pemikiran Penelitian Tindakan Partisipatori Anisur Rahman*. Jurnal Ilmu Sosial Volume 4 Edisi 1. Papua: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih
- Haris, Andi (2014) *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*. Jupiter Vol. XIII No.2. Makassar: UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin
- Islam; Henault (1989) *Dalam Seni Monograf*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Klu, F.E (1984) *Regional Theory: Towards a Paradigm Shift*. Monrovia: Departemen of Geography, University of Liberia
- Kuncoro, Mudrajad (2010) *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga

- Latif, Adam; Irwan; Rusdi, Muhammad; Mustanir, Ahmad; Sutrisno, Muh (2019) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 1. Ciamis: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh.
- Miad, Abdul; Arifin, Jauhar; Subadi, Wahyu (2019) *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. JAPB: Vol. 2, No. 2 LP2M STIA Tabalong
- Ndraha, Taliziduhu (2002) *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Purnomo, Setiawan Hari; Zulkiflimansyah (1999) *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: LPEEE UI
- Rachmat (2014) *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Salim, Agus (2002) *Perubahan Sosial: Seketsa Teori dan Metodologi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Salusu, J (2006) *Pengambilan Keputusan Stratejik: Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo
- Sanusi, Bachrawi (2004) *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Siwu, Hanly Fendy Djohar (2017) *Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol 18, No 6. Manado: Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi

- Steinner, George; Minner, Jhon (2002) *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Erlangga
- Steiner, George (1979) *Strategic Planning*. Free Press
- Suharto, Edi (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Susilawati, Erni (2014) *Analisis Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai Kabupaten Rokan Hulu*. Riau: Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim
- Theresia, Aprillia; Andini, Krisnha S; Nugraha, Prima G.P; Mardikanto, Totok (2015) *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, Michael P., et al (2006) *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Umar, Husein (2001) *Strategi Manajemen in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Sunyoto (2004) *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, AW (2003) *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo
- Winarni, F (1995) *Dinamika Penerapan Model-Model Pembangunan dan Sistem Administrasi Pendukungnya*. Cakrawala Pendidikan Nomor 2, Tahun XIV. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNY
- Wresniwiro (2012) *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia

PROFIL PENULIS



Dr. Hamdan Firmansyah, SHI, SH, MMPd, MH, Lahir di Sukabumi tanggal 02 Agustus 1981 dari pasangan Ibu Suaebah seorang pendidik dan Bapak Fajar Hidayat seorang jurnalis. Penulis menikahi wanita yang lahir dari pasangan Ibu Emi Ratnawati dan Bapak Mardjuki bernama Putri Ema Swandayani, S.Kep dan Alhamdulillah baru dikaruniai lima orang anak:

Hizqil Hilqiya, Yusya Alyasa, Asmatuha Fariha Yaumia, Muhammad Arasya Muntaha dan Muhammad Irsyad Rasyid. Sekarang penulis bersama keluarga merintis Lembaga Pendidikan dan Dakwah Pesantren Cendekia di Kota Sukabumi. Pendidikan yang ditempuh adalah Madrasah Ibtidaiyah (1993), Madrasah Diniyah Awwaliyah (1994), Taman Pendidikan Al-Quran (1995), Sekolah Menengah Pertama (1996) di kota Sukabumi, Pada pertengahan tahun 1996 Masuk Pondok Modern Gontor kemudian ditempatkan di Kulliyatu-l-Mu'alimin Al-Islamiyah Pondok Modern Arrisalah (1999/2000) di Ponorogo, penulis melanjutkan ke Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Gontor Jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Islam tamat tahun 2004, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok

Pesantren Wali Songo Ponorogo Jurusan Mu'amalat (Hukum Ekonomi Syariah) tamat tahun 2004 dan Program Akta IV Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di tempat yang sama. Pada tahun 2005-2006 mendapat beasiswa dari Zakariyya Islamic University Lenasia South Africa untuk Program Studi Islam. Pada tahun 2006, penulis melanjutkan studi di Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Jakarta hingga selesai tahun 2007. Kemudian melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan berhasil meraih predikat Cum Laude. Dan saat ini telah menyelesaikan Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di almamater yang sama yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pengalaman Penulis selain aktif sebagai peneliti sekaligus penulis baik berupa buku maupun berupa jurnal nasional dan internasional juga sebagai nara sumber pada seminar dan loka karya, tutor pada pelatihan dan sebagai tenaga edukatif dimulai sejak tahun 1998 sampai sekarang yaitu menjadi Guru TPA, RA/TK, MI/SD, Mts/SMP, MA/SMA, KMI, dan Dosen perguruan tinggi dari Program Diploma, Sarjana hingga Pascasarjana. Penulis pernah mendapat kehormatan menjadi Guru Agama Masyarakat Indonesia atas permintaan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Guru Agama Masyarakat Malaysia atas permintaan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Republik Afrika Selatan.

Manajemen keuangan
dan Investasi Daerah

Tia Ernawati

BAB 9



BAB 9

MANAJEMEN KEUANGAN DAN INVESTASI DAERAH

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Tujuan dari pendirian perusahaan yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas dari peran manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu seni mengatur sumber daya yang ada diperusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, dengan fungsi-fungsi manajemen sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari beberapa bidang manajemen yang akan di bahas dalam buku ini adalah bidang manajemen keuangan sbaik secara umum juga terkait manajemen keuangan daerah serta Investasi Daerah.

Manajemen keuangan sangat penting perannya dalam perusahaan apapun jenis dan bidang usahanya, dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mengetahui harta mana yang dapat menghasilkan pada saat perusahaan ingin melakukan investasi. serta manajemen keuangan pada dasarnya keseluruhan kegiatan atau aktivitas untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut atau mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. Seperti yang di

kemukakan oleh Mokhamad Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian dana, pengalokasian dana maupun pembagian hasil perusahaan. Tujuan Manajemen Keuangan agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki terutama dari aspek keuangan sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat mensejahterakan para pemegang saham. Menurut kariyoto (2018) menyebutkan bahwa lingkup manajemen keuangan terdiri dari 3 lingkup yakni bagaimana memperoleh dana, *Fund Management* , membagi dana. Menurut karioto pula ada dua bidang keuangan yang selalu dianggap berbeda diantaranya keuangan perusahaan dan keuangan negara. Keuangan perusahaan adalah suatu bidang *science* yang membahas tentang bagaimana suatu perusahaan berusaha mencari *funding*, mengelola *funding*, dan membagi hasil laba sesuai dengan besarnya kepemilikan *Funding* yang di tempatkan. Keuangan Negara adalah suatu bidang *science* yang mengkaji tentang bagaimana suatu negara dengan segala perangkatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola hak dan kewajiban negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi tercapainya kemakmuran rakyat.

B. Manajemen Keuangan Daerah

Bambang Pamungkas (2013) Tujuan terselenggaranya manajemen keuangan dilingkungan

pemerintah daerah, secara umum adalah terkait dengan dapat diterapkannya fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif, berdasarkan amanat peraturan perundangan pengelolaan (manajemen) keuangan daerah meliputi seluruh aktifitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Secara khusus terdapat 3 level tujuan manajemen keuangan sektor publik yaitu:

1. Tercapainya disiplin fiskal yang telah ditetapkan
2. Terlaksananya proses alokasi yang sesuai dengan tujuan strategis dan prioritas yang ditetapkan.
3. Terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pemnggunaan sumber daya pemerintah.

Bambang Pamungkas (2013) juga mengungkapkan terdapat prinsip dasar manajemen keuangan sektor publik yang baik dan benar. Prinsip-prinsip ini diakui sebagai praktik-praktik terbaik pengelolaan keuangan sektor publik di dunia dan telah ditetapkan sebagai acuan standar internasional. Prinsip-prinsip tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Komprehensif dan disiplin

Komprehensif mengandung arti bahwa seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil terkait proses penyusunan dan penetapan anggaran harus berdasarkan pada pertimbangan yang luas, menyeluruh dan terpadu terhadap semua aspek dan

faktor-faktor yang mempengaruhi substansi suatu anggaran.

Disiplin menunjukkan adanya ketaatan dan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2. Legalitas dan legitimasi

Legalitas mengandung arti bahwa dokumen anggaran sebagai produk hukum telah ditetapkan melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Legitimasi mengandung arti bahwa segala tindakan yang dilakukan dalam proses manajemen keuangan harus mempunyai legitimasi (mendapat dukungan) dari pemangku kepentingan sehingga dapat menjamin efektifitas pelaksanaannya.

3. Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan suatu kondisi yang menurut peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya pengecualian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan keuangan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan rencana atau peruntukan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Dapat di prediksi

Dapat diprediksi merupakan prinsip yang mendorong pemerintah untuk selalu menjaga stabilitas pengelolaan keuangan.

5. Dapat diuji

Dapat diuji menuntut agar program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan pilihan yang terbaik dari

berbagai alternatif yang ada.

6. Kejujuran

Kejujuran merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam seluruh tahapan atau kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah.

7. Informatif

Informatif mengandung arti pada tahapan setiap proses manajemen keuangan, harus tersedia informasi yang jujur dan berguna untuk proses pengambilan keputusan yang baik.

8. Transparan dan Akuntabel

Prinsip ini menuntut para pelaku untuk melakukan pertanggung jawaban atas tugas wewenang yang dimiliki.

LAN Sebagaimana dikutip oleh Bambang Pamungkas (2013:7-8) mengemukakan bahwa karakteristik *good governance* ke dalam sembilan karakteristik diantaranya : *Participation, Rule Of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus, Equity, Efektiveness, Accountability, Strategic vision.*

Bambang Pamungkas (2013) juga mengungkapkan reformasi manajemen keuangan sektor publik dibutuhkan seiring ditemukannya beberapa kendala ataupun adanya indikasi kegagalan sistem pengelolaan keuangan. Kondisi dari manajemen keuangan sektor publik yang membutuhkan reformasi antara lain sebagai berikut :

1. Proses perencanaan program yang tidak didasarkan pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat tetapi hanya didasarkan pada pengalaman atau mengulangi kegiatan tahun anggaran sebelumnya.
2. Fokus penilaian kinerja anggaran lebih kepada realisasi penyerapan anggaran berdasarkan pagu, belum sepenuhnya dikaitkan dengan mempertimbangkan hal-hal efektifitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan anggaran.
3. Penyusunan anggaran belum didasarkan pada program atau kegiatan mempertimbangkan aspek-aspek program yang visioner sesuai dengan visi dan misi pemerintahan namun hanya bertumpu pada pencapaian tujuan proyek-proyek jangka pendek/tahunan yang bersifat parsial.
4. Penetapan kebijakan anggaran yang masih didominasi kepentingan atau permainan "elite" penentu di daerah sehingga proses penetapan kebijakan bersifat sepihak sesuai dengan kehendak penguasa.
5. Situasi seperti ini antarlain menyebabkan lahirnya ekonomi biaya tinggi dalam kebijakan penganggaran.
6. Adanya kecenderungan dalam penyusunan APBD yang memperhitungkan tingkat inflasi secara menyeluruh sebagai variabel penentu kenaikan besaran anggaran dari tahun ke tahun yang menggunakan pendekatan incremental.
7. Proses pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai sehingga menyebabkan

- kegagalan pencapaian tujuan instansi terkait.
8. Pelaksanaan APBD yang tergesa-gesa sehingga sering emnunggu n hingga detik terakhir.
 9. Pengambilan keputusan yang lemah yang dikarenakan pemotongan anggaran secara mendadak yang disebabkan oleh ketidakpastian penerimaan dana pemerintah daerah terkait.
 10. Insentif pelaksana anggaran untuk membelanjakan habis anggaran diawal periode.
 11. Peraturan dan kebijakan yang ada yang tidak pernah dianalisa serta dievaluasi secara mendalam.
 12. Integrasi yang lemah antara kebijakan dan sumber daya yang dimiliki dengan level operasional organisasi yang bersangkutan.
 13. Belum sinkronnya tugas-tugas yang dibebankan kepada satuan kerja dengan tujuan program atau visi misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan, dimana hal ini dapat menyebabkan pencapaian program-program pemerintah sulit diwujudkan.
 14. Ketiadaan insentif untuk membenahi manajemen keuangan sektor publik.

C. Keuangan Daerah

Khusaini (2018) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan penmgawasan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara jelas menetapkan landasan

dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan 1.ketentuan dalam menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. 2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. 3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan. 4. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehinggalah dapat diketahui oleh masyarakat.

D. Kinerja Keuangan Daerah

Yoyo Sudaryo (2017) mengemukakan terkait dengan kinerja, Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang sudah kita rencanakan baik oleh pribadi maupun organisasi, apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik, apabila pencapaian melebihi apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Begitu juga sebaliknya apabila tidak sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja bisa dikatakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek.

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga

diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas, entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis Rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

E. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Yoyo Sudaryo (2017) Analisis kinerja keuangan meliputi :

1. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

2. Rasio Efektivitas Terhadap PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

4. Rasio-rasio keserasian belanja daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal.

F. Barometer Keuangan Negara/Daerah

Abd. Rochim (2015) mengatakan pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas akan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengaksesnya.

G. Investasi

Kata investasi sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita yaitu suatu upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapat keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi juga sangat penting sebagai upaya kita untuk mempertahankan diri dan untuk kelangsungan hidup dimasa yang akan datang. Yang akan dibahas dalam bab ini terkait investasi daerah, tapi sebelumnya akan dijelaskan apa itu investasi secara umum.

Tona Aurora Lubis (2016) dalam bukunya menyebutkan bahwa investasi adalah mengeluarkan sumber daya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset dimasa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Adapun tujuan investasi adalah memunculkan peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolok ukur pertambahan nilai finansial dari aset yang dimiliki saat inidimasa yang akan datang.

Nilai firdaus dkk(2020) menyatakan bahwa investasi adalah proses pengelolaan pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal dimasa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan dikemudian hari.

Nilai juga menuturkan bagwa garis besar proses investasi adalah sebagai berikut (1) tetapkan tujuan investasi, (2) lakukan *risk profilling*, (3) alokasikan Aset, (4) investasi pada saham atau *Imutual fund*. (5) perhitungkan struktur dan beban pajak (5) implementasi. (6) review dan pengawasan.

Pentingnya investasi suatu daerah adalah untuk menopang kebutuhan finansial suatu daerah tersebut, seperti dikatakan oleh Sri (2020) bahwa kemakmuran suatu daerah tentu dapat digambarkan sebagai tingginya kualitas hidup rakyat yang tinggal didalamnya. Kualitas hidup ini selalu digambarkan dengan peningkatan pendapatan dan tingkat kesehatan.

Sri (2020) mengatakan bahwa peran dan dukukangan pemerintah dan lembaga-lembaga lain sangat

dibutuhkan, tentu saja untuk menyediakan sarana kesehatan, sarana pendidikan dan infrastruktur yang lengkap. Meningkatkan produktivitas membutuhkan bahan input yang baik agar outputnya pun baik.

Untuk menjalankan semua itu tidak sedikit pemerintah daerah membutuhkan biaya, untuk itu dengan berbagai cara supaya ada aliran dana masuk ke pemerintah daerah selain dari Dana alokasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus dapat menggali sumber keuangan sendiri dengan cara berinvestasi. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, disini peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah itu sendiri baik dari sektor pariwisata maupun sektor lain yang ada di daerah tersebut.

Strategi pengembangan potensi daerah dalam peningkatan iklim investasi, Direktur Pengembangan Potensi Daerah (2019) menyebutkan peranan investasi dalam mendukung perekonomian nasional, seperti yang kemukakan presiden Joko Widodo (Rakornas Investasi ICE BSD Tangerang, Banten 12 Maret 2019) mengatakan bahwa "Investasi merupakan kunci utama bagi perekonomian Indonesia selain ekspor. Tanpa keduanya, Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang pertumbuhannya melaju seiring dengan kinerja investasi dan ekspor yang tinggi."

Peranan investasi 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi, 2. Menciptakan lapangan kerja, 3. Mengubun

ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi, 4. Meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak, 5. Mendorong pemerataan ekonomi, 6. Mendorong kemudahan berusaha.

Pemetaan potensi dan peluang investasi, potensi daerah merupakan anugrah yang ada pada suatu daerah, yang dapat dikelola dengan baik untuk memberikan kebaikan/maslahat pada manusia. Manfaat pemetaan potensi daerah 1. Menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan tata ruang serta pembangaunan prasarana fisik. 2. Menciptakan efisiensi dan produktivitas sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian daerah. 3. Menjaga keberlanjutan.

Kegiatan pemetaan potensi daerah dilakukan untuk mengetahui keunggulan komperatif suatu daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam merencanakan pembangunan daerah dan menentukan strategi pembangunan daerah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdayasaing tinggi.

Tahapan Pemetaan Peluang Investasi, 1. Penyediaan Data Peluang Investasi, Focus Group Discusion, 3 Kajian Peluang Investasi. Komponen dalam penyusunan informasi potensi daerah diantaranya : profil daerah, peluang investasi, infrastruktur pendukung, peta, foto dan vidio, contact person.

Sekarang pemerintah sudah menyediakan suatu sistem untuk mengetahui informasi investasi suatu daerah yang dinamakan "SIPID" ., SIPID ini merupakan suatu

sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai p[otensi investasi daerahserta infrastruktur pendukungnya. SIPID berbasis spasial sehingga data yang ada dapat diintegrasikan secara berlapis/layer untuk memperoleh informasi secara visual.

BKPM (2018) yang dimaksud dengan potensi daerah secara sederhana dapat diartikan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki daerah. Sedangkan makna dari potensi investasi daerah adalah kekuatan dan kemampuan yang dimiliki daerah dalam menarik investasi.

Potensi suatu daerah dapat dilihat dari sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian daerah, dan salah satu indikator dapat dicerminkan dengan data produk domestik regional bruto.

Potensi yang ada di daerah harus diolah dan dikembangkan menjadi peluang, dengan cara bisa menggunakan analisa SWOT. Kemudian menganalisa dengan pendekatan kluster, yang dimaksud kluster disini adalah aglomerasi perusahaan atau usaha yang memiliki hubungan yang insentif dalam suatu mata rantai nilai untuk membangun aliansi strategis dan komplementer. Porter dalam Buku BKPM (2018) mendefinisikan kluster sebagai konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, pemasok khusus, penyedia layanan, perusahaan dalam industri terkait, dan lembaga-lembaga terkait, di bidang tertentu yang bersaing tetapi juga bekerja sama. (Panduan BPKM, 2018)

Ada dua jenis klaster yaitu, 1. Cluster geografis, 2 cluster industri. Model pembangunan dengan cara mengklasterkan adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachim (2015) *barometer keuangan negara/daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bambang Pamungkas (2013) *dasar-dasar manajemen keuangan pemerintah daerah*. Bogor : Kesatuan Press.
- BKPM (2018) *buku panduan singkat penyusunan profil investasi daerah*. Jakarta Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Badan Koordinasi Dan Penanaman Modal.
- Kariyoto (2018) *manajemen keuangan konsep dan implementasi*. Malang: UB Press.
- Mokhammad Anwar (2019) *dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan*. Jakarta : Kencana.
- Moh. Khusaini (2018) *keuangan daerah*. Malang : UB Press
- Nila Firdaus Nujula, Ferina Nurlaili (2020) *dasar-dasar manajemen investasi*. Malang : UB Press.
- Sri Bramantoro Abdinagoro (2020) *menyusun dan memasarkan investasi daerah*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Tona Aurora Lubis (2016) *manajemen investasi dan perilaku keuangan*. Jambi : Salim Media Indonesia.
- Yoyo Sudaryo (2017) *keuangan di era otonomi daerah*. Yogyakarta : Andi Offset

PROFIL PENULIS



Tia Ernawati, lahir di Tasikmalaya, 12 Desember 1983. Pendidikan S.1 Universitas Siliwangi Tasikmalaya Prodi Manajemen, S2 STIE ISM Jakarta, Prodi Manajemen. Pengalaman kerja Bagian Administrasi Keuangan LSM PKBI Tasikmalaya, Pengurus PMI Kota Tasikmalaya, Guru MA Nurul Falah Kota Tasikmalaya (2009-2015), Sekarang Dosen Tetap di Perguruan Tinggi AMIK Citra Buana Indonesia Sukabumi, dengan Jabatan Akademik Dosen Lektor. Jabatan diluar dosen sebagai Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi AMIK Citra Buana Indonesia 2015 - 2020 dan 2020 - 2025. Organisasi profesi yang diikuti adalah PROMAPI (2021)

Pengawasan Pembangunan

Robert Tua Siregar

BAB 10



BAB 10

PENGAWASAN PEMBANGUNAN

A. Pengantar

Untuk menggapai bermacam target serta tujuan pembangunan dengan cara berdaya guna serta efisien, di samping dibutuhkan sistem pemograman yang bagus serta sanggup mengantisipasi daya guna penerapan konsep, pula dibutuhkan sistem penerapan serta pengawasan yang afdal serta sanggup menjamin kemampuan serta daya guna pendapatan target serta tujuan pembangunan yang direncanakan. Sistem penerapan itu bersama sistem pemograman serta pengawasan ialah bagian dari sistem manajemen pembangunan selaku sarana dalam menggapai bermacam target serta tujuan pembangunan nasional (Tiza, Hakim and Haryono, 2014). Pengawasan ialah sesuatu statment kepada realitis yang teridentifikasi dari pada tindakan-tindakan yang dicoba oleh orang dengan cara perseorangan ataupun dengan cara beregu dalam suatu badan ataupun badan, begitu pula kalau pengawasan bisa dicoba oleh perseorangan ataupun beregu. Hasil ataupun temuannya dalam pengawasan jadi sesuatu dorong ukur buat memperhitungkan kesuksesan profesi yang dicoba oleh perseorangan ataupun segerombol orang itu. Alhasil bukti penemuan pengawasan ialah salah satunya pemahaman yang sanggup menggabungkan antara hasil

profesi era kemudian dengan era saat ini, setelah itu melaksanakan sesuatu pola pandangan dengan memperhitungkan situasi yang hendak tiba dalam suatu kelembagaan.

Dalam ikatan ini, sistem penerapan pembangunan yang dimaksudkan merupakan yang menyangkut program pembangunan yang dibiayai perhitungan negeri, tercantum di dalamnya kebijaksanaan dan metode yang mensupport kesertaan warga dalam melakukan pembangunan. Buat mengamankan penerapan pembangunan serta supaya tujuan dan target pembangunan berhasil dengan cara berdaya guna serta efisien cocok dengan peraturan perundang-undangan, dibesarkan serta didayagunakan sistem penerapan serta pengawasan pembangunan. Dalam bagan penerapan pembangunan, konsep pembangunan 5 tahun (repelita) dipaparkan lebih jauh ke dalam konsep operasional tahunan yang terdiri atas bermacam zona, sub-sektor, serta program pembangunan. Konsep operasional tahunan itu setelah itu dituangkan dalam serta ialah bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (RAPBN). Cocok dengan mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, RAPBN diajukan oleh Pemerintah pada Badan Perwakilan Rakyat (DPR) buat memperoleh persetujuan serta penetapan sebagai hukum mengenai APBN.

Bermacam pandangan serta riset itu sudah menciptakan bermacam pengelompokan fungsi-fungsi manajemen itu. Hendak namun, terbebas dari berbagai

macam macam pengelompokan itu para akademikus sudah akur kalau pada dasarnya totalitas fungsi- fungsi manajemen bisa digolongkan pada 2 tipe penting, ialah guna organik serta guna cagak. Yang terkategori pada tipe guna organik merupakan totalitas guna penting yang telak butuh dicoba oleh para administrator dalam bagan pendapatan tujuan serta bermacam target yang sudah diresmikan tadinya (Ningsih, 2020). Fungsi-fungsi organik itu ialah pemaparan kebijaksanaan dasar ataupun strategi badan yang sudah diresmikan serta wajib dipakai selaku dasar berperan. Berdialog hal pembangunan Indonesia pastinya tidak hendak terbebas dari ikatan serta kondisi dari negeri itu sendiri.

Dari kondisi itu lah kita bisa memandang sepanjang mana pembangunan ini bisa berjalan dengan cara sebaiknya, Indonesia sendiri memanglah kerap kali tersendat dengan banyak perkara terpaut kenaikan keselamatan masyarakatnya (Tiza, Hakim and Haryono, 2014). Karenanya pembangunan Indonesia paling utama dalam aspek ekonomi ini merupakan perihal yang harus ditingkatkan serta difokuskan dalam sebagian tahun ke depan. Perihal itu supaya bisa menanggulangi bermacam perkara semacam kekurangan, pengangguran sampai tingkatan keselamatan dengan cara global. Buat melaksanakan pembangunan ekonomi dibutuhkan banyak pandangan ataupun aspek yang bisa dicoba. Aspek ini kita hendak untuk jadi 2 ialah aspek ekonomi serta aspek non ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan sesuatu" cara", bukan sesuatu cerminan

ekonomi pada sesuatu dikala ataupun yang membuktikan terdapatnya perekonomian bertumbuh ataupun berganti dari durasi ke durasi dimana penekanannya pada perkembangan ataupun pergantian itu sendiri. Pergantian ekonomi berhubungan dengan " *Output Perkapita*", terdapat 2 bagian yang butuh dicermati disini ialah bagian *output* keseluruhan (GDP) serta bagian jumlah penduduknya (Amran, 2004). *Output perkapita* merupakan *output* keseluruhan dipecah jumlah masyarakat. Pandangan ketiga dari arti perkembangan ekonomi merupakan perspektif durasi waktu jauh.

B. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan pada hakekatnya ialah peranan yang melekat pada seseorang atasan ataupun puncak manajemen dalam tiap badan, searah dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang lain ialah pemograman serta penerapan. Begitu perihalnya dalam badan penguasa, guna pengawasan ialah kewajiban serta tanggung jawab seseorang kepala rezim, semacam di lingkup penguasa provinsi ialah kewajiban serta tanggung jawab gubernur sebaliknya di penguasa kabupaten serta kota ialah kewajiban serta tanggung jawab bupati serta walikota (Sugiartha, Herawati and Atmadja, 2014). Tetapi sebab keterbatasan keahlian seorang, menjajaki prinsip-prinsip badan, hingga kewajiban serta tanggung jawab arahan itu diserahkan pada pembantunya yang menjajaki ceruk *distribution of power* begitu juga yang diajarkan dalam teori-teori badan

modern. Penerapan pengawasan fungsional bertambah searah dengan besarnya bobot serta luasnya aktivitas pembangunan.

sekiranya pada mula PJP I pengawasan fungsional dititikberatkan pada pengawasan buat mensupport penerapan razia administrasi finansial negeri, menjelang akhir PJP I ruang lingkup pengawasan fungsional diperluas sampai menjangkau evaluasi tingkatan kehematan, energi untuk serta hasil untuk pemakaian pangkal energi dalam pendapatan tujuan program pembangunan (Harian and Mea, 2021). Tidak hanya itu, dalam tiap penerapan pengawasan, petugas pengawasan fungsional diharuskan mencermati tiap pandangan manajemen yang meng- hambat pembudayaan serta pemanfaatan pengawasan menempel, selaku kenaikan usaha menciptakan energi untuk serta hasil untuk aktivitas biasa rezim serta pembangunan dan penangkalan tampaknya kebocoran serta kecurangan. Berikutnya, lewat pemberlakuan standar pengecekan serta lewat pembelajaran serta penataran pembibitan pengawasan, digapai kecocokan hal penafsiran pengawasan, metode pengecekan, serta peliputan hasil pengecekan (Putra, 2013).

Dalam penerapan bermacam kegiatan kelembagaan wajib bersumber pada pada determinasi yang legal, determinasi inilah yang dimaksudkan di mari kebijaksanaan. Oleh karena itu pengawasan berfungsi buat menuntun pada seorang yang melaksanakan aktivitas itu tetap tidak terbentuknya penyimpangan dari

pada determinasi. Kebijakan pengawasan yang mempunyai mutu yang besar sebab cara penetapannya dicoba bermacam daya pakar yang mempunyai kompetensi di aspek tiap-tiap hendak amat memastikan mutu kebijakan yang akan diresmikan itu (Rahayu and Budi, 2013). Seorang yang melaksanakan kewajiban ataupun guna di aspek pengawasan tidak hendak populer tanpa ditopang oleh kebijakan yang nyata serta pas buat menata mengenai penerapan sesuatu aktivitas kelembagaan, oleh sebab itu para ahli pengawasan ataupun para pengawas handal yang melaksanakan kewajiban tiap- tiap butuh melaksanakan pendekatan pada religionisme (pendekatan agama agama) alhasil statment yang dikeluarkan tetap membuktikan terdapatnya kebenaranyang bisa menerangi perjalanan penerapan aktivitas kelembagaan berikutnya, alhasil perkembangan yang dirasakan merupakan perkembangan dalam bukti.

Pengawasan ialah faktor berarti dalam cara manajemen rezim, pengawasan mempunyai kedudukan yang amat penting buat terwujudnya akuntabilitas khalayak dalam rezim serta pembangunan lewat sesuatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh serta membina, hingga diharapkan keahlian administrasi khalayak yang dikala ini dikira lemas serta mempunyai hambatan, paling utama dibidang pengawasan pengawasan, bisa ditingkatkan kapasitasnya dalam bagan membuat prasarana birokrasi yang lebih bersaing (Journal et al., 2016). Inspektorat Wilayah memainkan kedudukan

yang amat berarti buat perkembangan serta kesuksesan penguasa wilayah serta fitur wilayah dalam menyelenggarakan rezim di wilayah buat menggapai tujuan serta target. Inspektorat Wilayah jadi tiang yang memiliki kewajiban selaku pengawas sekaligus ajudan dalam penerapan program penguasa wilayah yang teratur serta tertuang dalam Perhitungan.

Dalam peruntukan perhitungan wilayah memakai Pemasukan serta Berbelanja Wilayah (APBD). Buat mendukung supaya penerapan kewajiban dari Inspektorat Wilayah dalam melaksanakan guna pengawasan bisa berjalan dengan cara maksimum, dibutuhkan terdapatnya kemampuan yang lebih intensif serta maksimal dari Inspektorat Wilayah untuk optimalisasi kewajiban dan tanggungjawab. Bersumber pada hasil analisa yang dicoba kalau Kemampuan dari Inspektorat wilayah dalam melaksanakan guna pengawasan di Wilayah belum maksimal berjalan efisien (Journal et al., 2016). Perihal ini diindikasikan dengan pembuktian kalau Kedaulatan dari Inspektorat belum Terlihat, Mutu serta jumlah Pangkal Energi Orang Aparatur pengawasan yang belum memenuhi serta ketersediaan alat serta infrastruktur pendukung yang belum mencukupi semacam jaringan internet.

Perancangan, penerapan pengawasan serta pengaturan ialah guna manajemen yang wajib diamban ataupun dilaksanakan oleh aparatur penguasa selaku eksekutor Negeri. Pengawasan ialah guna manajemen buat mengen- dalikan jalannya badan supaya tujuan yang

efisien, berdaya guna serta murah cocok peraturan perundang- undangan yan legal. Dengan terdapatnya pengawasan, bisa didapat masukan untuk pemilik ketetapan buat mengakhiri ataupun meniadakan kekeliruan, penyimpangan, kecurangan, inefisiensi, menghindari terulangnya kembali kekeliruan yang serupa serta menemukan cara- cara yang bagus buat menggapai tujuan dalam melakukan kewajiban utama serta guna badan serta pendapatan visi serta tujuan badan. Cara Cara pengaturan yang efisien serta berdaya guna dibutuhkan oleh seluruh stake holder. Alhasil dengan cara matriks bisa kita amati gimana pengawasan itu dengan terdapatnya feedback dalam serta external semacam pada matriks selanjutnya:

Gambar 10.1. Matriks Pengawasan Pembangunan

Feedforward	Concurrent	Feedback	Internal-external
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan sebelum aktivitas dimulai. ▪ Untuk menjamin kejelasan sasaran; ▪ Tersedianya arahan yang memadai; ▪ Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. ▪ Memfokuskan pada kualitas sumber daya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan ▪ Memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu sesuai rencana ▪ Untuk mengurangi hasil yang yang tidak diinginkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan. ▪ Tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri ▪ Pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

Sumber : Dadang Solichin 2014

Negara selaku satu organisasi besar buat menggapai tujuan ataupun harapan bangsa. Administrasi ataupun manajemen rezim wajib direalisasikan dalam bagan terlaksananya tugas- tugas biasa pemerintahan serta pembangunan. Pengawasan kepada petugas penguasa bisa dicoba bagus dengan cara melindungi ataupun represif. Pengawasan dengan cara melindungi merupakan pengawasan yang dicoba saat sebelum petugas yang berhubungan melaksanakan aksi hukum khusus, sebaliknya pengawasan represif merupakan sesuatu pengawasan yang dicoba sehabis petugas yang berhubungan sudah melaksanakan aksi yang tendensinya mudarat pihak rival melakukan (Kasim, 2017). Pengawasan Pengawasan serta pengaturan dan pembinaan ialah guna yang tidak bisa dipisahkan. Pengawasan mendesak supaya obyek pengecekan bisa memaksimalkan pendapatan sasaran, sebaliknya pengaturan ditunjukan supaya obyek pengecekan tetap melaksanakan penyempurnaan atas sistem pengaturan manajemennya dalam cara pembinaan badan waktu jauh(Maswati, 2018). Dalam penerapan kewajiban serta guna pengecekan serta pengawasan memanglah berlainan, namun memiliki kecocokan. Perbedaannya terdapat pada target, sebaliknya kesamaannya ialah buat menggapai situasi yang lebih bagus, minimum cocok dengan peraturan ataupun konsep dan peraturan yang lebih besar. Pada awal mulanya kedudukan dan warga ini diatur dalam PP No 68 Tahun 1999 mengenai aturan metode penerapan kedudukan dan warga dalam

penajaan negeri. Penguasa wilayah merupakan sub sistem rezim nasional dalam bentuk Negeri Kesatuan Republik Indonesia (Bunga Putra and Nur Pratiwi, 1203). Oleh sebab itu penajaan rezim wilayah tidak bisa pergi dari koridor Negeri kesatuan, alhasil butuh terdapatnya pembinaan serta pengawasan kepada penajaan rezim wilayah. Dalam bagan pembinaan serta pengawasan itu hingga dikeluarkan Peraturan Penguasa No 20 Tahun 2001 mengenai pembinaan serta pengawasan rezim wilayah (Ningsih, 2020). Bagi Paulus Effendie Lotulung pengawasan merupakan usaha buat menjauhi kelalaian, bagus disengaja ataupun tidak disengaja, selaku upaya melindungi, ataupun pula buat membenarkannya bila telah terjalin kelalaian itu, selaku upaya represif.

C. Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan

Partisipasi masyarakat jadi salah satu isu penting buat menciptakan yanlik tembus pandang, akuntabel, serta seimbang. Kesertaan warga ialah salah satu situasi yang dibutuhkan supaya penajaan rezim bisa sukses dengan bagus. Dengan keikutsertaan warga yang terus menjadi besar, hingga bermacam kebijaksanaan pembangunan wilayah hendak bisa merepresentasikan kebutuhan warga besar. Kesertaan warga pula dibutuhkan supaya mereka bisa turut memantau jalannya penajaan rezim wilayah.

Partisipasi bagi Sumardi (2010:46) berarti kedudukan dan seorang ataupun golongan warga dalam cara pembangunan bagus dalam wujud statment ataupun

dalam wujud aktivitas dengan berikan masukan benak, daya, durasi, kemampuan, modal serta ataupun modul, dan turut menggunakan serta menikmati hasil- hasil pembangunan. Sebaliknya Booth, Ebrahim, serta Morin(2001, p. 26) mendeskripsikan kesertaan selaku suatu cara perbincangan buat menangkap harapan atau ilham dari para pengelola kebutuhan (pihak-pihak yang hirau dengan suatu) yang hendak menolong para pihak mempunyai anggapan multidimensional mengenai keinginan mereka. Arti ini pula melukiskan kalau khasiat kesertaan membagikan uraian yang banyak, ialah yang multidimensional untuk para pihak. Warga dalam kondisi partisipasiadalah segerombol orang ataupun pengelola kebutuhan yang besar serta heterogen, terorganisasikan ataupun tidak, yang prihatin dengan permasalahan ataupun permasalahan spesial serta mempunyai kebutuhan dalam pengumpulan ketetapan (Appelstrand, 2002). Tetapi, arti warga amatlah besar. Sebab itu, amatlah berarti buat melaksanakan analisa terpaut pengelola kebutuhan buat mengenali warga yang ikut serta ini (Bryson, 2002).

Penerapan edukasi pada masyarakat, tidak hanya mengenai hak serta peranan masyarakat dalam pengawasan pembangunan, hendaknya pula melingkupi metode pengawasan dan penyampaian hasil pengawasan lewat bentuk aduan masyarakat. Dalam kondisi rezim wilayah, independensi wilayah sejatinya bermaksud buat tingkatkan kesertaan masyarakat serta akuntabilitas penyeleng- garaan rezim. Tetapi, tujuan ini amat konflik

dengan aplikasi independensi wilayah yang terjalin berusia ini, dimana ruang buat kesertaan masyarakat belum seluruhnya difasilitasi. Pada bagian yang lain, peluang warga buat melaksanakan pengawasan kepada kemampuan penguasa pula tidak terakbul. Perihal ini tampak dari sebagian survey yang dicoba oleh ORI terpaut tingkatan kesertaan warga dalam yanlik. Kesertaan masyarakat yang amat kecil dalam menjaga jalannya koreksi yanlik diakibatkan oleh sebagian aspek. Awal, kategorisasi standar jasa tidak mencermati keinginan warga. Dalam Hukum No 25 Tahun 2009, memercayakan kalau dalam menata serta memutuskan standar jasa, eksekutor harus mengikutsertakan masyarakat serta pihak terpaut.

Buat itu pengurusan zona khalayak wajib dilaksanakan dengan cara akuntabel, tembus pandang, serta partisipatif cocok dengan paradigma new public governance serta desakan open governance. Perihal itu pula terkait pada daya guna lembaga- lembaga pengawasan dalam mendesak kejernihan, akuntabilitas, serta partisipasi warga buat menghindari salah mengurus, penggelapan, dan buat memaksimalkan kemampuan penguasa. Tetapi, dengan terus menjadi bervariasinya tugas- tugas badan audit khalayak serta terus menjadi banyaknya jumlah subjek audit dibanding dengan pengaudit yang ada memunculkan kesenjangan yang besar di antara keduanya, alhasil daya guna badan audit jadi terkendala. Perihal ini jadi tantangan tertentu untuk badan audit penguasa di beberapa negeri. Tantangan di

atas pula dialami oleh badan pengawasan di Indonesia, terlebih sehabis masa independensi dusun.

Salah satu pemecahan buat mengalami tantangan itu merupakan lewat kerja sama badan audit dengan warga buat melaksanakan audit partisipatif. Audit partisipatif ini mempunyai kelebihan, antara lain bisa tingkatkan tingkat kesertaan warga, kejernihan, serta akuntabilitas di zona khalayak, yang pada kesimpulannya bisa tingkatkan kedewasaan berdemokrasi. Tidak hanya itu, lewat audit partisipatif masyarakat warga bisa membagikan masukan yang lebih berharga dalam cara audit serta membagikan anggapan yang multidimensional untuk pengaudit.

Adanya partisipasi masyarakat dalam upaya mengawasi dan memantau pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa bukan berarti karena masyarakat berprasangka buruk atau tidak percaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, tetapi dengan adanya upaya pengawasan dan pemantauan diharapkan dapat mendorong adanya optimalisasi pengawasan.

Ketersediaan data yang belum maksimal seharusnya lalu didorong lewat pembinaan serta pengawasan oleh tingkat rezim yang lebih besar ialah penguasa kabupaten atau kota serta penguasa propinsi kepada penguasa dusun. Sedang rendahnya keseriusan dialog dan akibat bisa ditangani dengan usaha pemberdayaan serta bimbingan pada warga. Ketersediaan

data yang belum maksimal seharusnya lalu didorong lewat pembinaan serta pengawasan oleh tingkat rezim yang lebih

Pemegang kekuasaan pada daerah ialah penguasa kabupaten atau kota serta penguasa propinsi kepada penguasa dusun. Sedang rendahnya keseriusan dialog dan akibat bisa ditangani dengan usaha pemberdayaan serta bimbingan pada warga. Masyarakat (LSM), Non Government Organization (NGO) ataupun golongan akademisi. Penerapan bimbingan pada warga, tidak hanya mengenai hak serta peranan warga dalam pengawasan Anggaran Dusun, hendaknya pula melingkupi metode pengawasan dan penyampaian hasil pengawasan lewat bentuk aduan warga. Bentuk aduan warga ialah salah satu instrumen akuntabilitas yang bisa dipakai warga selaku prinsip memilah tujuan penyampaian hasil pengawasannya cocok dengan suasana serta permasalahan yang akan diadakan (Khadka & Amp; Battarai, 2012).

Bentuk aduan warga itu pula wajib membolehkan terdapatnya sinergi antara pengawasan warga dengan pengawasan badan yang berhak. Terdapatnya pemasyarakatan perihal itu, diharapkan warga hendak menguasai kalau mereka berkuasa serta bisa mengantarkan usulan, kritik ataupun keluhan atas penjaan rezim dan mengenali pihak mana yang wajib dituju bersumber pada suasana serta hasil pengawasannya. Usulan bentuk aduan warga buat

disosialisasikan pada warga dusun begitu juga ditafsirkan pada Lukisan diatas.

Semenjak dasawarsa terakhir terus menjadi bertambah keinginan hendak pendekatan terkini dalam pembangunan yang diucap pendekatan partisipatif ataupun kesertaan. Pendekatan partisipatif atau kesertaan itu timbul selaku dampak dari sistem yang mengarah statistik dan Top- Down. Ketergantungan warga kepada kebijaksanaan penguasa pusat yang mengarah tidak memegang keinginan pembangunan itu sendiri mendesak percepatan serta pembaruan dalam pandangan kehidupan paling utama kedudukan yang dimainkan dengan cara sepadan oleh bermacam bagian warga. Dalam mangulas kesertaan warga pada pembangunan wilayah, penguasa butuh buat mengenali kemajuan di wilayah terlebih dulu. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas dari peran dari warga, hingga kehadiran warga pula tidak bisa ditatap sisi mata dalam kehidupan bernegara serta dalam aktivitas pembangunan.

Ketersediaan informasi yang belum maksimum sepatutnya kemudian didorong melalui pembinaan dan pengawasan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih besar yakni penguasa kabupaten ataupun kota dan penguasa propinsi pada penguasa desa. Lagi rendahnya intensitas perbincangan serta dampak dapat ditangani dengan upaya pemberdayaan dan edukasi pada masyarakat. Ketersediaan informasi yang belum maksimum sepatutnya kemudian didorong melalui

pembinaan dan pengawasan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih

besar yakni penguasa kabupaten ataupun kota dan penguasa propinsi pada penguasa desa. Lagi rendahnya intensitas perbincangan serta dampak dapat ditangani dengan upaya pemberdayaan dan edukasi pada masyarakat. Masyarakat (LSM), Non Government Organization (NGO) atau kalangan akademisi. Aplikasi edukasi pada masyarakat, tidak cuma hal hak dan andil masyarakat dalam pengawasan Perhitungan Desa, seharusnya pula melingkupi tata cara pengawasan serta penyampaian hasil pengawasan melalui wujud kompetisi masyarakat. Wujud kompetisi masyarakat yakni salah satu instrumen akuntabilitas yang dapat digunakan masyarakat berlaku seperti prinsip memilah tujuan penyampaian hasil pengawasannya sesuai dengan atmosfer dan kasus yang hendak diadakan (Khadka & Battarai, 2012).

Wujud kompetisi masyarakat itu pula harus mengizinkan adanya sinergi antara pengawasan masyarakat dengan pengawasan tubuh yang berkuasa. Adanya sosialisasi Mengenai itu, diharapkan masyarakat akan memahami jika mereka berdaulat dan dapat membawakan usulan, kritik atau keluhan atas pembelanjaan pemerintahan serta mengidentifikasi pihak mana yang harus dituju berasal pada atmosfer dan hasil pengawasannya. Usulan wujud kompetisi masyarakat untuk disosialisasikan pada masyarakat desa sedemikian itu pula ditafsirkan pada Gambar diatas.

Dari dekade terakhir lalu jadi meningkat kemauan akan pendekatan terbaru dalam pembangunan yang diucap pendekatan partisipatif atau partisipasi. Pendekatan partisipatif ataupun partisipasi itu mencuat berlaku seperti akibat dari sistem yang membidik statistik dan Top-Down. Ketergantungan masyarakat pada kebijaksanaan penguasa pusat yang membidik tidak menggenggam kemauan pembangunan itu sendiri menekan percepatan dan pembaruan dalam pemikiran kehidupan sangat penting peran yang dimainkan dengan metode proporsional oleh berbagai bagian masyarakat. Dalam membahas partisipasi masyarakat pada pembangunan area, penguasa memerlukan untuk mengidentifikasi perkembangan di area terlebih dahulu. Kedudukan penguasa dalam pembangunan tidak terbebas dari kedudukan dari masyarakat, sampai kedatangan masyarakat pula tidak dapat dipandang bagian mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan.

Setiap upaya pembangunan yang dilaksanakan pastinya membutuhkan sesuatu keikutsertaan dari warga dalam memantau seluruh aktivitas-aktivitas, bagus dalam langkah pemograman, aplikasi serta hingga pada langkah penilaian, alhasil penerapan aktivitas pembangunan itu bisa cocok dengan konsep yang diresmikan tadinya serta, apabila terjalin penyimpangan lekas di perbaiki (Gamaliel Hirung Ding, DB. Paranoan, 2014). Oleh sebab itu tanpa kesertaan warga pada pengawasan pembangunan itu sendiri, apa yang di

agendakan serta dilaksanakan dapat menuju ke arah yang berlawanan dengan tujuan yang sudah digariskan. Berartinya pengawasan dalam mendukung kesuksesan sesuatu program pembangunan amat dipengaruhi oleh kesertaan warga. Dalam di masa yang serba demokratis ini hingga sesuatu pengawasan hendak sukses bila terdapat kesertaan dari warga. Perihal ini membuktikan kalau kesertaan warga pada pengawasan pembangunan telak dicoba alhasil tidak hanya apa yang digarap cocok dengan konsep yang diresmikan, pula buat menjamin supaya hasil pembangunan bagus raga ataupun non- fisik sanggupenuhi keinginan warga.

Fungsi dan andil atasan dalam badan industri sering kali spesifikasinya berlainan dengan aspek kegiatan ataupun badan lain (misalnya badan badan pembelajaran ataupun rumah Membuat Visi serta Insting Atasan. Visi ialah suatu angan-angan yang mau direalisasikan yang memantulkan tekad, energi raih besar, ambisi, antusias serta kondisi ataupun konkretisasi sempurna di era depan. Sistem pengaturan internal penguasa merupakan sistem yang terbuat oleh penguasa itu sendiri, bagus penguasa pusat ataupun penguasa wilayah yang cocok dengan perundang-undangan serta determinasi yang legal yang menciptakn pengurusan penguasa bagus pusat ataupun wilayah berjalan dengan bagus, mulai dari pemograman, penerapan, pengawasan, hingga dengan pertanggungjawaban wajib dilaksanakan dengan cara teratur, teratasi, dan berdaya guna serta efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, H. (2004) 'Policy and planning of the tourism industry in Malaysia', in The 6th ADRF.
- Gamaliel Hirung Ding, DB. Paranoan, A. D. (2014) 'Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau', *Jurnal Administrative Reform*.
- Journal, P. A. et al. (2016) 'Jurnal Administrasi Publik Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah', 6(1), pp. 75-86.
- Jurnal, J. and Mea, I. (2021) 'Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara', *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*, 5(1), pp. 464-483.
- Kasim, H. (2017) 'Memikirkan Kembali Pengawasan Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Business Judgement Rules Rethinking the Supervision of State-Owned Enterprises Based on Business Judgement Rules'.
- Kusuma Putra, C. and Nur Pratiwi, R. (2023) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.

- Maswati, R. (2018) 'Fungsi Pengawasan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Pada Kampung Manggonswan Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori', *Gema Kampus*, 13(1), pp. 15-22.
- Ningsih, A. (2020) 'Faktor-Faktor Fungsi Pengawasan Didalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi Gedung Di Kabupaten Kerinci', *Ekonomi dan Pendidikan*, 5(2), pp. 116-128.
- Putra, C. (2013) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Rahayu, M. and Budi, A. (2013) 'Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa', Jakarta, www.kelembagaandas.wordpress.com.
- Sugiartha, P. T., Herawati, N. T. and Atmadja, A. T. (2014) 'Pengaruh Anggaran Partisipatif Terhadap Budgetary Slack Dengan Informasi Asimetri Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng', *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Tiza, A. L., Hakim, A. and Haryono, B. S. (2014) 'Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara)', *Wacana*

PROFIL PENULIS



Robert Tua Siregar, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 November 1967. Merupakan alumnus Jurusan Teknik Manajemen Industri Fakultas Teknik Universitas Sisingamangaraja XII Medan dan Sosiologi Fakultas Sospol Univ. Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 1998 mengikuti Program Tugas Belajar pada Magister Perencanaan

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dan lulus pada tahun 2001 dari Universitas Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 2007 menjalani Tugas Belajar Doktor Falsafah Bidang Urban & Regional Planning pada University Of Malaya. Sejak tahun 1994 menjadi dosen pada perguruan tinggi swasta di Pematangsiantar, dan pada tahun 2012 beralih fungsi status dari Pegawai Pemerintahan menjadi Dosen DpK di Lldikti Medan ditempatkan di Program Pascasarjana Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dan Fakultas Ekonomi bidang Perencanaan pembangunan. Saat ini Dosen di STIE Sultan Agung Pematangsiantar. Tulisan buku referensi kolaborasi telah di terbitkan pada beberapa penerbit, alamat surel tuasir@gmail.com.

Inovasi dalam Pembangunan

Nunik Yudaningsih

BAB 11



BAB 11

INOVASI DALAM PEMBANGUNAN

A. Inovasi Produk Karya Fikir Manusia

Beruntunglah manusia. Ia di jadikan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang sempurna, ia di beri oleh Allah perlengkapan hidup yang lebih baik di banding makhluk lainnya. Manusia oleh Allah di percayai untuk memimpin kehidupan dunia. Allah menjadikannya sebagai khalifah (Al-Baqoroh:29-30). Untuk memecahkan segala permasalahan yang di hadapinya, Allah memberi kesempurnaan kepada manusia dibanding dengan makhluk lainnya dengan perlengkapan hidup yang di sebut akal.

Akal inilah yang kemudian menyebabkan hidup manusia lebih baik di dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akalnya manusia dapat memecahkan kebutuhan hidupnya untuk mengubah dari keadaan yang tidak di kehendakinya kepada keadaan yang lebih baik seperti yang diinginkannya. Akal inilah yang menyebabkan lahirnya perubahan dalam kehidupan manusia. Berkat kemampuan akalnya manusia menggunakan pikirannya untuk menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pembaharuan yang di ciptakan oleh akal manusia yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, dan sebelumnya belum pernah ada inilah yang di sebut *inovasi*. Inovasi

hadir sebagai produk kreativitas berfikir manusia untuk memecahkan kebuntuan hidupnya. Inovasi merupakan perwujudan manusia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup kearah yang lebih baik. Maha suci Allah yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna, yang memberinya akal untuk memperbaiki kehidupannya, supaya manusia memikirkan kebesaran-Nya, supaya manusia bersyukur dan beribadah kepada-Nya *Wama kholaktal jinna wal unsa ill aliya budun.*

B. Tujuan Inovasi

Inovasi hadir dengan tujuan untuk produktivitas, efisiensi, efektivitas dan relevansi dalam menjawab tuntutan kebutuhan hidup manusia. Inovasi merupakan kreasi manusia dalam memperbaiki kehidupannya. Inovasi merupakan cara untuk mencari dan menemukan jalan keluar dari kebuntuan manusia, merupakan anugrah Allah supaya manusia bersyukur atas nikmat yang diberikan-Nya. Usaha manusia menemukannya dengan banyak cara. Ia berimajinasi menerawang dunia maya, memikirkan ciptaan-Nya, memikirkan sesuatu yang belum pernah ada dalam lingkup ciptaan manusia. Selain berkreasi menciptakan yang diperluka namun sebelumnya belum pernah ada, manusia juga memperbaiki produk sebelumnya, menyempurnakan dan melengkapi produk sebelumnya, menyempurnakan dan melengkapi sesuatu yang sudah ada, ia meniru dan kemudian menyempurnakan sehingga berwujud baru. Itulah inovasi.

Inovasi merupakan perwujudan yang baru dari pengalaman sebelumnya dengan menyempurnakannya berdasarkan informasi baru sesuai kebutuhan masanya. Dalam arti yang sesungguhnya manusia tak akan bisa menciptakan yang baru yang belum pernah ada, sebab pencipta awal adalah Tuhan.

Manusia hanya mencipta dalam batas keperluan hidupnya, demi kesempurnaan hidupnya, memikirkan ciptaan Tuhan yang disebut alam semesta sebagai makhluk-Nya. Manusia berinovasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas hidupnya supaya lebih baik, melaksanakan tugas untuk memelihara dunia yang telah diciptakan Tuhan, manusia berinovasi dalam ruang tugas sebagai khalifah yang diberi tugas memakmurkan dunia. Tuntutan dan kebutuhan manusia yang menyebabkan lahirnya inovasi. Inovasi lahir karena keterbatasan manusia. Manusia hidupnya belum sempurna, tuntutan hidupnya ingin mencapai tingkat kepuasan seperti yang menjadi dambaan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsanya. Rasa ketidakpuasan inilah yang menyebabkan manusia terus berfikir, berimajinasi, berkarya, mencari yang baru, menemukan yang baru. Yang menyebabkan manusia mengalami perubahan dari masa ke masa.

Inovasi hadir dalam tujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas dan relevansi. Dalam koridor bisnis inovasi merupakan strategi untuk menenangkan persaingan. Melalui inovasi terciptalah produk baru yang lebih baik, lebih canggih, lebih efisien,

lebih murah, lebih sempurna, berdaya guna lebih tinggi dan cocok dengan tuntutan dan kebutuhan pada masanya.

C. Makna dan Pentingnya Inovasi

Inovasi adalah suatu kemampuan untuk, memahami dua keadaan atau lebih yang berbeda, yang kemudian dari keadaan tersebut di ciptakan suatu ide baru yang orsinil yang sebelumnya tidak terfikirkan dan belum pernah ada. Keadaan baru tersebut asli merupakan buah fikiran ciptaan manusia sebagai penjelmaan baru dari keadaan yang berbeda beda dari dua buah objek atau lebih. Objek baru yang sangat berguna bagi penyempurnaan kualitas hidup manusia sebab di perlukan. Objek baru ini merupan suatu pemikiran untuk ke masa depan yang di bentuk dari berbagi macam kombinasi ide, sehingga melahirkan bentuk baru, produk baru yang menarik perhatian karena belum pernah di ciptakan sebelumnya.

Apa yang dikatakan baru pada saat sekarang merupakan hasil dari perpaduan banyak pengalaman kreasi manusia sebelumnya yang di tujukan kearah penyempurnaan kehidupan, baik sesuatu yang bisa dipakai, dikonsumsi, maupun dinikmati karena menimbulkan kesenangan, semuanya merupakan produk dari inovasi manusia. Tiap-tiap karya inovasi merupakan kombinasi baru, baik dalam bentuk benda, warna, seni, mode Bahasa, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Kemajuan yang di capai manusia diperoleh berkat karena

manusia memiliki kemampuan untuk meniru untuk menciptakan model baru yang ada pada dirinya yang dinamakan inovasi. Inovasi inilah yang melahirkan objek baru, sehingga terdapat perubahan-perubahan dalam wujudnya. Kreativitas yang berhasil mewujudkan ciptaan baru dalam wujud inovasi, menggambarkan kearifan seseorang dalam memadukan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan inspirasi, imajinasi, ilham, intuisi, maupun temuan sekitar yang kebetulan muncul seperti temuan "*Eureka*" nya *Archimedes*. Orang seperti ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam memahami manfaat terhadap objek yang di ciptakannya bagi kehidupan manusia.

Inovasi lahir karena kebutuhan manusia untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Manusia mempunyai kebutuhan yang banyak. Manusia dikenal sebagai makhluk yang tidak pernah puas, yang berubah-ubah karena sering berubah-ubah sikap dan keinginannya itulah yang menyebabkan kebutuhan manusia banyak dan tidak pernah menjadi puas terhadap apa yang dimilikinya. Namun demikian untuk memenuhi keinginannya itu adakalanya terwujud dengan mudah dan adakalanya menemui banyak kendala, sehingga pada suatu ketika dia mencapai batas maju yang di sebut mandek atau tidak lagi berubah karena telah mencapai titik jenuh. Pada kondisi seperti inilah manusia mencapai terobosan baru, jalan keluar agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk

keperluan seperti inilah manusia mencari ideu baru yang di wujudkan dalam bentuk inovasi. Selain karena terbatasnya kemampuan manusia dalam mencapai apa yang di inginkanya, sementara dia menghadapi kesulitan dia juga di desak oleh banyak factor yang datang beriringan dan silih berganti.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan inovasi, bukti hasil inovasi dapat kita lihat dalam berbagai kehidupan baik di rumah tangga, dalam industry, dunia kedokteran, komunikasi, elektronik maupun kehidupan organisasi. Bukti-bukti tersebut amat menakjubkan, sebab banyak di antaranya tidak pernah ada sebelumnya dikatakan tidak mungkin, tapi dewasa ini hadir hal yang baru di tengah-tengah kehidupan. Misalnya transpalantasi jantung dalam dunia kedokteran, seni, mode, robot, computer dan banyak lagi yang lainnya yang sangat membantu mempertinggi kualitas manusia. Inovasi di perlukan bukan hanya untuk melahirkan barang baru, melainkan juga di perlukan oleh setiap orang yang menginginkan meraih keberhasilan hidup pada tingkat yang layak.

D. Pengertian Inovasi

Inovasi menurut konsep bahasa (Webster's New World Dictionary, 1991:697) "*Something newly introduced, change in the way of doing thing,*" merupakan suatu proses memasukan atau mengenalkan sesuatu yang baru, mengubah cara atau kebiasaan dalam menangani sesuatu, penggantian yang lama dengan yang baru, mengenalkan

sesuatu yang baru atau pembaruan. Dalam kamus Bahasa Indonesia (1997:381) inovasi di artikan sebagai penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah di kenal sebelumnya, misalnya gagasan, metode atau alat.

Menurut J.B. Say (1993:33), *it can be difened... "as changing the value and satisfaction obtained from resources by the consumer"*. Sebagai suatu perubahan nilai dan kepuasan yang di peroleh dari sumber oleh pengguna. Menurut Peter Drucker (1997:84), *innovation as "change that creates a new dimention of performance"*. Inovasi sebagai suatu perubahan yang menimbulkan dimensi baru dalam penampilannya.

Menurut Ellitan dan Anatan (2008:3) inovasi merupakan sistem aktivitas organisasi yang mentransformasikan teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi. Inovasi mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses, dan jasa baru.

Menurut pendekatan yang dilakukan oleh Simonton dalam Papasi (1994:92-94), inovasi harus dilihat dalam kaitan perspektif sistem-sistem silang, komparatif, dan ide-ide baru. Dapat dikatakan pengertian inovasi secara umum adalah terdapatnya kemampuan akumulatif yang dimotori oleh orang atau sekelempok orang kreatif dan dinamis dalam suatu organisasi.

Inovasi merupakan setiap ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi

biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi atau pun penelitian yang terencana. Inovasi yang sukses adalah penciptaan dan pelaksanaan proses baru, produk, pelayanan dan metode dari permintaan yang menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam menghasilkan efisiensi, efektif atau kualitas. Ini sejalan dalam (Thomas H. Davenport, 1996: 233) bahwa tidak ada yang lebih penting bagi suatu persaingan perusahaan selain kemampuannya untuk mengembangkan produk dan jasa baru dan menyampaikan hal tersebut kepada pelanggan, proses pengembangan dan penyampaian atau penyerahan produk.

Inovasi adalah istilah yang digunakan cukup luas namun dalam konteks sektor publik agak ambigu. Hal ini terjadi pertama, karena banyak sekali definisi inovasi yang diterapkan di dalam sektor bisnis tetapi sedikit sekali didefinisikan untuk sektor publik. Kedua, parameter penerapan inovasi di dalam sektor public sangat berbeda dalam implementasi di sektor bisnis. Inovasi dalam sektor public mulai banyak diterapkan diberbagai negara seperti Albania, Mesir, Jordania, Turki, Maroko, Kroasia, Suria, dan Tunisia. Albania dan Turki menjalankan inovasi dengan melibatkan warga negara dengan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan.

Jika inovasi dilihat sebagai suatu proses, maka inovasi terdiri atas lima tahap dan terbagi atas dua bagian besar. Bagian pertama dari dua bagian besar itu adalah

Tahap 1 dan Tahap ke 2. Kedua tahap itu disebut sebagai Tahap "*initiation subprocess*", atau dikenal sebagai tahap Pemrakarsa. Sedangkan tahap 3,4 dan 5 yang termasuk dalam bagian kedua disebut sebagai Tahap "*implementation sub-proess*" atau dikenal sebagai Tahap Aplikasi Inovasi.

1. Tahap 1 adalah tahap "*agenda-setting*"

Pada tahap ini dilakukan pemikiran mengenai masalah-masalah yang dihadapi dan masalah-masalah yang menuntut pemecahan dengan segera. Untuk itu, diperlukan suatu "*starting-pont*" yang mendukung jalannya pemikiran tersebut berupa sarana yang ada. Hal pertama adalah pribadi-pribadi yang mempunyai posisi kunci dalam pengambilan keputusan dalam organisasi dan hal kedua yaitu konsep yang harus didukung oleh orang atau beberapa orang yang mampu bekerja untuk merumuskan permasalahan sebagai suatu tim.

2. Tahap ke 2 adalah tahap "*matching*"

Pada tahap ini, diinventarisasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk diintegrasikan dalam suatu sistem kerja yang terpadu dan terprogram sebagai suatu proyek.

3. Tahap ke 3 adalah tahap "*redefiniting*"

Pada tahap ini diadakan suatu evaluasi tentang perlu atau tidaknya diadakan perbaikan, penambahan, atau peningkatan suatu komponen tertentu dalam proyek.

4. Tahap 4 adalah tahap “structuring”

Pada tahap ini diadakan pengaturan personil dan pengaturan pembagian dan pelaksanaan tugas, baik tugas lama maupun tugas baru.

5. Tahap 5 adalah tahap “interconnecting”

Pada tahap ini kegiatan diarahkan pada koordinasi antar dinas, bagian urusan atau unit, baik secara vertical maupun horizontal dan yang berkelanjutan.

Menurut Ellitan (2008:9) ada beberapa strategi yang diterapkan pada suatu organisasi atau perubahan, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Teknologi

Penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi memerlukan sumber daya baru untuk menambah manfaat dari aktivitas organisasi atau perusahaan. Teknologi merupakan peluang dan tantangan sekaligus bagi organisasi atau perusahaan saat ini. Teknologi akan dirasakan sebagai tantangan jika organisasi tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi dan pengelolaannya secara strategik. Jika teknologi dikelola dengan baik sejak fase rencana adopsi sampai dengan implementasinya. Teknologi akan memberikan manfaat dan peluang secara strategik dalam jangka panjang. Sebagai organisasi atau perusahaan masih memandang teknologi sebagai alat dan sumber daya untuk produksi dan juga teknologi diintegrasikan dengan strategi dengan

bidang fungsional organisasi dan strategi bisnis.

2. Strategi Inovasi

Inovasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tanpa inovasi organisasi atau perusahaan akan mati. Organisasi atau perusahaan yang melakukan inovasi terus-terusan akan mendapatkan kreasi, model dan penampilan produk yang baru. Keberhasilan strategi inovasi yang dilakukan tergantung pada budaya organisasi atau perusahaan. Diperlukan kerjasama, pemikiran yang terbuka dan dukungan semua pihak untuk mencapainya keberhasilan inovasi dalam mencapai keunggulan kompetitif dan menjadi organisasi atau perusahaan yang unggul dalam persaingan global.

3. Strategi Operasi

Ellitan (2008:9) memandang strategi operasi atau manufaktur sebagai kekuatan manufaktur yang efektif sebagai suatu senjata kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Strategi manufaktur yang diimplementasikan akan mempengaruhi tujuan dan strategi perusahaan dan kemungkinan fungsi-fungsi manufaktur yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang, strategi manufaktur mewakili prioritas kompetitif, yaitu meliputi biaya, kualitas, fleksibilitas dan pengiriman.

Menurut Goswami dan Mathew (2005);

PDMA (2008); De Mayer dan Garg (2005; Senge dkk(2008) dalam Fontana Avanti 2011 inovasi adalah kesuksesan ekonomi berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam hubungan input dan output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan pada konsumen dan/atau pengguna. Yang didefinisikan secara luas bahwa inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas, dan lingkungan. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang mengandung arti tidak saja keberhasilan ekonomi melainkan juga keberhasilan sosial. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang menciptakan nilai lebih besar untuk konsumen, untuk komunitas, dan lingkungan pada saat yang sama.

Definisi ini menjelaskan bahwa inovasi tidak berarti saja “kebaruan” atau sesuatu yang baru, barang dan/atau jasa atau sistem produksi baru atau cara memasarkan baru; “kebaruan” itu perlu disertai dengan dampak positif bagi konsumen dan produsen; “kebaruan” itu harus menciptakan nilai guna bagi konsumen dan nilai tambah bagi

produsen; “kebaruan” yang menghasilkan kesuksesan ekonomi dan sosial, pada konteks inovasi dan penciptaan nilai tingkat individu, organisasi dan masyarakat.

E. Tipe-tipe dan Teori Manajemen Inovasi

Terkait dengan inovasi tersebut, Baker (2002) dalam Sangkala (2013:31) mengemukakan mengenai 3 tipe inovasi. Tiga tipe tersebut kemudian ditambahkan oleh Idea (2005) menjadi 5 tipe inovasi. Kelima tipe menurut Baker dan IdeA adalah inovasi yang terkait dengan :

1. Strategi/kebijakan misalnya misi, sasaran strategi dan pertimbangan baru
2. Kebijakan dan bentuk organisasi layanan/produk, misalnya perubahan fitur dan desain dari pelayanan produk,
3. Penyampaian layanan, misalnya perubahan cara baru dalam penyampaian layanan atau berinteraksi dengan klien,
4. Proses, misalnya prosedur internal, kebijakan dan bentuk organisasi baru,
5. Sistem interaksi, misalnya cara baru atau perbaikannya yang berbasis pengetahuan dalam berinteraksi dengan aktor lain serta perubahan dalam cara menjalankan pemerintahan.

Dewasa ini inovasi banyak dibicarakan, diseminarkan, ditulis, dan dibahas dalam ruang kelas kecil sampai besar, ruang rapat para manajer dan pimpinan,

diskusi bisnis lembaga konsultasi manajemen dan klien, pemerintah dan publik, surat kabar dan majalah bisnis/publik hingga iklan media. Inovasi sering dikaitkan dengan produk baru, temuan baru atau invensi, teknologi baru, cara baru, email baru, aroma baru, kemasan (*packaging*) baru, dan hal-hal lain yang baru. Pertanyaannya apakah hal-hal tersebut berhasil menciptakan nilai guna bagi masyarakat atau konsumen dan/atau pengguna, yang pada gilirannya menciptakan nilai bagi masyarakat atau konsumen.

Berinovasi memerlukan manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengevaluasi tujuan dan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif termasuk disini adalah melakukannya dengan cara yang etis dan melihat inovasi dalam perspektif sistem bahwa setiap bagian dan elemen inovasi baik baik yang ada di dalam maupun di luar organisasi saling bergantung. Adapun tingkat analisis dari Manajemen inovasi penciptaan nilai (dalam Fontana, 2011: 30) terdiri atas:

1. Individu, berfokus pada kemampuan, motivasi, intelegensi, interaksi individu dengan lingkungannya. Kemampuan dan motivasi serta intelegensi dan interaksi individu dengan lingkungannya menunjang individu untuk menciptakan nilai dengan bertindak secara kreatif untuk membuat pekerjaan/pelayanan menjadi lebih baru dan lebih layak.
2. Organisasi, berfokus pada penciptaan nilai untuk organisasi atau perusahaan, penciptaan pengetahuan,

invensi, dan manajemen. Bila organisasi sebagai unit analisis, kegiatan invensi dan inovasi berdampak pada proses penciptaan nilai. Pada buku Manajemen Inovasi ini, penulis memfokuskan kebanyakan ilustrasinya pada inovasi dengan unit analisis organisasi. Perusahaan cenderung melakukan inovasi ketika mereka menghadapi lingkungan yang dinamik dan kompleks dipimpin oleh manajer wirausaha, memiliki sumber daya internal, memiliki jaringan yang luas, dan memiliki kapasitas organisasi untuk mengkombinasikan dan mengubah pengetahuan menjadi pengetahuan baru. Di sini fokusnya adalah bagaimana pengguna yang ditargetkan (*target user*) memperoleh manfaat dari produk (barang dan/atau jasa) baru.

3. Masyarakat, berfokus pada pemerintah, yang berjuang untuk menciptakan nilai bagi kebaikan dan manfaat masyarakat (hajat hidup orang banyak). Inovasi ini berfokus pada kegiatan, program, dan insentif untuk berwirausaha dan berinovasi yang dimaksudkan untuk mendorong organisasi-organisasi dan ventura-ventura baru untuk berinovasi dan memperluas manfaat yang mereka hasilkan untuk masyarakat dan anggota-anggotanya.

Manajemen inovasi memberi perspektif tentang bagaimana menatakelola proses penciptaan nilai (*value creation*) agar membuahkan kesuksesan ekonomi dan

sosial, sebagai konsekuensi logis dari dihasilkannya nilai tambah yang tinggi (dalam Fontana: 25). Penulis menyarankan jika akan mencoba menatakelola inovasi mengikuti prinsip-prinsip De Meyer dan Garg 2005 yaitu sebagai berikut :

1. Tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan, yaitu inovasi yang berhasil membutuhkan visi yang jelas yang didefinisikan oleh kepemimpinan dalam organisasi dan oleh penciptaan lingkungan yang memungkinkan visi tersebut disebarkan, dibagikan, dan dimiliki oleh semua orang dalam organisasi dan semua kolaborator organisasi.
2. Inovasi membutuhkan manajemen risiko yang terkalkulasi, yaitu mengetahui bagaimana mengelola risiko. Perusahaan perlu mengembangkan system untuk mengatasi risiko termasuk di sini adalah memastikan bahwa para karyawan kunci dalam organisasi bertingkah laku sebagai innovator dan pengusaha (intrapreneur), dan mereka dapat menularkan semangat (spirit) yang sama kepada para rekan kerja dan kolaborator organisasi lainnya yang ada di dalam dan di luar perusahaan/organisasi.
3. Inovasi dipicu oleh kreatifitas, yaitu inovasi dimulai dari kreatifita. Banyak anggota organisasi memiliki kreativitas dan adalah tugas organisasi untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan munculnya kreatifitas. Ada lima ide inovasi untuk menjadi lebih kreatif yaitu : membentuk kelompok atau tim kerja inovasi, mengekspose anggota-anggota

organisasi pada informasi, memberikan imbal jasa dan pengakuan yang layak, menetapkan tekanan dan tenggat untuk innovator dan tim inovasi, dan menggunakan instrument pemecahan masalah.

4. Inovasi membutuhkan integrasi organisasi, yaitu untuk melaksanakan inovasi dengan berhasil, seluruh organisasi harus merasa memiliki inovasi, jiwa dan spirit inovasi mendarah-daging dalam tubuh organisasi. Inovasi tidak dapat didelegasikan hanya ke fungsi-fungsi tertentu. Tim manajemen puncak dan tim operasional dalam organisasi harus bergerak bersama sejak tahap awal proses inovasi hingga tahap akhir proses inovasi, dalam suatu rantai nilai inovasi.

Integrasi organisasi adalah konsep kunci inovasi. Ada empat tipe integrasi yang harus dilakukan menurut Arnoud De Mayer dan Sam Garg antara lain :

1. Integrasi proyek dengan visi strategis organisasi : ada kesesuaian proyek dengan tujuan jangka panjang organisasi dan ada kontribusi proyek bagi pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.
2. Integrasi intemporal antara fase-fase yang berbeda dalam proyek : ada kesesuaian antara proses dan output dari suatu fase dengan fase lainnya.
3. Integrasi fungsi selama proyek berjalan:selama proyek berlangsung, departemen, fungsi atau pusat-pusat kompetensi yang berbeda perlu bekerja secara terintegrasi.

4. Integrasi dengan lingkungan : inovasi perlu sesuai dengan konteks di mana inovasi dilakukan dan hasil inovasi akan digunakan.
5. Keberhasilan dalam inovasi membutuhkan keunggulan dalam manajemen proyek, yaitu inovasi adalah implementasi. Keunggulan dalam manajemen proyek berkaitan dengan sisi implementasi inovasi. Ada tujuh tantangan (tuntutan) utama dalam menatakelola proyek yaitu: kemampuan dalam perencanaan, pemangku kepentingan, aliran informasi, manajer proyek, sasaran produk, penggunaan waktu yang efisien, sistem merespon terhadap dinamika lingkungan.
6. Informasi adalah sumber daya penting untuk efektivitas inovasi, yaitu jika inovasi dilihat sebagai sebuah proses maka informasi dan ide adalah bahan baku yang akan ditransformasi menjadi produk (barang/jasa) yang baik. Empat tindakan yang perlu diperhatikan dalam rangka memperoleh akses sumber daya informasi yaitu : kontak langsung, rancang struktur organisasi secara sedemikian rupa, rancang struktur organisasi yang menunjang pola komunikasi, dan pilih "*gatekeepers*" yang handal untuk inovasi Anda.
7. Hasil dari upaya kreatif perlu dilindungi, yaitu melakukan proteksi atas produk (barang/jasa) inovatif atau bisa dikatakan penggunaan hak paten atau hak cipta.

Inovasi yang berhasil berakar pada pemahaman yang baik tentang pasar, yaitu kemampuan tingkat tinggi dalam berkomunikasi dengan konsumen, pelanggan, dan konsumen serta pelanggan potensial, serta pihak-pihak lain yang mempengaruhi keputusan membeli merupakan faktor fundamental keberhasilan dalam berinovasi.

F. Pengertian Pembangunan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyandi Bratakusumah, 2005:126). Siagian (1994:25) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994:9) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai "suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik

karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya.

Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penangan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Sedangkan Menurut Rogers dalam Risma Handayani pembangunan masyarakat pedesaan pembangunan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*proferty*), kerusakan (*descruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alienation*).

Dalam pelaksanaan pembangunan maka sangat diperlukan adanya strategi-strategi pembangunan agar pembangunan itu sesuai dengan perencanaan. Perlu dicatat bahwa tidak semua negara menganut strategi pembangunan yang jelas biasanya, kebanyakan negara tidak mengikuti strategi pembangunan yang dapat diidentifikasi dan sering kali berubah-ubah. Ini diakibatkan karena melemahnya peran negara di NSB, dan bisa juga akibat krisis ekonomi global. Bisa difahami apa peranan strategi pembangunan bagi banyak negara saat ini cenderung menjawab manajemen daripada melakukan transformasi sosial ekonomi. Pada gilirannya hal ini mengurangi reverensi teori pembangunan

Kemudian, Tikson (2005:87) menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sector industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sector pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Siagian (1983:72) bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok

untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Inayatullah dalam Ardianto (2012:13), mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang lebih memungkinkan masyarakat memiliki control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya.

Tolak ukur pembangunan salah satunya adalah faktor keadilan sosial. Factor ini bukan hanya berdasarkan pertimbangan moral, tetapi berkaitan dengan kelestarian pembangunan moral, tetapi berkaitan dengan kelestarian pembangunan. Diadaptasi dan disarikan dari Budiman dalam Ardianto (2012:4).

Pembangunan didefinisikan sebagai upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara Menurut Ellitan dan Anatan (2008:3) terencana menuju masyarakat modern. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Dalam pembangunan nasional pemerintah daerah saat ini berupaya untuk mengembangkan inovasi disegala hal untuk membuat daerahnya menjadi semakin maju. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal

sebelumnya. inovasi merupakan sistem aktivitas organisasi yang mentransformasikan teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi. Inovasi mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses, dan jasa baru.

Pemerintah Daerah disini sangat berperan penting untuk menangani masalah pembangunan di Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan di selenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

H. Inovasi dalam Pembangunan

Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat (Rogers, 1995). Inovasi muncul sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan pembangunan yang telah terjadi. Munculnya inovasi kebijakan lebih dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus permasalahan dalam implementasi kebijakannya. Secara lebih luas, kegagalan yang terjadi juga bukan semata kesalahan pada implementasi kebijakannya, namun juga pada tataran proses perencanaan kebijakan itu sendiri. Biasanya, kondisi ini bergilir sistemik mengikuti kebijakan yang ada

sebelumnya. “kegagalan sistemik” (*systemic failures*) dapat digolongkan menjadi 3 (Taufik, 2008), yaitu:

1. Kegagalan pemerintah (*government failures*).
2. Kegagalan pasar (*market failures*).
3. Kegagalan sistem yang lain karena tidak adanya elemen sistem yang penting, atau tidak berfungsinya elemen sistem dan/atau tidak berkembangnya interaksi dalam system dengan baik.

Inovasi Pembangunan untuk pengembangan dalam memajukan kesejahteraan manusia tentunya perlu adanya suatu usaha dan proses agar mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan cara-cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan perekonomian agar masyarakat dapat menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Inovasi dalam pembangunan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan.

Tujuan pembangunan tersebut ialah untuk perbaikan ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat sehingga lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih baik, pemerintah pusat telah memberikan

wewenang kepada daerah untuk menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui Peraturan. Pembangunan merupakan salah satu faktor yang harus ditingkatkan kualitasnya sebagai kunci keberhasilan dalam menjalankan visi dan misi suatu tujuan daerah.

Ditandai dengan dibangunnya beberapa fasilitas umum berupa sarana pendidikan, kesehatan, olah raga, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Jadi dapat penulis simpulkan dari seluruh definisi yang di temukan pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an (1971). *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Khadim AL. Haramin, Tanah Suci.
- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Cv Pustaka "AS"
- Ardianto, Harun Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Balai Pustaka.1997. *kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta: Depdikbub
- Ellitan Lena dan Lina Anatta. 2008. *Manajemen Strategi Operasi Teori dan Riset di Indonesia*. Bandung: Alfabet
- Drecker Peter F, 1997. *The Organization Of The Future*. Drucker Foundation.
- Fontana, Avanti, *Innovative we can : Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu, organisasi, dan Masyarakat*. Cipta Inovasi Sejahtera:Jakarta.
- Handayani,Risma. *Pembangunan Masyarakat tPedesaan*. Makassar: Alauddin University Press. 2014
- IDeA, 2005 *Innovation in Public Service: Literatur Review*. IDeA Knowledge,September, Availableonline:<http://www.ideaknowledge.gov.uk/idk/aio/1118552>
- Praeger. 2004. *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations*.

- Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sangkala. 2013. *Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi*. Surabaya
- Sangkala. 2013. *Innovative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Capiya Publishing
- Siagian S.P. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufik, Tatang. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. Perspektif Kebijakan, Pusat Pengkajian Kebijakan. Pengembanan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat*. Jakarta: BPPT
- Taufik, Tatang. 2008. *Governance dan Pembangunan Daerah*. Diakses melalui http://tatang-taufik.blogspot.com/2008_10_01_archive.html pada tanggal 11 juni 2011

PROFIL PENULIS



Dr. Nunik Yudaningsih, S.Pd., M.Pd., lahir di Ciamis pada tahun 1985. Anak ke 1 dari 2 bersodara yang lahir dari pasangan Drs. H. Jahidin dan Ibu Hj. Edah Sukaedah. Menikah dengan Dr. Dirmana M.Pd di karuniai 4 orang anak, Nanda Yuda Mandalika, Tria Widianingsih, Zahira Waillah dan Zahida Waizhah. Tempat tinggal dari

Kabupaten Pangandaran. Sekarang menjadi dosen tetap di AMIK Citra Buana Indonesia Sukabumi. Sejak tahun 2015, dengan Jabatan Fungsional Lektor. Lulus sebagai Pendidik Profesional (SerDos) tahun 2017. Menyelesaikan S1 di Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi Tasikmalaya(UNSIL), S2 di Manajemen Pendidikan Universitas Galuh Ciamis (UNIGAL) dan S3 di Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung (UNINUS). Riwayat kerja: Tahun 2007 s/d tahun 2015 Guru honor SMPN 1 atap cimerak mata pelajaran IPA, dan Guru SMAN I Parigi mata pelajaran Pendidikan lingkungan hidup. Pengalaman kerja lainnya Tahun 2014 Tim 11 NU kabupaten Pangandaran, Tahun 2015 Tim seleksi KPU kabupaten Pangandaran, Tahun 2016 Tim Seleksi Kepala DINAS Kabupaten Pangadaran. Tahun 2018 menjadi KPAD

kabupaten Pangandran dan Tahun 2019 pendamping UMKM
Jabar Juara Kabupaten Pangandaran.

Manajemen

Pembangunan Wilayah : *Strategi dan Inovasi*

Manajemen pembangunan dimaknai sebagai peranan manajemen publik dalam mewujudkan pembangunan. Kebutuhan akan studi manajemen pembangunan wilayah pada dewasa ini semakin mengemuka dan mengingat tuntutan yang semakin kuat dari para penyelenggara pemerintahan untuk merencanakan dan menjalankan otonomi daerahnya secara efektif dan efisien agar mendapatkan hasil maksimal.

Buku manajemen pembangunan wilayah ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang strategi dan inovasi mengenai konsep dasar manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan, pengalokasian sumber daya pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penganggaran pembangunan, implementasi pembangunan, koordinasi pembangunan, strategi pembangunan, manajemen keuangan dan investasi daerah, pengawasan pembangunan, dan inovasi dalam pembangunan.

Penulisan buku ini bertujuan untuk menambah referensi bagi para perencana atau pelaku pembangunan wilayah untuk dapat menerapkan proses pembangunan yang lebih demokratis.



PENERBIT INSANIA

Jl. Evakuasi, Gg. Langgar, No. 11,
Kalikebat Karyamulya, Kesambi, Cirebon
e-mail : penerbit.insania@gmail.com
web : <http://insaniapublishing.com>

ISBN 978-623-97233-1-6

